



UNIVERSITAS INDONESIA

IMIGRASI YAHUDI KE PALESTINA (1882-1948)

SKRIPSI

**ANIESAH HASAN SYIHAB
NPM 0606087580**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ARAB
DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

IMIGRASI YAHUDI KE PALESTINA (1882-1948)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora

**ANIESAH HASAN SYIHAB
NPM 0606087580**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ARAB
DEPOK
JULI 2010**

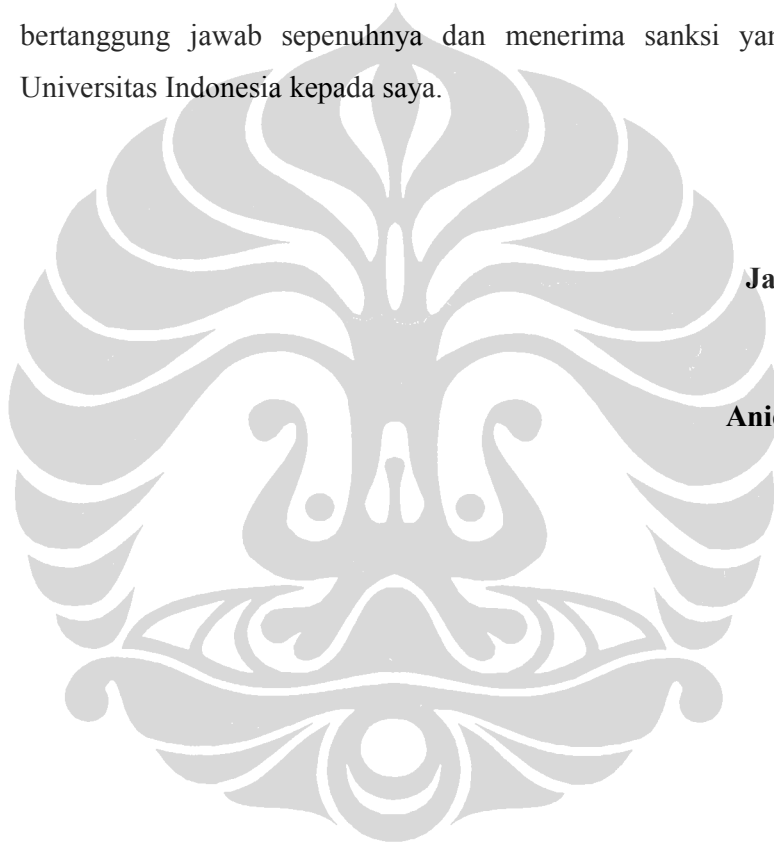
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 8 Juli 2010

Aniesah Hasan Syihab



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Aniesah Hasan Syihab

NPM : 0606087580

Tanda Tangan :

Tanggal : 8 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Aniesah Hasan Syihab
NPM : 0606087580
Program Studi : Arab
judul : Imigrasi Yahudi ke Palestina Tahun 1882-1948

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Suranta, M.Hum. (.....)
Penguji : Juhdi Syarif, M. Hum. (.....)
Penguji : Yon Machmudi, Ph.D. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2010

oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta, M.A.
NIP 131882265

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang senantiasa memberikan rahman-Nya kepada hamba-hamba-Nya baik disaat mereka ingat kepada-Nya atau pun tidak, Tuhan yang selalu ingat kepada hamba-hamba-Nya walaupun mereka terkadang lupa kepada-Nya. Dengan segala rahman dan izin-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul “Imigrasi Yahudi ke Palestina (1882-1948)”. Terima kasih *Ya Allah*.

Skripsi ini ialah suatu karya yang dicapai melalui sebuah kerja keras dan berbagai bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral dan materi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada pihak-pihak tersebut.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. der. Soz. Gumilar Rusliwa Somantri. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada Drs. Suranta, M.Hum, dosen pembimbing skripsi, atas segala waktu yang diluangkan untuk memberikan penulis segala bimbingan, masukan, saran, petunjuk, dan motivasi yang tiada tara sehingga penulis tetap fokus dalam mengerjakan skripsi ini dan akhirnya berhasil menyelesaikannya. Terima kasih kepada Juhdi Syarif M.Hum. dan Yon Machmudi, Ph.D. selaku dosen penguji. Rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada Keluarga Besar Ikatan Keluarga Asia Barat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Terima kasih kepada Dr. Afdol Tharik Wastono sebagai Koordinator Program Studi Arab, Dr. Muhammad Luthfi dan Juhdi Syarif M.Hum. yang silih berganti menjadi pembimbing akademis penulis. Terima kasih kepada Wiwin Triwinarti, M.A. atas segala ilmu gramatika, bahasa Ibrani dan segala senda gurauanya selama mengajar. Terima kasih kepada Siti Rohmah, M.Hum atas ilmu filsafat, sejarah Eropa, dan keterampilan berbicara yang telah diajarkan kepada penulis. Terima kasih kepada Prof. Abdul Hadi W.M. dan Dr. Muhammad Zafar Iqbal (Alm), atas pelajaran Sastra Islam yang sangat membuka pikiran penulis terhadap keindahan karya-karya sastra Arab Islam. Terima kasih kepada Dr.

Maman Lesmana atas segala ilmu sastranya dan kemudahan yang diberikan selama beliau menjadi Koordinator. Terima kasih Dr. Muta'ali yang telah memberikan pelajaran yang menyenangkan dengan drama-drama Arab dan pengetahuan diplomatiknya. Terima kasih kepada Yon Machmudi, Ph.D., Ade Solihat, M.A., Letmiros, M.Hum, Aselih Asmawi, S.S., Dr. Basuni, M.A., Dr. Apipudin, Minal Aidin A. Rahiem, S.S., Dr. Fauzan Muslim, Aliudin Mahyudin, M.A. atas segala ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala kebajikan Anda semua.

Terima kasih yang mendalam dan tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, yaitu Mochammad Yusuf (Alm) dan Lieke M. Hasan. Terima kasih mama atas segala doa, kasih sayang, nasihat, dan segala pengorbanan yang mama berikan sekali pun anakmu ini sering membuat kesal hati mama. Terima kasih atas segala dukungan moral dan materi yang tak terhingga yang telah mama berikan. Terima kasih Aba yang selama hidupnya selalu membimbing anak-anaknya menuju kebenaran, yang dengan sabar menghadapi keluhan, tangisan, renekan anak-anaknya dan senantiasa membalasnya dengan senyuman. Terima kasih penulis ucapkan kepada kakak-kakak penulis, Fuad Hasan Syihab, Soraya Hasan Syihab, Lubna Hasan Syihab, Daniel Roy Malik Pronk, dan Antoni. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan baik secara moral dan materi. Terima kasih untuk segala waktu dan perhatian yang diberikan untuk mengurus adikmu ini (*eventhough you have been busy enough taking care of your families*). Terima kasih kepada kedua keponakan tercinta penulis, Nashira Yusuf Al-Grabg dan Iran Hagar Yusuf Al-Grabg atas segala canda tawanya (*mohon maaf...harus berbagi...*). Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya dalam segala aspek kehidupan kalian. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Ainul Hikmah, Febiana Malini, Mardi Pratama, Dita Yunita, Atifah, Khaidir, dan Irhamni Rahman. Terima kasih kepada Imma atas segala bantuan, dukungan, dan pertemanan yang tulus selama ini. Terima kasih Ajeng R. Rahmanillah atas bantuan, dukungan, dan pengarahannya. Terima kasih kepada teman-teman MPI (*you'd better kill yourself!*) yang lain, Hafidzoh S.R., Theta Karunia, Wiwin A.K. Fatimah Rommy S, Siti Muntaha, Rizky Mujahidah, Rizqi

Maulida, Sakti Ika dan teman-teman Sastra Arab lainnya. Terima kasih kepada teman-teman SMA, Reni, Lia, Lia DJ, atas segala dukungannya.

Terima kasih kepada seluruh petugas Perpustakaan FIB UI, Perpustakaan Pusat UI, dan Perpustakaan *Freedom Institute* yang dengan baik melayani kebutuhan penulis dalam mencari sumber. Terima kasih kepada berbagai pihak lain yang belum penulis sebutkan atas segala bantuannya. Hanya Allah yang dapat membalasnya.

Akhir kata, penulis memohon maaf karena skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan orang lain dalam sejarah Timur Tengah.

Jakarta, 2 Juli 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aniesah Hasan Syihab

NPM : 0606087580

Program Studi : Arab

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya

Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Imigrasi Yahudi ke Palestina (1882-1948)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal : 8 Juli 2010
Yang menyatakan

(Aniesah Hasan Syihab)

GLOSARIUM

Aliyah: Imigrasi Yahudi menuju Palestina.

Aliyah Bet: Imigrasi ilegal Yahudi ke Palestina yang berlangsung pada 1933-1948.

Anti-Semitisme: Suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk penganiayaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, individu, dan lembaga Yahudi.

Berihah (pelarian): Organisasi bawah tanah yang terdiri dari partisan dan para pejuang Ghetto Warsawa yang berusaha menyelundupkan orang-orang Yahudi dari Polandia dan Eropa Timur ke pelabuhan-pelabuhan Italia menuju Palestina.

Bilu: Organisasi digagas oleh para pelajar dan mahasiswa Yahudi di Rusia yang dipicu oleh Pogrom. Mereka merupakan pionir-pionir yang berimigrasi ke Palestina.

Biluim: para anggota Bilu.

Deklarasi Balfour: Surat yang menyatakan dukungan Inggris terhadap pendirian negara Yahudi di Palestina.

Diaspora: Penyebaran umat Yahudi ke seluruh dunia. Istilah ini sering dibedakan menjadi dua, yaitu diaspora dan great diaspora. Hal ini dikarenakan dalam sejarah umat Yahudi, mereka mengalami dua kali masa kehancuran dan pembuangan. Pertama pada saat kehancuran Kerajaan Yahuda (606 SM) dan Kerajaan Israel (721 SM) yang memunculkan diaspora. Kedua pada 70 M saat Jerusalem dihancurkan oleh Romawi, yang memunculkan istilah great diaspora. Namun pada masa kini umumnya pemakaian kata diaspora mengacu pada great diaspora tahun 70M.

FFI (Fighters for the Freedom of Israel): Organisasi pertahanan bawah tanah yang didirikan oleh Abraham Stern.

Final Solution: Sebuah program yang dikeluarkan oleh Nazi pada 20 Januari 1942 yang bertujuan membasmi seluruh Yahudi yang hidup di Eropa.

Ghetto: Area tertentu yang dibatasi dengan tembok dimana Yahudi diharuskan untuk tinggal.

Ha'apalah: Istilah yang sering digunakan kaum Yahudi untuk menyebut Aliyah Bet atau imigrasi ilegal ke Palestina.

Haganah: Organisasi pertahanan yang didirikan pada 1919 untuk menggantikan HaShomer.

Halutzim: Orang-orang yang tergabung dalam HeHalutz. HeHalutz merupakan suatu federasi yang digagas oleh gerakan pionir muda Yahudi. Kelompok HeHalutz pertama didirikan di Amerika pada 1915. Setelah PD I, gerakan ini mulai merambah ke Eropa Timur lalu menyebar ke wilayah Eropa lainnya. Pada tahun 1924, seluruh HeHalutz bersatu menjadi organisasi HeHalutz dunia. HeHalutz bertujuan membangun dan memperkuat komunitas Yahudi di Palestina guna terbentuknya Negara Israel.

HaMossad LeAliyah Bet: Organisasi yang didirikan oleh Haganah pada 1939 yang bertugas memfasilitasi para Yahudi Eropa untuk berimigrasi ke Palestina secara ilegal, khususnya setelah PD II.

HaPoel HaTzair: (Pekerja muda) sebuah organisasi pekerja Yahudi yang didirikan oleh A.D. Gordon pada 1904.

Hashomer: Organisasi pertahanan dan keamanan yang didirikan pada 1909 oleh para imigran Yahudi yang bertugas melindungi pemukim Yahudi Palestina dari para pencuri dan perampok.

Haskalah: Sebuah gerakan intelektual Yahudi yang berlangsung di Eropa sejak sekitar abad 17 sampai 18 yang berdasar pada rasionalitas. Tujuan utama gerakan ini ialah penyesuaian antara kehidupan Yahudi dengan dunia modern sebagai awal dari emansipasi politik dan sosial umat Yahudi.

Havlagah: Perlawanan yang dilancarkan oleh kaum Yahudi khususnya oleh organisasi-organisasi pertahanan seperti Haganah, terhadap kekerasan warga Arab dan Mandat Inggris.

Hibbat Zion: Gerakan Yahudi bercorak politik yang didirikan pada 1882 di Rusia karena ragu dengan keberhasilan Haskalah. Hibbat Zion bertujuan mewujudkan kebangkitan nasional bangsa Yahudi dan mendirikan negara di Palestina.

Histadrut: Organisasi yang didirikan pada 1920 yang berperan sebagai serikat pekerja Yahudi di Palestina.

Holocaust: Peristiwa pembantaian sekitar 6.000.000 Yahudi di Eropa oleh Nazi.

Irgun Zvai Leumi (Organisasi Militer Nasional): Organisasi yang didirikan pada 1937 oleh para anggota Betar dan Gerakan Revisionis Zionis (GRZ). Irgun mengadopsi ajaran-ajaran Vladimir Jabotinski (pendiri GRZ). Tujuan awal *Irgun* ialah pembalasan terhadap serangan-serangan Arab. Namun, semenjak *White Paper* diterbitkan, penguasa-penguasa Inggris menjadi target serangannya.

Jewish Agency: Badan perwakilan Organisasi Zionis Dunia yang didirikan untuk membantu dan mendorong pemukiman Yahudi di Palestina demi berdirinya Negara Israel.

Jewish Colonial Trust: Bank pertama milik Zionis pada 1899 yang juga bergerak dalam bidang saham. Bank ini juga membantu usaha kolonisasi Yahudi di Palestina.

Jewish National Fund: Lembaga yang didirikan oleh Organisasi Zionis Dunia pada 1901 yang bertugas mengumpulkan dana untuk pembelian tanah-tanah dan pembangunan pemukiman Yahudi di Palestina.

Knesset: Parlemen Israel.

Kelompok Beck: Kelompok yang dipimpin oleh Józef Beck, seorang anggota militer Polandia, yang memberlakukan metode dan ideologi Nazi dalam kehidupan politik Polandia.

Kevutzah: Kelompok pertanian kolektif dimana produksi dan pembelian bahan-bahan dan alat-alat pertanian dilakukan secara kolektif sedangkan pemakaiannya didasari oleh pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Kevutzim: Para anggota Kevutzah.

Kibbutz: Pertanian kolektif yang menjalankan kegiatan industri bersama dengan pertanian.

Kishinev Pogrom: Penyerangan terhadap kaum Yahudi di daerah Kishinev, Rusia, pada 1903 yang menyebabkan 47 Yahudi terbunuh.

Kristallnacht (Night of Broken Glass): Peristiwa pada malam 9-10 November 1938 dimana hampir seluruh sinagog di Jerman dihancurkan dan dibakar, rumah-rumah orang Yahudi dihancurkan, usaha dan toko Yahudi dirampas dan dibakar,

sekitar 30.000 Yahudi ditahan dan dibawa ke kamp konsentrasi, dan Nazi juga memaksa warga Yahudi membayar denda guna menutupi kerusakan aksi tersebut.

Law of Return: Peraturan yang diresmikan pada 5 Juli 1950 oleh Knesset yang menegaskan bahwa *Aliyah* adalah hak dari tiap-tiap Yahudi.

Maghribi Waqf: Yayasan yang mengelola Tembok Barat di Jerusalem.

Maskilim: Para penganut Haskalah.

Messiah: Sang Juru Selamat yang dipercayai umat Yahudi bahwa ia akan datang di Tanah Palestina untuk mendirikan Kerajaan Tuhan.

Moshav: desa pertanian yang mengkombinasikan mata pencaharian pribadi dengan produksi kolektif dimana para anggotanya memiliki rumah perseorangan dan ladang-ladang kecil. Namun, mereka bekerja sama dalam pembelian alat-alat pertanian dan penjualan produk.

Moshavim: Para anggota Moshav.

Nazi: Partai politik dari Jerman yang sejak 1933 dipimpin oleh Adolf Hitler. Partai ini menerapkan serangkaian peraturan yang menindas kaum Yahudi di Eropa, mereka juga bertanggung jawab terhadap tragedi Holocaust.

Nuremberg Laws: Peraturan yang dikeluarkan oleh Nazi yang menetapkan bahwa orang-orang Yahudi bukan merupakan warga negara Jerman lagi. Peraturan ini juga berisi peraturan-peraturan lain yang menindas kaum Yahudi di Jerman.

Olah: Seorang wanita Yahudi yang melakukan Aliyah.

Oleh: Seorang pria Yahudi yang melakukan Aliyah.

Olim: Orang-orang Yahudi yang berimigrasi ke Palestina/ melakukan Aliyah.

Organisasi Zionis Dunia: Organisasi Yahudi yang berideologi politik yang tujuan utamanya ialah mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina.

Pale of Settlement: Peraturan yang diterapkan saat Rusia diperintah oleh Catherine II (*Catherine the Great*) untuk membatasi lingkup hidup umat Yahudi di Rusia. Peraturan ini melarang kaum Yahudi untuk tinggal di wilayah pemukiman orang-orang Rusia.

Pogrom: Penindasan dan pembunuhan terhadap kaum Yahudi di Eropa Timur khususnya di Rusia.

Renaissans: Suatu periode pencerahan yang muncul di Eropa pada abad 16.

Shofar: Alat tiup yang digunakan dalam upacara keagamaan Yahudi.

Sinagog: Tempat peribadatan Yahudi.

SS (Schutzstaffel): Unit pertahanan yang awalnya merupakan pengawal pribadi Hitler. SS kemudian ditransformasi menjadi tentara Nazi Jerman bersamaan dengan SA (*Sturmabteilung*). SS turut andil dalam pembantaian Holocaust.

Tanah Yang Dijanjikan: Konsep yang menegaskan bahwa Palestina merupakan wilayah milik umat Yahudi karena Tuhan telah menjanjikannya terhadap keturunan Abraham. Konsep ini berdasar pada Perjanjian Lama Kitab Kejadian 12: 4, 5, 7.

Tembok Ratapan (Tembok Barat): Sebuah tembok di kawasan Jerusalem yang merupakan satu-satunya bagian yang tersisa dari Haikal Sulaiman yang dihancurkan oleh Romawi pada 70 M dan merupakan bangunan suci bagi umat Yahudi. Bagi umat Islam, tembok tersebut merupakan batas luar kawasan Haram Al-Sharif, kawasan suci tempat terdapatnya Masjid Umar (*The Dome of the Rock*), dan Masjid Al-Aqsa, masjid tersuci ketiga bagi umat Islam.

The Second Temple: Penyebutan *The Second Temple* mengacu kepada sejarah pengerusakan Haikal Sulaiman (*The First Temple*) pada saat Babylonia yang dipimpin Nebuchadnezzar menaklukan Jerusalem dan menghancurkan kota tersebut termasuk Haikal Sulaiman pada 586 SM. Hal itu mengakibatkan pembuangan umat Yahudi ke Babylonia. 50 tahun setelah itu, umat Yahudi di Babylonia mulai berdatangan kembali ke Zion, dan mereka mendirikan kembali Haikal Sulaiman (*The Second Temple*)

White Paper 1939: Peraturan yang dikeluarkan Inggris yang berisi pemberian izin kepada hanya 75.000 orang Yahudi untuk pindah ke Palestina dalam masa lima tahun, yaitu antara tahun 1939 sampai 1944. Sesudah tahun 1944 dilarang sama sekali pemindahan orang-orang Yahudi ke Palestina.

Yishuv: pemukiman Yahudi di Palestina

Youth Aliyah: Organisasi yang didirikan pada 1933 yang bertujuan mengorganisir penyelamatan anak-anak Yahudi dari Nazi dan Holocaust menuju Palestina.



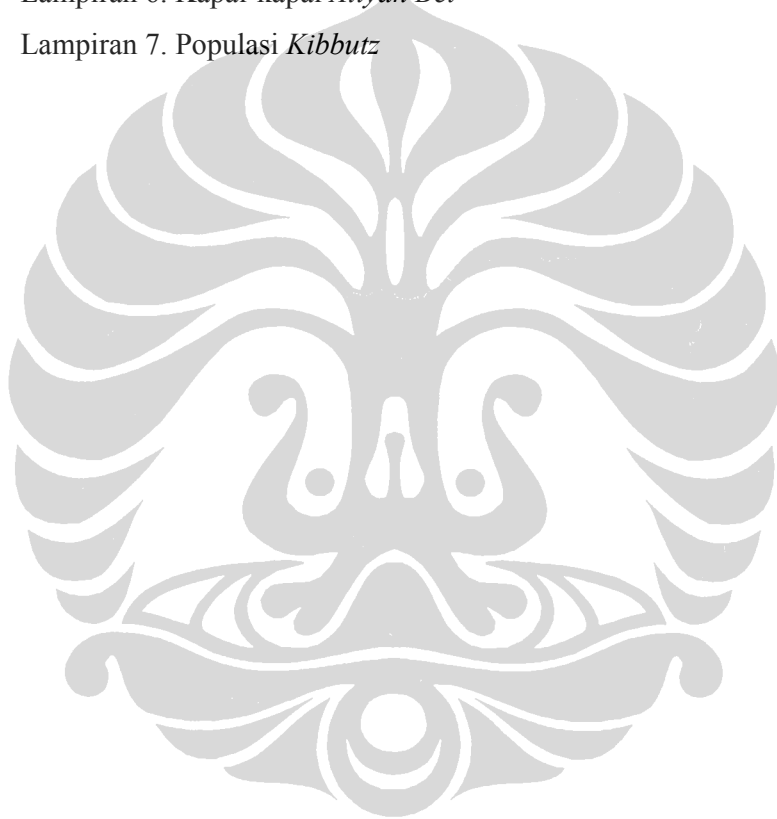
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
GLOSARIUM	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Landasan Teori.....	4
1.6.1 Teori Umum Perpindahan Penduduk.....	4
1.6.2 Teori Imigrasi Dalam Konteks Yahudi.....	6
1.6.3 Teori Zionisme	7
1.7 Tinjauan Pustaka	8
1.8 Metode Penelitian.....	9
1.9 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. ZIONISME SEBAGAI PEMICU MIGRASI YAHUDI KE PALESTINA	12
2.1 Sejarah Kemunculan Zionisme	12
2.1.1 Haskalah	14
2.1.2 Pergeseran Ideologi Zionisme	16
2.1.3 Pogrom	17
2.1.4 Hibbat Zion.....	18
2.1.5 Organisasi Zionis Dunia.....	20
2.2 Hubungan Zionisme dengan Migrasi ke Palestina.....	22
BAB III. GELOMBANG IMIGRASI YAHUDI KE PALESTINA (1882-1948)	27
3.1 Aliyah Pertama (1882-1903).....	28
3.1.1 Pendirian Pemukiman Pertanian.....	30
3.2 Aliyah Kedua (1904-1914)	31
3.3 Aliyah Ketiga	35
3.4 Aliyah Keempat	39
3.5 Aliyah Kelima.....	41

3.5.1 Kebangkitan Nazi Jerman	41
3.5.2 Imigrasi Skala Besar	44
3.6 Aliyah Bet	47
3.6.1 Holocaust	47
3.6.2 Munculnya Gelombang Imigrasi Ilegal ke Palestina	51
3.6.3 Tragedi Aliyah Bet	54
3.6.3.1 Patria	54
3.6.3.2 Struma	55
3.6.3.3 Exodus 1947	57
BAB IV. PENGARUH IMIGRASI YAHUDI DI PALESTINA	59
4.1 Konflik Penduduk Arab Palestina dengan Pendatang Yahudi	59
4.1.1 Konflik 1920-1921	60
4.1.2 Konflik Tembok Ratapan	63
4.1.3 Deir Yassin	65
4.2 Munculnya Komunitas Yahudi	67
4.3 Pendirian Negara Israel	68
BAB V. PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
GAMBAR	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kongres Zionis
- Lampiran 2. Mandat Palestina
- Lampiran 3. *The Nuremburg Laws*
- Lampiran 4. Tabel Imigrasi Legal dari Jerman dan Austria
- Lampiran 5. British White Paper of 1939
- Lampiran 6. Kapal-kapal *Aliyah Bet*
- Lampiran 7. Populasi *Kibbutz*



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Palestina dan Israel

Gambar 2. Bukit Zion

Gambar 3. Peta penyusutan wilayah Palestina

Gambar 4. Theodor Herzl

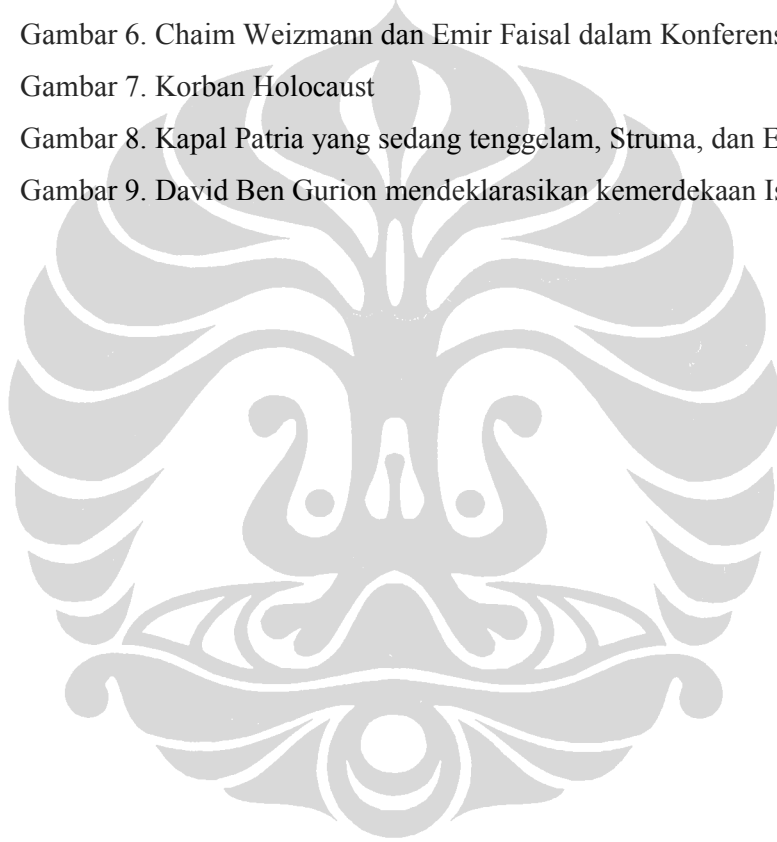
Gambar 5. Para Pemukim Rishon LeZion, Petah Tikvah, dan Ekron

Gambar 6. Chaim Weizmann dan Emir Faisal dalam Konferensi Perdamaian 1919

Gambar 7. Korban Holocaust

Gambar 8. Kapal Patria yang sedang tenggelam, Struma, dan Exodus 1947

Gambar 9. David Ben Gurion mendeklarasikan kemerdekaan Israel



ABSTRAK

Nama : Aniesah Hasan Syihab
Program Studi : Arab
Judul : Imigrasi Yahudi ke Palestina (1882-1948)

Skripsi ini membahas tentang imigrasi Yahudi ke Palestina sejak tahun 1882 hingga 1948. Landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis ialah teori perpindahan penduduk secara umum dan dalam konteks Yahudi, serta teori Zionisme. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berdasarkan pada metode sejarah, dan dengan jenis penelitian deskriptif. Sepanjang sejarahnya, umat Yahudi telah mengalami berbagai proses perpindahan, mulai dari diaspora hingga perpindahan kembali menuju Palestina yang dikenal dengan istilah *Aliyah*. *Aliyah* sangat berkaitan dengan konsep Zionisme. Sejak berdirinya Organisasi Zionis Dunia pada 1897, kolonisasi wilayah Palestina melalui *Aliyah* menjadi tujuan utama organisasi tersebut. Bertopeng pada aspek-aspek religius seperti klaim Tanah Yang Dijanjikan, Zionisme sukses menjalankan ideologi potitisnya. Sejak 1882, *Aliyah* mulai terjadi secara terstruktur. sebab-sebabnya antara lain ialah pogrom dan anti-Semitisme yang berkembang di Eropa Timur, serta munculnya kekuatan Nazi Jerman yang menjadikan anti-Semitisme sebagai peraturan. Melalui imigran-imigran yang tergabung dalam *Aliyah*, kaum Yahudi mampu menciptakan kekuatan-kekuatan yang menjadi fondasi berdirinya Negara Israel. Berbagai komunitas dan organisasi pun berhasil didirikan. Namun, konflik antara pendatang Yahudi dan pihak Arab setempat tidak dapat dihindari, seperti konflik yang terjadi pada 1920 dan 1921, konflik Tembok Ratapan, Deir Yassin, dan sebagainya. Walaupun terjadi berbagai konflik, pada 14 Mei 1948, kaum Yahudi Palestina, yang berasal dari para imigran *Aliyah* berhasil memproklamasikan pendirian Negara Israel.

Kata kunci:
Aliyah, Palestina, Yahudi

ABSTRACT

Name : Aniesah Hasan Syihab
Major : Arabic
Title : The Jewish Immigration to Palestine (1882-1948)

This thesis discusses about Jewish immigration to Palestine since 1882 until 1948. Theoretical basis which is used as an analysis tool is the theory of population movement in general and in the Jewish context, and the theory of Zionism. This research is qualitative based on historical method, and the type of descriptive research. Throughout history, Jews have experienced a variety of migration processes, ranging from the diaspora to return to the Palestinian movement known as *Aliyah*. *Aliyah* is closely associated with the concept of Zionism. Since the establishment of the World Zionist Organization in 1897, the colonization of Palestinian territories through *Aliyah* became the main purpose of the organization. Masked in religious aspects, such as the claim of The Promised Land, Zionism successfully ran its politic ideology. Since 1882, *Aliyah* began to occur in a structured way. Its causes, among others is a pogrom and anti-Semitism that developed in Eastern Europe and the emerging power of Nazi Germany which made anti-Semitism as a rule. Through the immigrants who are members of *Aliyah*, the Jews were able to create the forces that became the foundation of the establishment of the State of Israel. Various communities and organizations were successfully established. However, the conflict between Jewish settlers and the local Arab side could not be avoided, such as the conflicts that occurred in 1920 and 1921, The Wailing Wall conflict, Deir Yassin, and others. Despite the various conflicts, on May 14, 1948, Palestinian Jews, who came from successful *Aliyah* immigrants proclaimed the establishment of the State of Israel.

Keywords:
Aliyah, Jews, Palestine

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Israel adalah sebuah negara Yahudi yang berada di kawasan Timur Tengah. Namun demikian, masih banyak pihak yang tidak mengakui eksistensi Israel sebagai sebuah negara. Berdirinya Israel di wilayah Palestina tidak dicetuskan oleh suatu perjuangan antikolonial oleh rakyat untuk membela tanah airnya dan berperang melawan penjajah asing. Sebaliknya, kemerdekaan Israel diperoleh dan diproklamasikan oleh komunitas pendatang. Usaha itu diawali dengan pengusiran etnis yang telah menempati Palestina¹, padahal sudah lebih dari 14 abad Palestina telah menjadi tanah air bagi orang Arab Muslim, yaitu sejak Palestina ditaklukkan dari kekuasaan bangsa Romawi oleh Khalifah Umar bin Khattab pada 637 M². Kontradiksi inilah yang hingga saat ini memicu perselisihan antara Israel, suatu bangsa yang hidup dengan kebudayaan dan pemikiran Yahudi dan Barat di tengah-tengah bangsa Arab yang memiliki budaya yang sangat berbeda, dengan negara-negara Arab, khususnya Palestina.

Bangsa Israel berasal dari keturunan Nabi Ibrahim (Abraham) yang lahir 40 abad yang lalu di kota Ur, Tanah Khaldea. Ia berasal dari klan nomaden di Jazirah Arab³. Ia dikaruniai dua putra yaitu Ismail dan Ishak. Ishak mempunyai dua anak, yaitu Isu dan Yakub. Yakub memiliki 12 orang anak dari keempat istrinya. Dari 12 putranya inilah kemudian keturunannya berkembang⁴ menjadi Bani Israel dan akan membentuk karakteristik sebuah bangsa (*nation*) yang diakui oleh bangsa-bangsa lainnya di kemudian hari, dan memiliki ‘Tanah Yang

¹ Hermawati, *Sejarah Agama & Bangsa Yahudi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.

2.

² M. Nur El-Ibrahimi, *Tragedia Palestina*, (Bandung: N. V. Al Ma'arif, 1954), hlm. 5.

Selanjutnya, penulisan tahun Masehi tidak menggunakan keterangan singkatan Masehi (M), sedangkan untuk tahun Sebelum Masehi akan dicantumkan singkatan Sebelum Masehi (SM)

³ Rufus Lears, *Israel: A History of the Jewish People*, (Ohio: Meridian Books, 1966), hlm. 3.

⁴ Kafrawi Ridwan, dkk., ed. “Bani Israil”, *Ensiklopedi Islam*, (2001), II, hlm. 271.

Dijanjikan', yaitu tanah Kanaan, seperti klaim mereka bahwa Kanaan adalah tanah warisan untuk anak cucu Ibrahim yang diklaim sebagai hak milik mereka⁵.

Pada tahun 70, saat bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi, mereka memberontak tetapi pemberontakan itu dapat dikuasai oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Titus, dan bangsa Yahudi dihancurkan dan menjadi tertindas⁶. Kota Jerusalem dan Haikal Sulaiman dihancurkan. Sejak saat itulah bangsa Yahudi kehilangan tempat tinggal dan mereka pun harus pergi meninggalkan Palestina dan bercerai berai menuju ke berbagai penjuru dunia. Hermawati menyebut fase ini sebagai "*Great Diaspora*"⁷.

Jika diaspora adalah penyebaran bangsa Yahudi ke berbagai penjuru dunia yang kemudian membentuk masyarakat atau komunitas Yahudi yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya, maka terdapat pula *Aliyah*, suatu fase dimana bangsa Yahudi yang berpencar ini berusaha untuk bersatu kembali dalam suatu negara, yaitu Israel. Gerakan Zionis digagas oleh Theodor Herzl yang tujuan utamanya ialah mendirikan suatu Negara Yahudi di Tanah Palestina memicu semangat umat Yahudi yang telah mengalami diaspora untuk kembali menuju 'Tanah Yang Dijanjikan'⁸.

Imigrasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan suatu keadaan hidup yang lebih baik. Para imigran meninggalkan daerah asal mereka yang tidak menunjang hidup, baik dalam aspek finansial, kebebasan, sosial, politik, menuju daerah lain yang menurut mereka mampu menyuguhkan keamanan aspek-aspek tersebut. Dalam hal ini, para imigran Yahudi terdesak untuk melakukan imigrasi menuju Palestina karena penindasan yang mereka dapatkan di daerah asalnya.

Aliyah kian mendapat angin setelah Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, mengirim surat kepada Lord Rothschild, salah seorang tokoh Zionis. Surat itu berisi pemberitahuan dukungan Pemerintah Inggris kepada

⁵ Hermawati, *op. cit.*, hlm. 32.

⁶ *Ibid.*, hlm. 63-64.

⁷ Istilah diaspora (penyebaran) sering dibedakan menjadi dua, yaitu *diaspora* dan *great diaspora*. Hal ini dikarenakan dalam sejarah umat Yahudi, mereka mengalami dua kali masa kehancuran dan pembuangan. Pertama pada saat kehancuran Kerajaan Yahuda (606 SM) dan Kerajaan Israel (721 SM) yang memunculkan *diaspora*. Kedua pada 70 M saat Jerusalem dihancurkan oleh Romawi, yang memunculkan istilah *great diaspora*. Namun pada masa kini umumnya pemakaian kata *diaspora* mengacu pada *great diaspora* tahun 70M, *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

gerakan Zionis untuk mendirikan negara di Palestina. Surat yang dikirim pada 2 November 1917 itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour⁹.

Gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina (*Aliyah*) secara tidak langsung merupakan cikal bakal berdirinya suatu negara Yahudi. Kaum Yahudi yang datang ke Palestina mulai mendirikan pemukiman Yahudi di daerah tertentu. Lama kelamaan pemukiman Yahudi itu pun menjadi tetap dan meluas. Pertambahan jumlah penduduk Yahudi di Palestina kian hari kian bertambah memungkinkan terpenuhinya syarat berdirinya suatu negara. Pertambahan penduduk itu pula yang semakin memicu bangkitnya semangat nasionalisme kaum Yahudi demi terbentuknya Negara Israel.

Aliyah dan Kemerdekaan Israel di Tanah Palestina merupakan dua hal yang berkesinambungan. Kedua hal itu tidak terlepas dari suatu konsep awal yang memicu perpindahan penduduk menuju Palestina, yaitu konsep Zionisme. Zionisme merupakan suatu gerakan yang menjadi tulang punggung kekuatan bangsa Yahudi. Berkat usaha Theodor Herzl, pada tahun 1897 diadakan Kongres Zionisme Pertama yang melahirkan Program Basle yang memiliki tujuan utama yaitu untuk mendirikan suatu Negara Yahudi di Palestina.

Peneliti tertarik untuk mendalami masalah ini karena Zionisme dan *Aliyah* merupakan bibit dari konflik panjang Arab-Israel yang berlangsung hingga kini. Selain itu, tidak banyak terdapat sumber pustaka dalam negeri yang membahas masalah *Aliyah*, dan dengan penelitian ini, peneliti berharap untuk bisa menyediakan sumber ilmiah bagi orang-orang yang tertarik dengan masalah ini

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan peneliti paparkan ialah :

1. Bagaimana Imigrasi Yahudi ke Palestina (*Aliyah*) terjadi dan apa yang menjadi latar belakang hal tersebut?
2. Pengaruh apa saja yang ditimbulkan *Aliyah*?

⁹ Riza Sihbudi dkk., *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 105.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang bangsa Yahudi melakukan imigrasi menuju Palestina baik yang mencakup latar belakang historis, politik, dan agama. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran dan pengaruh apa saja yang ditimbulkan *Aliyah*.

1.4 Batasan Masalah

Imigrasi Yahudi ke Palestina terdiri dari beberapa gelombang yang dimulai sejak 1882 hingga tahun 2000-an. Dalam penelitian ini, *Aliyah* akan dibatasi sejak 1882 hingga 1948, yaitu saat Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Penelitian ini mencakup batasan seputar konsep Zionisme yang berlanjut kepada *Aliyah*, hingga terbentuknya Negara Israel pada 1948.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu pembahasan ilmiah tentang salah satu peristiwa sejarah yang terjadi di kawasan Timur Tengah, yang dalam hal ini ialah di Palestina. Penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan mengenai sejarah Timur Tengah, khususnya dalam masalah Palestina dan Israel, sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam masalah Timur Tengah.

1.6 Landasan Teori

Terdapat tiga teori yang digunakan dalam skripsi ini. Pertama ialah teori perpindahan penduduk secara umum. Kedua ialah teori perpindahan penduduk dalam konteks Yahudi, dan ketiga ialah teori Zionisme.

1.6.1 Teori Umum Perpindahan Penduduk

Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain biasa dikenal dengan istilah migrasi. Migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, di samping kelahiran dan kematian. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas

administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Sedangkan orang yang melakukan migrasi disebut migran¹⁰.

Dalam arti luas migrasi adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa, serta tidak diadakan perbedaan antara migrasi dalam negeri atau migrasi ke luar negeri¹¹.

Rozy Munir dalam *Dasar-Dasar Demografi* menyatakan enam faktor pendorong migrasi, yaitu :

- (1) Makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian.
- (2) Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal.
- (3) Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal.
- (4) Tidak cocok lagi dengan adat/budaya/kepercayaan di tempat asal.
- (5) Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi.
- (6) Bencana alam baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang, atau adanya wabah penyakit¹².

Dalam kasus migrasi Yahudi ke Palestina, faktor pendorong terutama terdapat pada poin ketiga dan keempat yang juga berimbas pada poin kedua. Umat Yahudi di negara asalnya merasa terancam dengan merebaknya anti-semitisme dan *yudeophobia*. Lalu mereka pun menjadi terkucil dan tertindas. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan lapangan pekerjaan atau penghasilan di tempat asalnya.

Suko Bandiono, yang dikutip oleh M. Arif Nasution dalam *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara* menyatakan bahwa proses migrasi terjadi sebagai jawaban terhadap adanya sejumlah perbedaan antartempat yang mencakup faktor

¹⁰ Lembaga Demografi FEUI, *Dasar-Dasar Demografi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1981), hlm. 113-114.

¹¹ M. Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), hlm. 109.

¹² Lembaga Demografi FEUI, *op. cit.*, hlm. 118.

ekonomi, sosial, dan lingkungan baik pada tataran individu maupun masyarakat¹³. Migran biasanya memiliki alasan-alasan tertentu yang menyebabkan mereka meninggalkan kampung halamannya dan memilih untuk pindah ke tempat lain yang mereka anggap dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi jika mereka tetap bertahan di tempat asal¹⁴.

Terdapat beberapa jenis migrasi. Salah satu jenis migrasi tersebut adalah Migrasi Internasional (*International Migration*). Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi yang merupakan masuknya penduduk ke suatu negara disebut Imigrasi. Sedangkan, migrasi yang merupakan keluarnya penduduk dari suatu negara disebut Emigrasi¹⁵. Dalam hal ini, perpindahan penduduk Yahudi ke Palestina bisa disebut sebagai suatu proses imigrasi karena mereka melakukan proses memasuki suatu negara yaitu Palestina. Migrasi internasional tidak begitu berpengaruh dalam menambah atau mengurangi jumlah penduduk suatu negara, kecuali di beberapa negara tertentu yang berkenaan dengan pengungsian, akibat dari bencana, baik alam maupun perang¹⁶.

1.6.2 Teori Imigrasi Dalam Konteks Yahudi

Penduduk Yahudi negara Israel mayoritas merupakan imigran yang datang dari berbagai penjuru dunia, terutama Eropa, menuju Palestina. Istilah ‘negara pengungsi’ sering ditempelkan pada Israel karena hal tersebut. Sebab itu, jika kita menilik masalah migrasi kaum Yahudi ke Palestina, kita akan mendapatkan suatu konteks tersendiri. Imigrasi dalam konteks Yahudi disebut dengan *Aliyah*.

Abba Eban, dalam bukunya *My People: History of the Jews* menyatakan bahwa:

“*Aliyah* (עלייה) is a Hebrew word which means “going up”. And it is the word for “going up” from the diaspora to the Holy Land. It is the immigration to the land of Israel”¹⁷

¹³ Nasution, *op. cit.*, hlm. 109.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

¹⁵ Lembaga Demografi FEUI, *op. cit.*, hlm. 116.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

¹⁷ Pemakaian nama *Aliyah* yang artinya “menuju ke atas” ialah karena Israel merupakan Tanah Suci bagi umat Yahudi. Abba Eban, *My People: History of the Jews Volume II*, (New Jersey: Berman House Inc. Publishers, 1979), hlm. 127.

“*Aliyah* adalah sebuah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti “pergi ke atas”. Kata ini mengacu kepada “pergi keatas” dari diaspora menuju Tanah Suci. *Aliyah* merupakan imigrasi ke Israel”

Seorang Yahudi laki-laki yang melakukan *Aliyah* disebut *oleh*, sedangkan untuk perempuan disebut *olah*, bentuk pluralnya ialah *olim*. Banyak umat Yahudi yang menganggap *Aliyah* sebagai kepulangan ke ‘Tanah Yang Dijanjikan’ (*The Promised Land*), yang telah dijanjikan Tuhan pada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub¹⁸.

1.6.3 Teori Zionisme

Zionisme berasal dari kata “*Zion*” yang pada masa awal sejarah Yahudi disinonimkan dengan penyebutan kota Jerusalem¹⁹. Pada awalnya, Zionisme hanya merupakan gerakan keagamaan yang menginginkan sebuah pusat keagamaan. Mereka tidak menghendaki sebuah negara tersendiri. Mereka percaya akan datangnya Sang Juru Selamat (*Messiah*) pada akhir zaman dan pada saat itu seluruh umat Yahudi akan dipanggil ke ‘Tanah Yang Dijanjikan’.

Pada akhir abad 19, Zionisme dirumuskan menjadi tiga jenis yaitu:

- (1) Zionisme Praktis, yang meneruskan tradisi *Hoveve Zion* sambil menekankan bahwa pertanian kolektif Yahudi di Palestina akan mempunyai dampak emansipasi terhadap masyarakat Yahudi dunia.
- (2) Zionisme Politik, bercita-cita mendirikan suatu negara Yahudi yang secara politik merdeka dan berdaulat walaupun tempat negara ini tidak harus di Palestina.
- (3) Zionisme Kultural, memiliki persamaan orientasi sekuler dengan Zionisme Praktis dan Politik. Namun dalam pandangan ini, proyek Palestina bukan merupakan sebuah gagasan politik dan ekonomi semata, melainkan sebagai pusat untuk mengembangkan budaya Yahudi. Mereka mengedepankan pendekatan metafisik terhadap gagasan-gagasan Zionis.²⁰

¹⁸ Minal Aidin A. Rahiem, “Masuknya Orang-orang Yahudi ke Israel”, *Jurnal Arabia*, IX (Oktober 2006-Maret 2007), hlm. 57.

¹⁹ Jacob Katz dkk., *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme*, Terj. Joko Susilo, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 19.

²⁰ Minal Aidin A. Rahiem, “Tiga Macam Zionisme”, *Teori Zionisme Dalam Masalah Palestina: Sebuah Tinjauan Historis*, (1996), hlm. 6-8.

Ketiga konsep tersebut disatukan oleh Theodor Herzl menjadi suatu gerakan Zionis yang tujuan utamanya ialah mendirikan suatu negara Yahudi di Palestina yang diakui secara politik dan memiliki kedaulatan. Herzl menekankan bahwa kaum Yahudi harus secara politis terpisah dari kaum *Gentile* (non-Yahudi)²¹. Kongres Zionis pertama yang diadakan di Basle pada 29-31 Agustus 1897 melahirkan dua nilai penting yaitu pembentukan Organisasi Zionis dan Program Basle. Dalam kongres ini diperdebatkan tentang Zionisme secara politis yang merupakan masalah mendasar. Herzl menegaskan bahwa masalah Yahudi hanya bisa dipecahkan dengan imigrasi dan pemukiman dalam skala besar di *Eretz Yisrael*, yang hanya bisa efektif dengan adanya bantuan internasional²². Tujuan Zionisme ini dirumuskan dalam empat butir Program Basle :

- (1) Mempromosikan kolonisasi pekerja Yahudi ke Palestina.
- (2) Mengorganisasi dan menyatukan orang-orang Yahudi melalui lembaga lokal maupun internasional.
- (3) Memperkokoh sentimen dan kesadaran nasionalitas Yahudi.
- (4) Mempersiapkan langkah ke arah terbentuknya pemerintahan.²³

1.7 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data pustaka sebagai sumber rujukan, yaitu buku *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi* yang ditulis oleh Hermawati dan diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo pada 2005 di Jakarta. Dalam buku ini, Hermawati memaparkan tentang asal usul bangsa Yahudi yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim AS dan keturunan-keturunannya yang merupakan cikal bakal adanya Bani Israel. Dalam buku ini juga dipaparkan sejarah Zionisme hingga berdirinya negara Israel, dimana paham ini merupakan pemicu terjadinya imigrasi Yahudi dari segala penjuru dunia menuju Palestina.

Peneliti juga meninjau sebuah buku berjudul *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme* karya Jacob Katz yang diterbitkan tahun 1997. Dalam

²¹ Lihat: Mohammad Al'Asi, "Freedom for Palestine" (*Hand Out*) dalam Konferensi Internasional "Freedom and Right of Return" 14-15 Mei 2008 di Wisama Makara Universitas Indonesia, Depok.

²² Katz, *op. cit.*, hlm. 324.

²³ Ade Armando dkk., "Bani Israil", *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*, (2001), III, hlm.,. 47.

buku ini, Katz memaparkan tentang perjalanan sejarah Zionisme mulai dari yang bersifat religius hingga Zionisme politik yang digagas oleh Theodor Herzl yang meletakkan fondasi institusional Zionisme pada 1897. Hal tersebut memungkinkan terjadinya perpindahan penduduk Yahudi di dunia menuju suatu tempat, yang dalam hal ini ialah Palestina, lalu mendirikan suatu negara Yahudi Israel.

Selain itu, terdapat pula buku *The Jews : Their History, Culture, and Religion* oleh Louis Finkenstein yang terdiri dari dua jilid. Buku ini menyediakan table-tabel perpindahan penduduk Yahudi yang akan dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini. Seperti buku yang membahas bangsa Yahudi lainnya, buku ini juga menyediakan sejarah panjang bangsa Yahudi dari Zaman Prasejarah hingga pasca kemerdekaan Israel.

Untuk mengetahui istilah-istilah yang berhubungan dengan perjalanan Bangsa Yahudi, peneliti merujuk kepada sebuah ensiklopedia yang disusun oleh Cecil Roth yang berjudul *The Standard Jewish Encyclopedia*. Ensiklopedi ini diterbitkan oleh Madassah Publishing Company Ltd. pada 1958 di Jerusalem. Dalam ensiklopedi ini, terdapat penjelasan tentang *Aliyah*, Zionisme dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk mengetahui definisi suatu istilah yang berhubungan dengan Yahudi.

Selain buku-buku di atas, peneliti juga akan menggunakan referensi-referensi lain berupa ensiklopedi-ensiklopedi lain, jurnal ilmiah, kitab suci, data-data internet dari sumber yang terpercaya serta dari situs pemerintah Israel dan Palestina.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah atau yang lazim disebut metode historis. Pemilihan metode historis ini sangat sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau²⁴. Dalam penelitian ini data-data dan sumber-sumber yang akan digunakan berasal dari studi pustaka, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, ensiklopedi, surat kabar, serta kitab suci.

²⁴ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hlm. 63.

Metode historis berdasar pada empat langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan berbagai sumber dan data yang berasal dari buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah tahap itu, peneliti melakukan verifikasi atau kritik sumber. Data dan sumber yang telah dikumpulkan diuji keabsahan dan kredibilitasnya, lalu diseleksi. Proses penyeleksian ini bertujuan untuk menetapkan mana saja data yang perlu digunakan sebagai sumber penelitian dan mana saja yang sekiranya tidak layak dan tidak akan digunakan sebagai sumber penelitian. Tahap berikutnya yaitu interpretasi yang merupakan tahap dimana peneliti menganalisis data-data valid yang telah terkumpul. Dudung Abdurahman dalam bukunya *Metode Penelitian Sejarah* mengutip perkataan Kuntowijoyo yang menyatakan terdapat dua metode yang digunakan dalam penelitian historis, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sedangkan sintesis berarti menyatukan. Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi yaitu cara penulisan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Tahap ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan penelitian sejarah yang dilakukan²⁵.

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini mengambil sumber dari beberapa perpustakaan di berbagai tempat yang menyediakan sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber-sumber tersebut diantaranya diambil dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan *Freedom-Istitute*, serta berbagai tempat lainnya yang menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan imigrasi Yahudi ke Palestina.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, landasan teori yang terbagi menjadi teori umum perpindahan penduduk, teori imigrasi dalam konteks Yahudi dan teori Zionisme, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 63-76.

Bab kedua berisi tentang Zionisme sebagai pemicu migrasi Yahudi ke Palestina. Dalam bab kedua ini terdapat dua sub bab yaitu sejarah kemunculan Zionisme, yang terdiri dari sub *Haskalah*, pergeseran ideologi Zionisme, *Pogrom*, *Hibbat*, *Zion*, Organisasi Zionis Dunia dan sub bab hubungan Zionisme dengan imigrasi Yahudi ke Palestina.

Bab ketiga berisi tentang gelombang migrasi Yahudi ke Palestina. Dalam bab ini terdapat enam sub bab yaitu *Aliyah* Pertama dengan sub pendirian pemukiman pertanian, *Aliyah* Kedua, *Aliyah* Ketiga, *Aliyah* Keempat, *Aliyah* Kelima dengan sub kebangkitan Nazi Jerman dan imigrasi skala besar dan yang sub bab terakhir ialah *Aliyah Bet* yang terdiri dari sub Holocaust, munculnya gelombang imigrasi ilegal ke Palestina, dan tragedi *Aliyah Bet* yang terdiri dari sub *Patria*, *Struma*, dan Exodus 1947.

Pada bab keempat dijelaskan tentang pengaruh imigrasi Yahudi di Palestina. Pada bab ini terdapat tiga sub bahasan. Pertama mengenai konflik penduduk Arab Palestina dengan pendatang Yahudi yang terdiri dari sub konflik 1920-1921, konflik Tembok Ratapan, dan tragedi Deir Yassin. Kedua tentang munculnya komunitas Yahudi. dan sub bahasan terakhir yaitu mengenai berdirinya negara Israel.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir merupakan sebuah bab penutup. Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran. Setelah itu, terdapat daftar pustaka, lampiran, dan gambar.

BAB II

ZIONISME SEBAGAI PEMICU IMIGRASI YAHUDI KE PALESTINA

Jerusalem merupakan sebuah kota bersejarah bagi tiga agama Semit di dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi umat Yahudi Jerusalem (dan Tanah Palestina) merupakan daerah yang dijanjikan Tuhan –dalam Perjanjian Lama– bagi umat Yahudi. Bagi umat Nasrani, Jerusalem merupakan tempat bersejarah kelahiran Yesus Kristus, sedangkan bagi umat Islam kota itu merupakan tempat dimana masjid tersuci ketiga terletak, Masjid Al-Aqsa.

Kata *Zion* atau *Sion* pada masa awal sejarah Yahudi merupakan sinonim dari perkataan Jerusalem. Arti dari istilah ini adalah bukit, yaitu bukit suci yang diceritakan dalam perjanjian lama, yaitu salah satu bukit yang terletak di sebelah Timur dari dua buah bukit dalam wilayah Jerusalem lama²⁶. Saat itu kota Jerusalem merupakan ibukota Kerajaan Israel pada masa kekuasaan Raja Daud²⁷. Istilah Zionisme diambil dari kata Zion yang telah diterangkan di atas.

Seiring dengan berjalannya waktu, Zionisme mengalami serangkaian perubahan mulai dari Zionisme dengan ideologi religius hingga Zionisme Politik. Melalui ideologi Zionisme Politik, imigrasi Yahudi ke Palestina dapat terwujud. Dibantu dengan konsep Zionisme religius, Zionisme Politik sukses menggagas Palestina sebagai tujuan imigrasi kaum Yahudi yang diaspora. Aliyah kian berkembang seiring dengan usaha-usaha diplomatik yang dilakukan Zionis, seperti dikeluarkannya Deklarasi Balfour sebagai dukungan Inggris terhadap pendirian tanah air Yahudi di Palestina.

2.1 Sejarah Kemunculan Zionisme

Bangsa Yahudi memiliki sejarah yang panjang dalam hal migrasi atau perpindahan penduduk. Pada 1600-1500 SM Nabi Ibrahim memimpin bangsa Yahudi untuk bermigrasi dari Irak ke Palestina, lalu ke Mesir. Setelah itu, akibat

²⁶ Lihat: Gambar 2.

²⁷ Hermawati, *op. cit.*, hlm. 84-85.

penindasan Fir'aun mereka berpindah kembali ke Palestina di bawah pimpinan Musa²⁸. Orang-orang Yahudi juga telah berkali-kali mengalami penindasan sepanjang sejarah terdahulu. Pada 721 SM, Kerajaan Israel dihancurkan oleh Raja Sargon II dari Assiria yang saat itu menguasai mereka. Kemudian pada 606 SM, Kerajaan Babilonia menyerang Kerajaan Yahuda hingga hancur²⁹. Tahun 586 SM orang-orang Yahudi ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dan dibawa ke Babilonia sebagai tawanan perang, dan pada 63 SM, daerah Palestina diserbu oleh Raja Pompei dari Romawi dan banyak menimbulkan kehancuran, dan puncaknya pada tahun 70 saat bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi, mereka mengadakan pemberontakan yang akhirnya gagal dan menimbulkan kehancuran bagi umat Yahudi sendiri³⁰. Haikal Sulaiman yang merupakan pusat keagamaan Yahudi di Jerusalem dihancurkan. Kondisi tersebut menyebabkan bangsa Yahudi terbuang dan berpencar-pencar menuju seluruh penjuru dunia (*Great Diaspora*).

Bangsa Yahudi yang terpencar itu menetap di negara-negara di berbagai penjuru dunia. Mayoritas dari mereka menetap di negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Jerman, Rusia, dan berbagai negara lainnya. Untuk dapat diterima di lingkungan barunya mereka berusaha melakukan partisipasi dalam kehidupan sosial dan kultural Barat, sambil tetap memelihara identitas Yahudi mereka. Mereka senantiasa mendasarkan diri pada usaha-usaha integrasi sosial dengan masyarakat Eropa.

Hingga Zaman Renaisans orang-orang Yahudi di Eropa tidak menampakkan kegiatan-kegiatan politik. Tanah Palestina seringkali disebut dan diingat sebagai rujukan dalam artian agama, bukan politik. Sementara itu, berbagai tradisi Yahudi tetap dipelihara tanpa banyak menimbulkan konflik dengan negara-negara tempat mereka tinggal. Pada Zaman Renaisans itu pula belum terlihat adanya program “kembali” ke Palestina dari kalangan masyarakat Yahudi di Eropa³¹.

Bangsa Yahudi di seluruh Eropa yang mengalami diaspora senantiasa mengalami dan merasakan dinamika sosial, politik dan budaya yang terjadi di

²⁸ Rahiem (1996), *loc. cit.*, hlm. 11.

²⁹ Hermawati, *op. cit.*, hlm. 55-58.

³⁰ Rahiem (1996), *loc. cit.*, hlm. 11-12.

³¹ *Ibid.*, hlm. 13.

negara-negara Eropa. Mereka turut merasakan perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari gerakan pencerahan yang terjadi di Eropa, mulai dari Renaisans, Aufklarung, Revolusi Perancis, dan Revolusi Industri. Mereka melihat perkembangan yang terjadi di Eropa melalui gerakan pembaruan yang mengusung gagasan nasionalisme. Kemajuan yang pesat pun terjadi dalam bidang pendidikan, industri, politik, sains, dan dalam bidang lainnya di Eropa. Bukan hanya itu, mereka pun menyerap ide-ide pembaruan yang muncul saat itu. Hal ini sedikit banyak menimbulkan perubahan pola pikir di kalangan umat Yahudi yang akhirnya memicu timbulnya suatu gerakan pencerahan yang dinamakan *Haskalah*.

2.1.1 *Haskalah*

Sejak diaspora, sebagian besar umat Yahudi tinggal di Eropa Timur, khususnya di Rusia. Sayangnya, pemerintah Rusia selalu cenderung anti-Yahudi. Saat Rusia diperintah oleh Catherine II (*Catherine the Great*), ia membatasi lingkup hidup umat Yahudi lewat peraturan '*Pale of Settlement*³²'. Setelah itu, Kaisar Alexander I memaksa warga Yahudi untuk pindah dari desa-desa asalnya menuju kota-kota dan koloni pertanian dimana mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, Kaisar Nicholas I membuat lebih dari 600 Undang-Undang anti-Yahudi, termasuk memaksa anak-anak Yahudi untuk mengikuti wajib militer hingga waktu tak terbatas³³.

Setelah Rusia berada di bawah pimpinan Alexander II, kepedihan umat Yahudi Rusia mulai berkurang. Sistem wajib militer diubah, pembatasan lingkup warga Yahudi dihapuskan, warga Yahudi berpendidikan diizinkan untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan, dan karena itu kesempatan-kesempatan baru terbuka untuk warga Yahudi³⁴. Kalangan kelas atas intelektual Yahudi melihat adanya kesempatan untuk membawa pemikiran Barat (termasuk emansipasi) ke Rusia dimana kaum Yahudi berpartisipasi di dalamnya. Kemudian, muncullah gerakan *Haskalah*³⁵.

³² *Pale of Settlement* ialah peraturan yang dibuat oleh Catherine II sejak kawasan sebagian Polandia diduduki oleh Rusia. Peraturan ini melarang kaum Yahudi untuk tinggal di wilayah pemukiman orang-orang Rusia. Mereka diharuskan untuk tinggal di kawasan tertentu yang dikhususkan bagi kaum Yahudi. Lihat: Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 100-101.

³³ *Ibid.*, hlm. 106.

³⁴ Louis Finkelstein, *The Jews: Their History, Culture, and Religion*, (London: Peter Owen Limited, 1961), hlm. 341.

³⁵ Eban (1979), *op. cit.*, 104

Haskalah yang dalam bahasa Ibrani berarti pencerahan, intelek, pendidikan³⁶, adalah sebuah gerakan intelektual Yahudi yang berlangsung di Eropa sejak sekitar abad 17 sampai 18 yang berdasar pada rasionalitas³⁷. Tujuan utama gerakan ini ialah penyesuaian antara kehidupan Yahudi dengan dunia modern sebagai awal dari emansipasi politik dan sosial umat Yahudi³⁸. *Haskalah* mendorong orang Yahudi untuk mempelajari mata pelajaran sekuler (yang sebelumnya tidak dipelajari), bahasa-bahasa Eropa dan Ibrani, dan untuk memasuki berbagai bidang seperti pertanian, kerajinan, seni, dan sains. *Maskilim* (penganut *Haskalah*) mencoba berasimilasi ke dalam masyarakat Eropa dalam berbagai aspek, mulai dari cara berpakaian, bahasa, sopan santun, dan loyalitas terhadap penguasa³⁹.

Moses Mendelssohn, seorang Yahudi Jerman, merupakan tokoh penting yang memelopori reformasi Yudaisme. Ia yakin bahwa agama Yahudi merupakan agama yang rasional dan dapat dijelaskan dengan akal⁴⁰. Mendelssohn menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Jerman dan menyertainya dengan tafsiran dengan gaya pemikiran modern yang bertujuan untuk mendorong umat Yahudi supaya berpartisipasi terhadap perkembangan kebudayaan dunia pada umumnya. Ia yakin jika umat Yahudi berpartisipasi dalam dunia modern, maka mereka akan semakin diterima oleh masyarakat *Gentile* (non-Yahudi). Paham ini kemudian dipakai oleh *Maskilim*. Ia juga berjuang untuk mendapatkan persamaan dalam bidang pendidikan bagi umat Yahudi. Pada 1778, berdiri sebuah sekolah Yahudi yang pertama di Berlin yang mengajarkan mata pelajaran sekuler (umum), selain pelajaran agama⁴¹.

Haskalah tidak serta-merta hanya membawa hal positif bagi warga Yahudi, ia pun turut membawa hal yang merugikan. Muncul konflik antara kaum

³⁶ <http://en.wikipedia.org/wiki/Haskalah>, diakses pada 19/04/10, diakses pada 19/04/10 pukul 09.45 WIB

³⁷ <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Haskalah.html>, diakses pada 19/04/10, pukul 09.45 WIB

³⁸ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 894.

³⁹ <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Haskalah.html>, diakses pada 19/04/10, pukul 09.45 WIB

⁴⁰ Sebelumnya pemikiran yang serupa juga pernah dikemukakan oleh Moses Maimonides pada abad 12M. Maimonides berpendapat bahwa Taurat dapat selaras dengan sains dan filsafat tanpa harus bertentangan, lihat Abba Ebban, *My People: History of the Jews Volume I*, (New Jersey: Berman House Inc. Publishers, 1978), hlm 105-107

⁴¹ Hermawati, *op. cit.*, hlm. 78-79.

Yahudi tradisional dengan para *Maskilim*⁴². Kecenderungan pemikiran sekular *Maskilim* seringkali didukung oleh pemerintahan Kaisar. Hal itu dikarenakan kekaisaran ingin adanya asimilasi antara Yahudi dengan masyarakat Rusia⁴³ yang nantinya akan melunturkan budaya Yahudi⁴⁴. Meskipun begitu, warga Yahudi tetap berjuang untuk menjaga budaya Yahudi tetap hidup dalam masyarakat. Pada 1860-an, para *Maskilim* mulai memublikasikan buku dan koran baik dalam bahasa Rusia dan Ibrani. Dengan menggunakan bahasa Ibrani, mereka membantu melestarikan bahasa kuno tersebut ke dalam pemikiran dan literatur modern⁴⁵. Dan *Haskalah* pun sukses menjembatani pemikiran Yahudi tradisional dan pemikiran modern yang mulai berbau politis.

2.1.2 Pergeseran Ideologi Zionisme

Pada pertengahan abad 19, muncul konsep-konsep sosial politik Yahudi yang bersifat Romantik. Zionisme yang awalnya bersifat keagamaan seringkali dianut oleh para penganut mistis yang berpaham atas harapan Yudaisme akan tibanya Messiah, Sang Juru Selamat, pada akhir zaman untuk membangun kerajaan Tuhan di tempat-tempat dimana telah berlangsung kisah-kisah mengenai Ibrahim dan Musa menurut Kitab Injil⁴⁶. Zionisme keagamaan ini hanya menginginkan sebuah pusat kegiatann spiritual yang memungkinkan tersebarnya agama dan kebudayaan Yahudi ke seluruh dunia. Mereka tidak menghendaki sebuah negara tersendiri. Bahkan sebagian dari mereka dapat bergaul dengan penduduk lain yang beragama Kristen dan Islam secara damai⁴⁷.

Ideologi Zionisme itu mulai bergeser seiring berkembangnya zaman serta pemikiran-pemikiran yang dibawanya. Moses Hess dianggap sebagai tokoh yang menggeser integrasionisme dengan revolusi Zionis⁴⁸. Hess merupakan seorang filsuf dengan pola pikir Hegel. Sejak diaspora, semangat nasional bangsa Yahudi terwujud dalam bentuk institusi keagamaan Yahudi, namun karena institusi ini

⁴² Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 106.

⁴³ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 401.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 341.

⁴⁵ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 105.

⁴⁶ R. Garaudy, *Kasus Israel: Studi Tentang Zionisme Politik*, Terj. Hasan Basari (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 2-3.

⁴⁷ Sihbudi, *op. cit.*, hlm. 103.

⁴⁸ Rahiem (1996), *loc. cit.*, hlm. 15.

mengalami proses disintegrasi yang sangat cepat, lenyapnya semangat Yahudi secara bertahap merupakan sesuatu yang paling mungkin terjadi⁴⁹. Menurut Hess, yang dapat menyelamatkan Yahudi adalah Nasionalisme Yahudi. Dengan melahirkan kembali ide kebangsaan, keagungan agama Yahudi akan mendapat kekuatan baru dan semangat kenabiannya kembali. Umat Yahudi harus tetap mempertahankan harapan kebangkitan kembali kekuatan bangsa mereka dan selalu menghidupkan harapan kebangsaan yang sedang tertidur. Menurut Hess, hanya dengan kembali ke tanah air leluhur (Palestina), umat Yahudi dapat melaksanakan kewajiban itu. Hess mulai mempropagandakan idenya tentang kebangkitan tanah air Yahudi di Palestina⁵⁰.

2.1.3 Pogrom

Gerakan *Haskalah* berkembang pesat pada saat Rusia diperintah oleh Alexander II. Ia mebebaskan kaum Yahudi dari pembatasan-pembatasan yang selama ini mereka dapatkan dari penguasa sebelumnya dan membiarkan mereka berasimilasi dengan masyarakat Rusia. Walaupun selama periode *Haskalah* terjadi pertentangan antara kaum Yahudi tradisional dan *Maskilim*, kehidupan kaum Yahudi di Rusia dapat dikatakan tenang. Namun, hal itu tidak berlangsung selamanya. Pada saat kematian Tsar Alexander II, kehidupan kaum Yahudi di Rusia berubah 180 derajat.

Pada 13 Maret 1881, Alexander tewas akibat bom yang diledakkan oleh sekelompok revolusioner Rusia yang marah kepada pemerintah Rusia. Kekuasaan Rusia beralih ke tangan anaknya, Alexander III⁵¹. Alexander III merupakan pembenci Yahudi. Segera setelah kematian ayahnya, ia mencoba mengalihkan perhatian massa dari masalah pemerintahan dengan menjadikan kaum Yahudi sebagai kambing hitam kematian ayahnya. Padahal, hanya sedikit Yahudi yang tergabung dalam kelompok revolusioner di Rusia. Alexander III mulai mengorganisir huru-hara dimana warga Kristen Rusia menyerang kaum Yahudi dengan brutal⁵². Hal ini dikenal dengan sebutan *Pogrom*.

⁴⁹ Katz, *op. cit.*, hlm. 30.

⁵⁰ Hermawati, *op. cit.*, hlm. 83-84.

⁵¹ Werner Keller, *Diaspora: The Post Biblical History of the Jews*, (New York: Harcourt, Brace & World Inc., 1966), hlm. 430.

⁵² Eban (1979), *op. cit.* hlm. 118.

Pogrom dimulai pada 16 April 1881 di kota Elisavetgrad, dimana terdapat sekitar 15.000 Yahudi. Mereka mengalami penderitaan yang menakutkan. Banyak dari mereka yang terbunuh, para wanita diperkosa, beratus-ratus rumah dan toko milik warga Yahudi dihancurkan, sinagog-sinagog dirusak, dan penjarahan terhadap barang-barang milik Yahudi terjadi di mana-mana⁵³. Pogrom pun berlanjut di kota Kiev pada 8 dan 9 Mei, lalu meluas ke provinsi Volhynia, Podolia, Pereiaslav, dan bahkan sampai ke Warsawa, Polandia. Pada 10 April 1882, kerusuhan terparah terjadi di daerah Balta, provinsi Podolia. Di sana, para anarkis bahkan didukung oleh wali kota, polisi, dan pihak pemerintahan lainnya. Bahkan Tsar Alexander III juga menghukum warga Rusia yang tidak merusak rumah-rumah tetangga Yahudinya⁵⁴. Ia juga menetapkan *May Laws* yang membatasi dengan ketat jumlah Yahudi yang boleh mengikuti sekolah dan universitas. Warga Kristen Rusia diperbolehkan mengusir warga Yahudi dari komunitasnya⁵⁵.

Pogrom telah mengubah kehidupan Yahudi di Rusia. Mereka tidak bisa hidup dengan tenang di negeri yang telah mereka diami sejak lama. Perekonomian mereka hancur seiring dengan penghancuran-penghancuran (baik rumah dan tempat usaha) yang terjadi selama pogrom. Kegiatan spiritual pun sulit dilakukan semenjak sinagog-sinagog dihancurkan. Beratus-ratus ribu Yahudi beremigrasi meninggalkan negaranya. Setelah kekuasaan Alexander III berakhir, pogrom terus berlanjut. Bahkan hingga setelah Perang Dunia II berakhir, pogrom masih terjadi di Polandia. Kebrutalan terhadap kaum Yahudi Rusia yang terjadi pada 1881 tersebut menyebabkan banyak intelektual muda Yahudi membentuk gerakan-gerakan perintis yang bertujuan membangkitkan semangat nasional Yahudi. Salah satu gerakan tersebut ialah Hibbat Zion.

2.1.4 Hibbat Zion

Gerakan Hibbat Zion (Cinta Zion) lahir ketika perkembangan yang terjadi di negara-negara Eropa Timur memaksa sejumlah besar orang Yahudi beremigrasi atau terpaksa meningkatkan kegiatan sosial dan politiknya. Pada waktu yang sama

⁵³ Keller, *op. cit.* hlm. 430-431.

⁵⁴ Learsy, *op. cit.* hlm. 474-475.

⁵⁵ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 119.

para tokoh penganjur gerakan *Haskalah* menjadi ragu dengan apa yang selama ini mereka percayai, bahwa terdapat kemungkinan terjadinya asimilasi bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa Eropa dan mereka juga kecewa dengan perjuangannya untuk mendapatkan persamaan hak bagi bangsa Yahudi⁵⁶. Hibbat Zion muncul di Rusia pada 1882, akibat Pogrom yang terjadi pada 1881. Hibbat Zion bertujuan mewujudkan kebangkitan nasional bangsa Yahudi dan mendirikan negara di Palestina. Pada 1884 diadakan Konferensi Kattowitz yang merupakan konferensi pertama Hibbat Zion. Tujuannya ialah untuk menyatukan semua lembaga Zionis, dan sebuah panitia permanen ditetapkan dengan markas yang berlokasi di Odessa, Rusia⁵⁷.

Salah satu tokoh penting dalam Hibbat Zion ialah Leon Pinsker. Pinsker merupakan fisikawan Rusia yang aktif dalam kegiatan Yahudi di Rusia. Semenjak *Haskalah*, kaum Yahudi di Eropa mulai mencoba mengintegrasikan diri mereka ke dalam kehidupan sosial di tempat mereka berada, dengan harapan mereka akan diterima ke dalam kehidupan tersebut.

Hal itu ternyata tidak membuahkan hasil. Kaum Yahudi di Eropa tetap saja dianggap sebagai 'alien' dan mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan warga negara lainnya. Dengan terjadinya pogrom di Rusia, Pinsker menulis *Auto-Emancipation* yang menggagas bahwa keamanan Yahudi di Eropa merupakan hal yang mustahil. Kaum Yahudi harus mengemansipasikan diri mereka sendiri dan tidak bergantung pada non-Yahudi. Pinsker juga yakin bahwa Yahudi harus menempati suatu wilayah tertentu guna melarikan diri dari penindasan yang mereka alami di Eropa⁵⁸. Ide ini pula yang diadopsi oleh Hibbat Zion. Awalnya Pinsker tidak mengharuskan bahwa wilayah tersebut harus terletak di Palestina, namun pada akhirnya ia pun bergabung dengan Hibbat Zion, dan pada 1883 hingga akhir hayatnya (1891) menjadi ketua organisasi tersebut. Pada konferensi kedua Hibbat Zion tahun 1887, gerakan ini berubah menjadi Hoveve Zion⁵⁹.

⁵⁶ Katz, *op. cit.*, hlm. 39.

⁵⁷ Cecil Roth, *The Standard Jewish Encyclopedia*, (Jerusalem: Madassah Publishing Company Ltd, 19580, hlm. 1112.

⁵⁸ Charles D. Smith, *Palestine and The Arab-Israeli Conflict*, (New York: St. Martin's Press, 1992), hlm. 29.

⁵⁹ Roth, *loc. cit.*, hlm. 901.

Gerakan ini senantiasa membantu para imigran Yahudi memasuki Palestina. Dalam konferensi perkumpulan organisasi Yahudi Hoveve Zion menyatakan gagasannya untuk membuat pemukiman Yahudi di Palestina. Namun banyak organisasi lain yang menentangnya. Meski demikian Hoveve Zion terus maju dengan programnya dan pada musim semi 1882 sejumlah pemukim Yahudi berhasil mencapai Palestina⁶⁰. Pada 1897, hampir semua masyarakat Hibbat Zion bergabung dengan Organisasi Zionis Dunia yang baru saja diresmikan oleh Theodor Herzl.

2.1.5 Organisasi Zionis Dunia

Gerakan-gerakan Yahudi di dunia terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan itu senantiasa menimbulkan perubahan dasar dalam hal ideologi. Sebelum muncul ideologi Zionisme Politik, perkumpulan Zion semata-mata merupakan suatu wadah agama bagi para penganut Yudaisme yang yakin akan kedatangan Messiah yang akan membangun kerajaan di Tanah Zion. Selanjutnya, pada abad 19, gerakan *Haskalah* yang dirintis sejak abad 18 berkembang pesat di Rusia dengan tokoh-tokohnya yang terkenal seperti Isaac Ber Levinsohn dan Peretz Smolenskin. Gerakan *Haskalah* berideologi sosial dan kultural. Setelah itu muncul Gerakan Hibbat Zion yang mulai menunjukkan ideologi politiknya. Ideologi politik Yahudi benar-benar ditonjolkan dalam gerakan Zionis yang didirikan oleh Theodor Herzl.

Theodor Herzl merupakan seorang jurnalis Yahudi berkebangsaan Austria yang lahir di Budapest, Hungaria. Herzl bukan merupakan seorang Yahudi yang religius. Dia hanya mempelajari Yudaisme semasa kecilnya. Semangat Yahudinya muncul ketika ia meliput kasus Dreyfus untuk harian *Neue Freie Presse*. Alfred Dreyfus adalah seorang perwira Angkatan Darat Prancis yang dituduh menjual dokumen rahasia Prancis kepada Jerman. Bukti yang menunjukkan bahwa ia bersalah sangat lemah. Namun, karena ia adalah seorang Yahudi, Prancis tetap bersikeras bahwa ia memang bersalah. Pada 1894, Dreyfus divonis hukuman

⁶⁰ Katz, *op. cit.*, hlm. 42-43.

penjara seumur hidup di Pulau Devil⁶¹. Lagi-lagi, diskriminasi terhadap Yahudi terjadi di Eropa.

Sementara Dreyfus mulai menjalani hukumannya, para pendukungnya meminta pemerintah Prancis untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Akhirnya pemerintah Prancis menemukan bahwa bukan Dreyfus yang menjual dokumen rahasia kepada Jerman, melainkan Mayor Ferdinand Esterhazy. Namun, Prancis terlalu malu untuk mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Sementara itu, rakyat Prancis tetap menganggap bahwa Dreyfuslah yang bersalah. Herzl menyaksikan kebencian rakyat Prancis terhadap seorang Yahudi berubah menjadi kebencian pada Yahudi pada umumnya. Mereka meneriakkan “Matilah para Yahudi”⁶². Bahkan mereka merampas toko-toko milik orang Yahudi, memukuli para Yahudi, dan meminta pemerintah untuk mengusir orang-orang Yahudi dari Prancis. Pada tahun 1899, pemerintah Prancis ‘mengampuni’ Dreyfus, dan barulah pada tahun 1906, Albert Dreyfus dinyatakan tidak bersalah⁶³. Sejak peristiwa itulah, Herzl tergerak dan yakin bahwa kaum Yahudi tidak akan bisa hidup tentram, bahkan di Prancis sekalipun. Prancis merupakan negara pertama yang mengakui persamaan hak bagi Yahudi. Herzl yakin bahwa seluruh umat Yahudi harus mempunyai suatu tempat tinggal tertentu, suatu negara Yahudi.

Herzl mulai mempropagandakan pemikirannya lewat bukunya yang berjudul *Der Judenstaat* (Negara Yahudi). Dalam buku tersebut, Herzl menegaskan bahwa pembentukan suatu negara Yahudi merupakan jalan keluar dari masalah-masalah yang selama ini menimpa kaum Yahudi. Sama seperti pemikiran Pinsker, ia yakin bahwa asimilasi Yahudi dengan masyarakat Eropa tidak akan berhasil membuat kaum Yahudi diterima sepenuhnya⁶⁴. Herzl berusaha mencari dukungan dari tokoh-tokoh kaya termasuk Baron Edmond de Rothschild. Namun, mayoritas menolaknya. Herzl tetap berusaha menjalankan misinya dan pada 29 Agustus 1897, diadakan Kongres Zionis Pertama di Basle, Swiss. Kongres ini merupakan pertemuan resmi pertama dari seluruh delegasi Yahudi di

⁶¹ Eban (1978), *op. cit.* hlm. 216.

⁶² *Ibid.*, hlm. 217.

⁶³ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 132.

⁶⁴ Katz, *op. cit.*, hlm. 56-57.

dunia. Lebih dari 200 pemimpin Yahudi dari seluruh dunia berkumpul. Mereka datang dari berbagai latar belakang, baik kaum ortodoks, reformis, kapitalis, sosialis, dan lainnya⁶⁵. Pada kongres ini pula, Organisasi Zionis Dunia resmi didirikan dengan Herzl sebagai ketua. Setiap anggota wajib membeli *shekel* sebagai bukti kesetiannya terhadap organisasi. Dalam catatannya di kongres ini, Herzl menulis : “*Di sini saya sudah mendirikan negara Yahudi.*”⁶⁶

Kongres Pertama Zionis melahirkan program Basle yang intinya ialah mendirikan sebuah tanah air di Palestina yang diakui secara umum bagi kaum Yahudi. Demi mendukung program itu Organisasi Zionisme Dunia mendirikan beberapa badan pendukung lain. *Jewish Colonial Trust* didirikan pada tahun 1898 guna yang bergerak dalam bidang saham. *Jewish National Fund* pada 1901 guna membeli tanah di Palestina⁶⁷. Organisasi ini juga mendirikan surat kabar *Die Welt* pada 1897 sebagai media organisasi⁶⁸. Kongres Zionis tetap dilaksanakan hingga saat ini⁶⁹.

2.2 Hubungan Zionisme dengan Imigrasi Yahudi ke Palestina

Gerakan Zionis secara resmi berdiri pada 1897. Namun, jauh sebelum itu pemikiran untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina sudah muncul. Mulai dari Kalischer⁷⁰, Moses Hess, gerakan Hibbat Zion, dan puncaknya ialah ketika Teodor Herzl mempopulerkan gerakan Zionis di Wina pada 1895⁷¹. Untuk mendirikan suatu negara Yahudi di tempat dimana pada saat itu tidak banyak terdapat orang-orang Yahudi, perlu diadakan suatu proses pemindahan umat Yahudi menuju tempat tersebut, dalam kasus ini ialah Palestina. Imigrasi Yahudi ke Palestina, atau *Aliyah*, sangat termotivasi oleh ideologi-ideologi yang terdapat di dalam Zionisme. Dalam Kongres Zionis pertama di Basle pada 1897,

⁶⁵ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 133.

⁶⁶ Katz, *op. cit.*, hlm. 58.

⁶⁷ Roth, *loc. cit.*, hlm. 1966.

⁶⁸ Katz, *op. cit.*, hlm. 183.

⁶⁹ Lihat: Lampiran 1

⁷⁰ Rabbi Zevi Kalischer (1795-1874) merupakan tokoh Yahudi Jerman yang berpendapat bahwa untuk mewujudkan pembebasan bagi kaum Yahudi dari segala penindasan, bangsa Yahudi harus hidup di Palestina. Saat itu, ia tidak berpendapat bahwa sebuah negara Yahudi perlu didirikan.

Lihat: Katz, *op. cit.*, hlm. 28-30.

⁷¹ Hermawati, *op. cit.*, hlm. 88.

dinyatakan bahwa tujuan dari Zionisme ialah untuk menciptakan sebuah rumah di Palestina bagi umat Yahudi yang dilindungi oleh hukum publik⁷².

Pada mulanya, orang-orang Yahudi bermigrasi ke Palestina hanya semata-mata untuk melarikan diri dari perlakuan buruk yang mereka dapatkan di negara asalnya. Imigrasi yang mereka lakukan juga masih bersifat mesianis dan agamis, bukan politik. Namun dalam perkembangannya, unsur-unsur politik dari Zionisme pun meresap idealisme bangsa Yahudi sehingga memicu semangat mereka untuk bermigrasi menuju Palestina dan bersatu dengan umat Yahudi di seluruh penjuru dunia setelah mengalami diaspora.

Herzl, dalam bukunya *Der Judenstaat* (Negara Yahudi), memberikan gagasan bahwa kaum Yahudi harus secara politis terpisah dari kaum non-Yahudi. Hal ini akan berakibat pada migrasi massal kaum Yahudi dari seluruh dunia ke Tanah Palestina. Ini merupakan apa yang diharapkan dapat menjawab ‘Permasalahan Yahudi’ di Eropa⁷³. Gagasan itu pun akhirnya menjadi kenyataan. Imigrasi Yahudi ke Palestina (*Aliyah*) secara terstruktur telah dimulai pada 1882 dan terus berlangsung hingga masa kini.

Jacob Katz menyatakan bahwa Zionisme telah melenyapkan kepercayaan Yahudi terhadap adanya unsur-unsur mukjizat dalam paham itu, dan hanya tetap mempertahankan tujuan politis, sosial dan spiritualnya. Namun demikian, dalam perkembangannya Zionisme tetap menyandarkan diri pada konsep mesianisme kuno dan menyerap sebagian besar daya tarik ideologis dan emosionalnya⁷⁴. Zionisme, di balik ide politisnya, selalu mencekoki ide klaim historis Yahudi atas wilayah Palestina kepada kaum Yahudi di berbagai penjuru dunia agar mereka bermigrasi menuju Palestina.

Ide klaim tersebut memunculkan istilah *The Promised Land* yang mengacu pada Tanah Palestina yang dijanjikan Tuhan untuk umat Yahudi yang juga menjadi latar belakang adanya gelombang imigrasi ke Palestina. Dalam Perjanjian Lama Kitab Kejadian 12: 4, 5, 7:

(4)Lalu pergilah Abram (Abraham) seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia; Abram berumur tujuh puluh lima tahun, ketika berangkat dari Haran. (5)Abram membawa

⁷² Eban (1978), *op. cit.*, hlm. 218.

⁷³ Al ‘Asi, *loc. cit.*

⁷⁴ Katz, *op. cit.*, hlm. 25.

Sara, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka dari Haran; mereka berangkat ke Tanah Kanaan, lalu sampai di situ. (7)Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman: “Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.” Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya⁷⁵.

Klaim ini pun hingga sekarang masih dipakai oleh Yahudi sebagai dasar hak atas wilayah Palestina. Yang patut dipertanyakan ialah, mengapa suatu klaim yang berasal dari sebuah kitab suci agama tertentu harus diterima oleh masyarakat dunia yang tidak semuanya memiliki kepercayaan yang sama. Meskipun banyak kecaman yang dikemukakan oleh dunia, kaum Zionis nampaknya tidak peduli dengan hal itu. Sejak diadakan Kongres Zionis pertama di Basle, mereka dengan gigih membuat rencana-rencana demi tercapainya cita-cita Zionisme.

Piagam Basle yang tujuannya ialah untuk mempromosikan kolonisasi pekerja Yahudi ke Palestina, mengorganisasi dan menyatukan bangsa Yahudi melalui lembaga lokal maupun internasional, memperkokoh sentimen dan kesadaran nasionalitas Yahudi, serta mempersiapkan langkah ke arah terbentuknya pemerintahan⁷⁶, jelas merupakan gagasan pemicu yang membawa para imigran Yahudi ke Palestina demi terciptanya suatu negara Yahudi. Untuk melaksanakan program yang telah diputuskan dalam Kongres Zionis I, dibentuklah suatu panitia Yahudi yang kemudian berkembang menjadi suatu Perwakilan Yahudi (*Jewish Agency*) di berbagai negara untuk memudahkan orang-orang Yahudi yang ingin bermigrasi ke Palestina⁷⁷.

Herzl juga mencoba cara diplomasi. Pada 1901, dalam upayanya memudahkan proses *Aliyah*, Herzl meminta kepada Sultan Abdul Hamid II yang saat itu memerintah Turki Usmani untuk mengizinkan imigran-imigran Yahudi dapat menetap di Palestina. Mengetahui bahwa saat itu Turki sedang mengalami kebangkrutan, Herzl menjanjikan bahwa kongsi dagang Yahudi akan menanggung seluruh utang luar negeri Turki Usmani jika Abdul Hamid mengabulkan permintaannya⁷⁸. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan Turki bertanggung

⁷⁵ Alkitab: Perjanjian Lama, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1996)

⁷⁶ Armando, *loc. cit.*

⁷⁷ Rahiem (1996), *op. cit.*, hlm. 19.

⁷⁸ Yahya Armajani, *Middle East: Past and Present*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1970), hlm. 298.

jawab atas orang-orang Muslim Arab di Palestina⁷⁹. Ia juga mengadakan dua pertemuan dengan Kaisar Wilhelm II dari Jerman pada 1904. Pertama di Konstantinopel, dan yang kedua di Jerusalem. Tujuan pertemuan itu ialah meminta Jerman menggunakan pengaruhnya atas Turki, supaya Turki mengizinkan para imigran Yahudi tinggal di Palestina. Awalnya, Wilhelm penanggapinya dengan antusias. Namun pada perkembangannya, hal itu tidak membuahkan hasil⁸⁰. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari Turki dan Jerman, gerakan Zionis beralih kepada pemerintah Inggris. Inggris memberi respon positif. Namun, Inggris mencoba menawarkan Uganda sebagai wilayah yang akan dijadikan pusat Yahudi dunia. Tawaran ini bertepatan dengan pogrom yang berlanjut di Rusia⁸¹. Pada Kongres Zionis VI tahun 1903, Herzl mendiskusikan tawaran ini. Namun pada Kongres VII tahun 1905, pihak Zionis resmi menolak tawaran ini dan tetap memilih Palestina⁸².

Pada 1917, seorang tokoh Zionis bernama Chaim Weizmann berhasil memenangkan dukungan Inggris untuk Zionisme. Dukungan itu menjadi jelas melalui sepucuk surat yang dikirimkan oleh Arthur James Balfour kepada Lord Rothschild, yang kemudian dikenal dengan *The Balfour Declaration*, yang isinya:

*“His Majesty’s Government, view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”*⁸³

“Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pendirian tanah air untuk orang Yahudi di Palestina, dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatuupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan religius dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya.”

⁷⁹ Rahiem (1996), *op. cit.*, hlm. 20.

⁸⁰ Keller, *op. cit.*, hlm. 427.

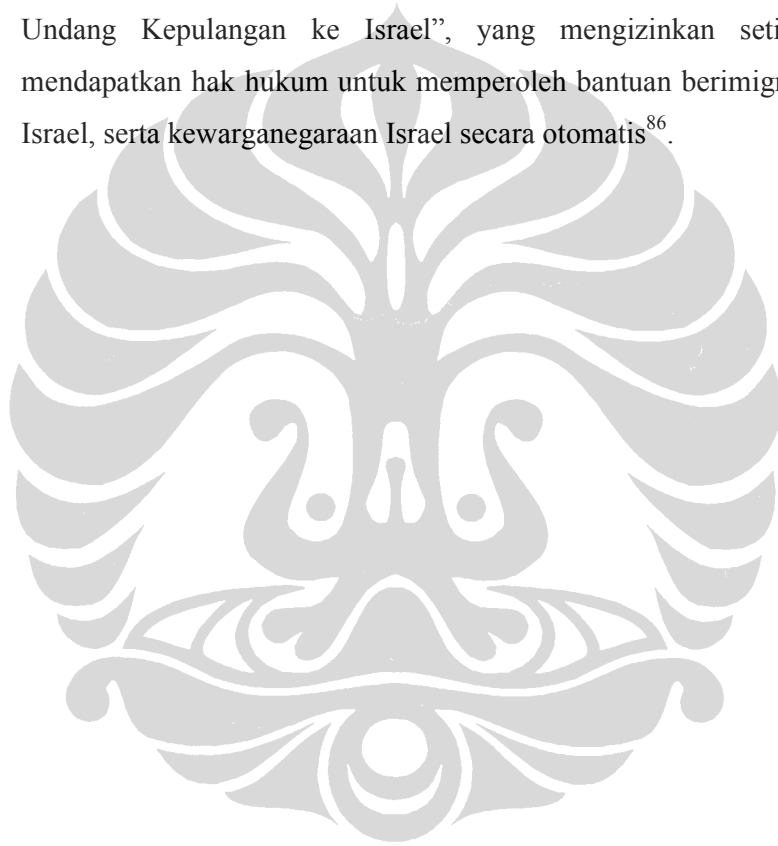
⁸¹ Katz, *op. cit.*, hlm. 119.

⁸² Roth, *loc. cit.*, hlm. 1969-1970.

⁸³ Robert St. John, *Israel*, (New York: Time Incorporated. 1962), hlm. 39.

Dalam deklarasi itu, Pemerintah Inggris berjanji akan berusaha sekuat-kuatnya untuk membantu mendirikan tanah air Yahudi (*Jewish National Home*)⁸⁴. Salah satu caranya dengan memfasilitasi imigrasi dan mendorong adanya pemukiman Yahudi di Palestina⁸⁵.

Hubungan antara paham Zionisme dengan *Aliyah* juga terus berlangsung setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. *Aliyah* bukan saja sebuah konsep budaya tetapi sekaligus sebagai sebuah diskursus politis Yahudi yang penting dan mendasar dari Zionisme, sehingga konsep ini ditempatkan dalam “Undang-Undang Kepulangan ke Israel”, yang mengizinkan setiap orang Yahudi mendapatkan hak hukum untuk memperoleh bantuan berimigrasi dan menetap di Israel, serta kewarganegaraan Israel secara otomatis⁸⁶.



⁸⁴ El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm. 9.

⁸⁵ St. John, *op. cit.*

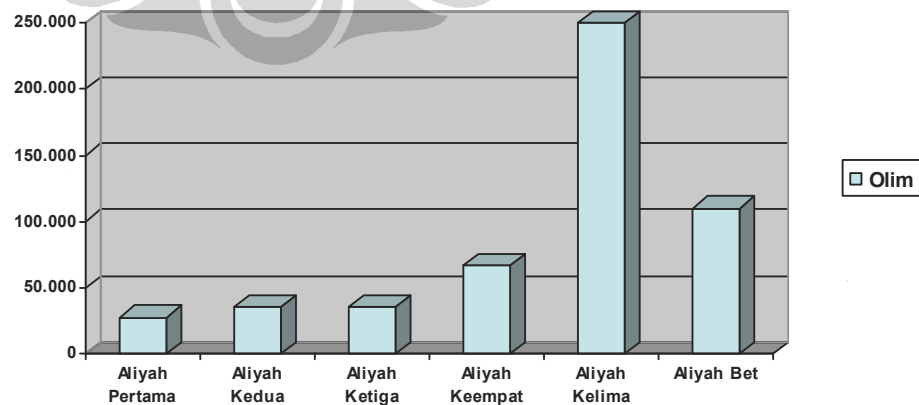
⁸⁶ Rahiem (2006), *loc. cit.*, hlm. 57.

BAB III

GELOMBANG IMIGRASI YAHUDI KE PALESTINA (1882-1948)

Migrasi Yahudi ke Palestina terjadi karena beberapa faktor seperti *Pogrom* di Rusia, penindasan di Rumania, anti-Semitisme yang merebak di Jerman, Austria, dan Eropa Barat. Namun, menurut Ben Zion Dinur dalam *The Jews: Their History, Culture, and Religion*, sebab yang signifikan mengapa mereka memilih Palestina sebagai tempat pemukiman ialah karena penantian umat Yahudi untuk kembali ke Tanah Israel, seperti yang terjadi di masa lampau⁸⁷. Migrasi Yahudi ke Palestina terjadi dalam banyak gelombang. Ada lebih dari 10 gelombang yang terjadi dalam proses migrasi ini. Gelombang pertama dimulai pada 1882 dan gelombang terakhir berakhir pada 2005. Dalam penelitian ini, gelombang migrasi yang akan dibahas ialah gelombang yang terjadi sejak 1882 (*Aliyah Pertama*) hingga 1948 (*Aliyah Bet*) yang merupakan tahun di mana Israel memproklamasikan kemerdekaannya sebagai sebuah negara Yahudi. Masing-masing gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina dinamakan dengan istilah *Aliyah*, maka dalam penelitian ini kata *Aliyah* akan banyak disebut sebagai pengganti imigrasi Yahudi ke Palestina.

Grafik Imigrasi Yahudi ke Palestina (1881-1948)



⁸⁷ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 594.

3.1 *Aliyah* Pertama (1882-1903)

Setelah penghancuran Haikal Sulaiman atau yang biasa disebut dengan “*The Second Temple*”⁸⁸ oleh Romawi pada tahun 70 M, terdapat beberapa orang Yahudi yang berkeinginan untuk kembali ke Palestina. Mereka mencoba membentuk grup kecil untuk bersama-sama melakukan *Aliyah*. Beberapa grup imigran tersebut bermigrasi pada akhir abad kedepalan belas. Dalam kurun waktu 30 tahun, yaitu sejak tahun 1850 hingga 1880, sudah ada lebih dari 20.000 Yahudi yang menetap di *Eretz Yisrael*⁸⁹.

Gelombang Migrasi Yahudi ke Palestina secara terstruktur telah dimulai sejak tahun 1882 yang tergabung dalam *Aliyah* Pertama. Hal itu menandai awal dari arus gelombang imigran Yahudi yang pada kemudian hari datang secara berbondong-bondong menuju Palestina. Hermawati mengutip perkataan Alexander Schloch yang menyatakan bahwa pada tahun 1882 itu, kolonisasi Yahudi benar-benar dimulai, suatu kolonisasi untuk mengubah wajah Palestina⁹⁰. Sebelum masa itu, imigrasi ke Palestina sebagian besar dipicu oleh motivasi religius dan keinginan untuk membentuk pusat ekonomi dan sosial di Palestina⁹¹.

Aliyah Pertama merupakan gelombang imigran terstruktur pertama yang dilakukan secara besar-besaran menuju Palestina, yang dimotivasi oleh nasionalisme⁹². Cecil Roth menyatakan pula bahwa *Aliyah* yang terorganisir sebagian besar dipengaruhi oleh Zionisme⁹³. Hal ini dapat dimengerti melalui rangkaian kejadian yang terjadi di dunia Yahudi pada saat itu. Para pionir awal yang datang ke Palestina merupakan para idealis (khususnya *Bilu*⁹⁴) yang

⁸⁸ Penyebutan *The Second Temple* mengacu kepada sejarah pengerusakan Haikal Sulaiman (*The First Temple*) pada saat Babylonia yang dipimpin Nebuchadnezzar menaklukkan Jerusalem dan menghancurkan kota tersebut termasuk Haikal Sulaiman pada 586 SM. Hal itu mengakibatkan pembuangan umat Yahudi ke Babylonia. 50 tahun setelah itu, umat Yahudi di Babylonia mulai berdatangan kembali ke Zion, dan mereka mendirikan kembali Haikal Sulaiman (*The Second Temple*), Lihat: Eban (1978), *op. cit.* hlm. 27, 30.

⁸⁹ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 127.

⁹⁰ Hermawati, *op. cit.*, hlm. 91.

⁹¹ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 1642.

⁹² Departemen Penyerapan Imigran Israel,

http://www.moia.gov.il/Moia_en/AboutIsrael/aliya1.htm, diakses pada 26/08/2009 pukul 8.49 WIB

⁹³ Roth, *loc. cit.*, hlm. 74.

⁹⁴ Nama *Bilu* berasal dari singkatan kata-kata yang terdapat dari Isaia 2: 5 “*בית יעקב לנו ונלכה*” (*House of Jacob, come let us go up*). *Bilu* digagas oleh para pelajar dan mahasiswa Yahudi di

termotivasi untuk mendiami Palestina. Mereka didorong oleh semangat nasionalisme yang belum begitu mengandung unsur politik. Sedangkan para imigran yang datang ke Palestina mulai dari 1897 ialah mereka yang termotivasi oleh Zionisme karena pada tahun itu pula Organisasi Zionis Dunia resmi didirikan. Pada masa kepemimpinan Herzl, terjadi perubahan mendasar yaitu menghentikan gerakan kebangsaan yang bercorak filsafat dan agama dengan menyatukannya dalam suatu gerakan organisasi yang bercorak politik. Dalam bukunya ia menyatakan bahwa Yahudi harus memiliki negara sendiri⁹⁵.

Aliyah pertama terjadi pada 1882 hingga 1903. Selama 21 tahun masa *Aliyah* ini, sekitar 25.000 Yahudi datang ke Palestina. Para imigran ini berasal dari Rusia dan Rumania, serta Yaman. Situs Departemen Penyerapan Imigrasi Israel menyebutkan bahwa para imigran datang dalam dua gelombang. Gelombang pertama datang pada 1882-1884 karena *Pogrom* yang terjadi di Rusia, dan gelombang kedua berlangsung pada 1890-1891 sebagai hasil dari kebijakan anti-Yahudi dan pengusiran Yahudi dari Moskow⁹⁶.

Selama masa *Pogrom* di Eropa Timur, banyak Yahudi yang melarikan diri ke Amerika. Namun, beberapa intelektual muda Rusia membentuk gerakan agrikultur yang dinamakan *Bilu*, yang menggagas para Yahudi untuk kembali ke Zion. Anggota-anggota *Bilu* dengan beberapa ratus anggota Hibbat Zion membentuk *Aliyah* Pertama. Mereka pergi menuju Palestina dengan kapal laut. Mereka berhasil berlabuh di pelabuhan Jaffa dengan menyuap pegawai-pegawai Turki Usmani supaya mereka mengabaikan larangan imigrasi Yahudi yang berlaku saat itu⁹⁷. Saat itu Turki Usmani mengeluarkan peraturan bahwa para imigran Yahudi diperbolehkan hidup sebagai kelompok-kelompok yang berpencar di seluruh wilayah Turki Usmani, kecuali Palestina. Mereka harus menaati peraturan yang berlaku dan menjadi warga negara Turki Usmani⁹⁸. Sedangkan menurut Cecil Roth, pada 1882, 300 keluarga dan beberapa kelompok tambahan

Rusia yang dipicu oleh *Pogrom*. Mereka merupakan pionir-pionir yang berimigrasi ke Palestina. Lihat: Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 125.

⁹⁵ Hermawati, *op. cit.*

⁹⁶ Departemen Penyerapan Imigran Israel, *loc. cit.*

⁹⁷ St. John, *op. cit.*, hlm. 38.

⁹⁸ Smith, *op. cit.*, hlm. 34.

dari Rusia tiba di Palestina. Sebanyak 450 pionir dari Rumania dan beberapa ratus Yahudi Yaman juga tiba di Palestina⁹⁹.

Para imigran kemudian membuat komunitas pertanian walaupun mereka tidak memiliki izin tinggal yang legal. Pemerintah Turki Usmani tidak memberikan kebijakan yang jelas tentang masalah imigrasi ini. Walaupun mereka melarang imigran Yahudi memasuki Palestina, para imigran Yahudi yang berhasil mencapai Palestina tidak diusir atau dibuang. Pemerintah Turki tidak melarang para imigran menetap, tapi juga tidak memberikan izin untuk menetap¹⁰⁰.

Setelah *Pogrom*, tindakan anti-Yahudi di Rusia tidak begitu saja selesai. Penyiksaan yang berlanjut di Rusia pada 1890 menyebabkan beribu-ribu Yahudi Rusia datang ke Palestina¹⁰¹. Eksodus kedua dari Rusia, yaitu setelah diusirnya orang Yahudi dari Moskow pada 1891, menyebabkan meningkatnya jumlah *Olim*¹⁰². Pemerintah Turki pun merevisi kembali peraturannya terkait dengan larangan terhadap pemukiman dan imigrasi Yahudi¹⁰³. Pada *Aliyah* Pertama, sekitar 2.500 imigran Yahudi juga datang dari Yaman¹⁰⁴.

3.1.1 Pendirian Pemukiman Pertanian

Para imigran awal yang berhasil mencapai Palestina mulai bekerja sebagai petani. Meskipun banyak kesulitan yang didapatkan dari pemerintah Turki, *Aliyah* tetap berjalan, dan sejumlah pemukiman pertanian didirikan¹⁰⁵. Pada 1882, Zalman Levontin berhasil mendirikan pemukiman Rishon LeZion¹⁰⁶. Penghuni pemukiman ini ialah imigran Yahudi yang berasal dari Rusia. Rishon LeZion terletak di dataran pesisir Judea.

Selain itu, para imigran juga mendirikan pemukiman Rosh Pinnah. Pemukiman ini -yang saat ini telah menjadi sebuah desa- terletak di daerah Galilea. Rosh Pinnah merupakan pemukiman pertanian Yahudi pertama yang didirikan pada era modern. Pemukiman ini, awalnya didirikan pada 1878 oleh

⁹⁹ Roth, *loc. cit.*

¹⁰⁰ Eban (1979), *op. cit.*

¹⁰¹ Roth, *loc. cit.*

¹⁰² *Olim* ialah para imigran Yahudi yang pergi menuju Palestina. Penjelasan tentang istilah ini terdapat pada BAB II dalam sub-bab Teori Imigrasi dalam Konteks Yahudi, hlm. 7

¹⁰³ Katz, *op. cit.*, hlm. 46-47.

¹⁰⁴ Departemen Penyerapan Imigran Israel, *loc. cit.*

¹⁰⁵ Roth, *loc. cit.*

¹⁰⁶ Katz, *op. cit.*, hlm. 43.

pemukim Yahudi yang berasal dari Safed. Namun, karena kerap kali mengalami gagal panen, serangan dari orang Arab, dan terjangkit malaria, mereka meninggalkan daerah ini¹⁰⁷. Pada 1882, pemukiman ini didirikan kembali oleh imigran Rumania yang tergabung dalam *Aliyah* Pertama, yang mayoritas merupakan anggota *Bilu*¹⁰⁸. Bantuan dari Baron Edmond de Rothschild menjamin eksistensi pemukiman ini yang sempat mengalami serangkaian gagal panen. Pada 1958 populasi desa ini 938 jiwa¹⁰⁹.

Pada 1882, para imigran Rumania mendirikan sebuah pemukiman pertanian yang bernama Zikhron Yaakov yang terletak di daerah gunung Carmel. Setelah didirikan, Baron Edmond de Rothschild memberi bantuan secara konstan. Pemukiman ini menjadi pusat penanaman anggur dan gudang-gudang anggur. Zikhron Yaakov juga menjadi tempat dimakamkannya Baron Edmond de Rothschild¹¹⁰. Setahun kemudian, para imigran Hungaria mendirikan Petah Tikvah (Pintu Harapan)¹¹¹. Sama seperti Rosh Pinnah, pada 1878 sekelompok Yahudi mencoba mendiami daerah ini tetapi gagal. Pada 1883, Petah Tikvah didirikan kembali oleh pionir Hoveve Zion yang tergabung dalam *Aliyah* Pertama¹¹². Selain yang telah disebutkan, masih ada beberapa pemukiman lain yang didirikan oleh imigran *Aliyah* Pertama, seperti Nes Tzionaiah, Gederah, dan Ekron yang didirikan oleh imigran Lithuania¹¹³.

Meskipun para imigran Yahudi ini telah berhasil mendirikan pemukiman dan komunitas pertanian, mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam bertani, baik saat di Rusia maupun di Palestina, sehingga seringkali mengalami kegagalan dalam bertani¹¹⁴. Bukan hanya itu saja, kerja keras, iklim yang tidak bersahabat, serangan penyakit khususnya malaria, dan serangan-serangan dari perampok mengakibatkan banyak dari para idealis muda Yahudi mati. Orang

¹⁰⁷ Roth, *loc. cit.*, hlm. 1615.

¹⁰⁸ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 592.

¹⁰⁹ Roth, *loc. cit.*, hlm. 1615-1616.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1962-1963.

¹¹¹ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 592

¹¹² Roth, *loc. cit.*, hlm. 1496.

¹¹³ Finkelstein, *op. cit.*

¹¹⁴ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 125.

Arab biasa menyebut mereka ‘*Awlad Al Maut*’¹¹⁵. Selain itu, ada pula yang menyerah dan kembali ke Rusia atau pergi menuju Amerika.

Di tengah-tengah kesulitan itu, pada 1883 seorang Yahudi bernama Baron Edmond de Rothschild, dari Paris aktif berjuang untuk pemukiman Yahudi di Palestina dan mengirimkan sejumlah besar uang untuk membantu para pemukim tersebut¹¹⁶. Rothschild sangat amat berjasa bagi para Yahudi. Ia telah menyumbangkan uang lebih banyak dari Yahudi lainnya di seluruh dunia saat itu. Ia juga membeli 125.000 ekar (setara dengan 505.859.125 m²) tanah di Palestina untuk para imigran yang datang. Uang dan para pakar yang ia kirim ke Palestina digunakan untuk mengeringkan rawa-rawa, membangun irigasi, dan memulai industri yang menghasilkan produk-produk seperti parfum dan anggur¹¹⁷. Hal itu bisa terjadi akibat permintaan Samuel Mohilever dan Joseph Feinberg dari Rishon LeZion kepada Rothschild. Mereka meminta Rothschild agar membantu warga petani Yahudi dari Rusia untuk bermukim di Palestina. Sejak itu, sebagian besar pemukiman Yahudi di Palestina mendapatkan bantuan dari Rothschild¹¹⁸. Pada 1897, 15 tahun setelah kedatangan pionir modern Yahudi, perkampungan Yahudi di Tanah Palestina (*Yishuv*), menjadi kenyataan. Koloni pertanian berkembang dengan pesat¹¹⁹.

Pada masa *Aliyah Pertama*, Organisasi Zionis Dunia juga mendirikan beberapa lembaga guna menyokong *Aliyah*. Pada 1899 didirikan Jewish Colonial Trust yang berfungsi sebagai Bank Zionis, kemudian pada 1901 didirikan Jewish National Fund yang bertugas membeli tanah-tanah di Palestina. Sebuah surat kabar bernama *Die Welt* juga didirikan pada 1897¹²⁰.

3.2 *Aliyah Kedua (1904-1914)*

Pogrom yang terjadi pada periode *Aliyah Pertama* tidak berakhir begitu saja. Penindasan terhadap kaum Yahudi terus terjadi di Eropa Timur. Seperti jutaan Yahudi lainnya yang datang ke Amerika, imigrasi Yahudi ke Palestina juga

¹¹⁵ St. John, *op. cit.*, hlm. 38.

¹¹⁶ Eban (1979), *op. cit.*

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

¹¹⁸ Katz., *op. cit.*, hlm. 43-44.

¹¹⁹ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 126.

¹²⁰ Katz, *op. cit.*, hlm. 183.

terus meningkat pada periode *Aliyah* Kedua akibat *Kishinev Pogrom*¹²¹ yang terjadi tahun 1903, dan diikuti dengan serangkaian penindasan lainnya terhadap kaum Yahudi. Kondisi diperburuk oleh kegagalan Revolusi tahun 1905 di Rusia yang menyebabkan ketidakstabilan situasi politik, ekonomi, dan sosial¹²². Dalam kurun waktu 10 tahun, lebih dari 35.000 Yahudi bermigrasi ke Palestina¹²³. Sedangkan, Cecil Roth dalam *The Standard Jewish Encyclopedia* dan Simon Kuznets dalam *The Jews: Their History, Culture, and Religion* menyebutkan jumlah imigran berkisar antara 35.000-40.000 jiwa¹²⁴. Bahkan Robert St. John dalam *Israel* menyebutkan jumlah imigran mencapai 50.000 jiwa¹²⁵. Jumlah ini relatif besar dibandingkan dengan *Aliyah* Pertama yang hanya membawa sekitar 25.000 imigran dalam kurun waktu 21 tahun.

Para imigran *Aliyah* Kedua ialah para pionir muda yang umumnya percaya kepada sebagian paham Zionisme Sosialis, khususnya yang dikemukakan oleh A.D. Gordon, yang berpendapat bahwa Zionisme merupakan perbuatan dengan niat yang diteguhkan penderitaan dan kerinduan akan tanah airnya sendiri untuk membentuk dan menggantikan manusia Yahudi lama yang sudah rapuh¹²⁶. Imigran-imigran ini berasal dari Rusia dan Polandia. Mereka memiliki alasan khusus mengapa mereka lebih memilih kehidupan keras di Palestina daripada kemudahan yang ditawarkan di Amerika. Mereka ingin memelihara dan menjaga Zionisme setelah kematian Herzl¹²⁷.

Para imigran *Aliyah* Kedua bergerak di bidang pertanian. Namun, seperti yang terjadi pada masa *Aliyah* Pertama, mereka mengalami wabah penyakit dan serangan dari orang-orang Arab, ditambah dengan tuan tanah Yahudi yang memberi upah kecil kepada mereka. Mengingat bahwa tidak semua imigran

¹²¹ Pada 1903 pemerintah Rusia mengorganisir sebuah pogrom di daerah Kishinev dengan dalih bahwa seorang Yahudi bernama Menachem Mendel Beilis telah membunuh seorang anak Rusia guna digunakan sebagai upacara ritual Yahudi. Tuduhan serupa pernah digunakan pada Yahudi di Damaskus. Dalam pogrom ini, warga Rusia menyerang kaum Yahudi, sementara aparat keamanan tidak melakukan apa-apa. Dalam insiden ini, 47 Yahudi dibunuh. Jumlah ini terasa tidak berarti, namun pada saat itu, pogrom tersebut sangat meresahkan Yahudi Rusia dan sebagian dari mereka meninggalkan negerinya karena menyadari bahwa Rusia tidak lagi bisa dijadikan tempat tinggal yang aman. Lihat: Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 120-121.

¹²² Roth, *loc. cit.*, hlm. 74.

¹²³ Eban (1979), *op. cit.* 144.

¹²⁴ Roth, *loc. cit.* ; Finkelstein., *op. cit.*, hlm. 1642.

¹²⁵ St. John, *op. cit.*, hlm. 39.

¹²⁶ Katz, *op. cit.*, hlm. 63-64.

¹²⁷ Eban (1979), *op. cit.*

idealis, maka sebagian dari mereka meninggalkan Palestina. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi para imigran yang berdedikasi. Salah satu dari mereka ialah David Ben Gurion¹²⁸ yang nantinya akan menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Ben Gurion tiba di Palestina pada September 1906 dan memilih tinggal di Petah Tikvah untuk menjadi buruh tani. Selain bertani, ia juga mulai aktif dalam kehidupan politik yang telah dirintisnya sejak masih tinggal di Polandia¹²⁹.

Departemen Penyerapan Imigran Israel menyatakan bahwa selain para imigran dari Eropa Timur, imigran Yaman juga datang ke Palestina dalam periode *Aliyah* Kedua. Beberapa dari mereka datang karena inisiatif pribadi, sedangkan yang lainnya tiba sebagai hasil perjuangan gerakan HaPoel HaTzair¹³⁰. Sebagian dari imigran Yaman ini tinggal bersama imigran Yaman lain yang telah datang pada masa *Aliyah* Pertama di daerah Jaffa dan Jerusalem. Sedangkan yang lainnya bergabung dalam pemukiman pertanian. Walaupun menghadapi banyak masalah, imigran Yaman ini berhasil berintegrasi secara penuh dengan kehidupan *Yishuv*¹³¹.

Aliyah Kedua mampu mengungguli *Aliyah* Pertama dalam hal kemampuan, inisiatif, dan daya tahan, karena para imigran *Aliyah* Kedua telah belajar dari kesulitan-kesulitan yang terjadi pada masa *Aliyah* Pertama¹³². Mereka mendirikan HaHoresh, kontraktor pertama dalam bidang pertanian. Pada 1909, mereka juga mendirikan HaShomer, sebuah organisasi pertahanan dan keamanan¹³³. HaShomer bertugas melindungi pemukim dari para pencuri dan perampok¹³⁴. Selain itu, HaShomer juga berjuang mendapatkan lapangan pekerjaan bagi imigran Yahudi¹³⁵. David Ben Gurion juga turut membantu pendirian organisasi ini¹³⁶.

¹²⁸ St. John, *op. cit.*

¹²⁹ Eban (1979), *op. cit.*

¹³⁰ HaPoel HaTzair (pekerja muda) ialah sebuah organisasi pekerja yang didirikan oleh A.D. Gordon pada 1904. http://en.wikipedia.org/wiki/Hapoel_Hatzair diakses pada 14/05/2010 pukul 16.13 WIB

¹³¹ http://www.moia.gov.il/Moia_en/AboutIsrael/aliya2.htm, diakses pada 26/08/2009 pukul 8.49 WIB

¹³² Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 688.

¹³³ Roth, *loc. cit.*, hlm. 51.

¹³⁴ Katz, *op. cit.*, hlm. 68.

¹³⁵ Roth, *loc. cit.*, hlm. 846.

¹³⁶ St. John, *op. cit.*

Selain HaHoresh dan HaShomer, pada 1910 para imigran *Aliyah* Kedua juga mendirikan *Kevutzah*, kelompok pertanian kolektif¹³⁷. Deganyah, kelompok *Kevutzah* pertama, dengan bantuan dari *Jewish National Fund* berhasil melakukan percobaan penanaman buah sitrus¹³⁸. Dalam *Kevutzah*, produksi dan pembelian bahan-bahan dan alat-alat pertanian dilakukan secara kolektif sedangkan pemakaiannya didasari oleh pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kemampuan ekonominya. Selain itu, *Kevutzah* juga bertanggung jawab atas masalah rumah tangga, kesehatan, dan pendidikan para anggotanya (*Kevutzim*). *Kevutzah* sangat selektif dalam memilih anggotanya. Kelompok ini juga menjauhkan diri dari hal-hal industri dan mencegah anggotanya untuk bekerja dan menerima upah dari pihak luar (selain *Kevutzah*)¹³⁹.

Imigrasi Yahudi menuju Palestina terus berlangsung hingga tahun 1914. Pada tahun itu Perang Dunia Pertama dimulai¹⁴⁰. Perang menyebabkan situasi keamanan di Eropa memburuk dan secara otomatis mengakibatkan Yahudi Eropa tidak bisa bermigrasi. Pada saat itulah *Aliyah* Kedua dihentikan. Pada 1914, jumlah Yahudi di Palestina mencapai 85.000 jiwa yang 70 persennya berasal dari Eropa Timur¹⁴¹. Roy R. Andersen dalam *Politics & Change in the Middle East: Source of Conflict and Accomodation* juga menyatakan jumlah yang sama. Namun jumlah itu hanya 15 persen dari total populasi Palestina pada saat itu, yang mayoritas merupakan orang Arab¹⁴².

3.3 *Aliyah* Ketiga

Selama Perang Dunia I (PD I) berlangsung, *Aliyah* mengalami kevakuman selama 5 tahun. Seiring dengan berakhirnya PD I, proses *Aliyah* pun dimulai kembali yang menghasilkan *Aliyah* Ketiga yang berlangsung sejak 1919 hingga 1923¹⁴³. Perlu kita ketahui bahwa dalam masa kevakuman tersebut, terdapat suatu momen yang sangat penting bagi kaum Yahudi, yaitu Deklarasi Balfour pada

¹³⁷ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 146.

¹³⁸ Roth, *loc. cit.*, hlm. 51.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 1123-1124.

¹⁴⁰ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 1642.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Roy R. Andersen dkk, *Politics & Change in the Middle East: Source of Conflict and Accomodation*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1982), hlm. 77.

¹⁴³ Roth, *loc. cit.*, hlm. 75.

1917. Di dalam deklarasi itu, Inggris menyatakan akan membantu umat Yahudi mendirikan sebuah tanah air di Palestina. Deklarasi Balfour merupakan titik awal dimana umat Yahudi semakin yakin bahwa sebuah negara Yahudi bagi mereka akan terealisasi, dan hal itu akan didukung oleh pemindahan umat Yahudi menuju Palestina. Jewish Agency didirikan untuk membantu terlaksananya tujuan tersebut¹⁴⁴.

Beberapa minggu setelah deklarasi itu dikeluarkan, Turki dikalahkan oleh pasukan Inggris dalam PD I yang dipimpin oleh Jenderal Sir Edmund Allenby¹⁴⁵. Pada Konferensi San Remo di Italia pada 1920, Inggris mendapatkan mandat atas Palestina. Mandat itu pun disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa. Mandat Inggris memiliki wewenang penuh atas kekuasaan legislatif dan administrasi¹⁴⁶. Janji Inggris dalam Deklarasi Balfour dan Mandat Inggris di Palestina menyebabkan Inggris harus menjamin hak masyarakat Yahudi untuk membangun tanah air bagi mereka di Palestina. Inggris juga harus memudahkan imigrasi Yahudi ke Palestina dan mendukung pemukiman Yahudi di sana¹⁴⁷.

Perang Dunia I mengakibatkan populasi Yahudi di Palestina berkurang menjadi di bawah 80.000 jiwa. Namun begitu pada masa *Aliyah* Ketiga ini sebanyak 35.000 imigran Yahudi memasuki Palestina. Diantara para imigran tersebut ialah Golda Meir, yang nantinya akan menjadi salah satu Perdana Menteri Israel dan *Ahad Ha-Am*¹⁴⁸. Selain karena Deklarasi Balfour dan Mandatori Inggris, *Aliyah* Ketiga juga disebabkan oleh *Pogrom* yang berlanjut di Rusia, Polandia, dan Hungaria. Pada 1919-1921, terjadi pembantaian terhadap sekitar seratus ribu orang Yahudi, termasuk wanita dan anak-anak di daerah perbatasan Polandia-Rusia yang dilakukan secara sistematis oleh pasukan Ukraina dan pasukan pemberontak Rusia. Sedangkan di Hungaria, Rezim Komunis yang saat itu berkuasa melarang kegiatan organisasi Zionis dan meberedel semua media milik Zionis¹⁴⁹. Faktor pemicu lain *Aliyah* ini ialah pergolakan sosial politik pasca

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 1036.

¹⁴⁵ St. John, *op. cit.*

¹⁴⁶ Tadeusz Walichnowski, *Israel and the German Federal Republic*, (Warsawa: Interpress Publishers, 1968), hlm. 7. Lihat : Lampiran 2

¹⁴⁷ St. John, *op. cit.*

¹⁴⁸ Eban, *op. cit.*, hlm. 193.

¹⁴⁹ Katz, *op. cit.*, hlm. 76, 236

PD I dan munculnya negara-negara baru setelah PD I yang memicu rasa kebangkitan nasional para Yahudi muda¹⁵⁰.

Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919 (*Paris Peace Conference of 1919*) yang mengakhiri Perang Dunia I menjamin keadilan bagi seluruh kelompok minoritas di Eropa, termasuk kaum Yahudi. Sayangnya, janji tersebut hanya sekedar omong kosong karena setelah itu pun Yahudi di Eropa Timur tetap mengalami penindasan¹⁵¹. Hal itu menyebabkan mayoritas imigran *Aliyah Ketiga* berasal dari Rusia dan Polandia serta jumlah kecil dari Rumania dan Lithuania¹⁵². *Aliyah* ini membawa banyak *Halutzim*¹⁵³ yang disiapkan untuk membangun negara baru¹⁵⁴. Sama seperti para imigran *Aliyah-Aliyah* sebelumnya, imigran *Aliyah* ini pada awalnya juga mengalami penderitaan. Pemukiman mereka terisolasi dan kecil. Mereka kerap kali kekurangan uang, fasilitas kesehatan, dan kadang-kadang makanan. Namun secara bertahap mereka mengeringkan rawa guna dijadikan lahan pertanian, membangun saluran irigasi, menanam pohon-pohon, dan membangun jalan-jalan. Mereka mencoba membangun jenis masyarakat baru yang mengedepankan ide-ide kuat dan cemerlang, persamaan, dan kesetiaan pada demokrasi dalam berbagai level¹⁵⁵.

Para imigran juga mendirikan pemukiman dan organisasi-organisasi. Belajar dari kesuksesan *Kevutzah*, mereka mendirikan *Kibbutz*, perkampungan kolektif yang menjalankan kegiatan industri bersama dengan pertanian¹⁵⁶. Hal ini terjadi ketika para kelompok pekerja yang melakukan kerja kontrak merasa perlu mengembangkan diri dalam bidang lain, yaitu bidang industri. Tidak seperti *Kevutzah*, *Kibbutz* menghapuskan restriksi dalam hal keanggotaan¹⁵⁷. Sama seperti *Kevutzah*, dalam *Kibbutz*, properti, pemasukan, produksi, dan distribusi

¹⁵⁰ http://www.moia.gov.il/Moia_en/AboutIsrael/aliya3.htm, diakses pada 26/08/2009 pukul 8.49 WIB

¹⁵¹ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 164-165.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Halutzim* adalah orang-orang yang tergabung dalam HeHalutz. HeHalutz merupakan suatu federasi yang digagas oleh gerakan pionir muda Yahudi. Kelompok HeHalutz pertama didirikan di Amerika pada 1915. Setelah PD I, gerakan ini mulai merambah ke Eropa Timur lalu menyebar ke wilayah Eropa lainnya. Pada tahun 1924, seluruh HeHalutz bersatu menjadi organisasi HeHalutz dunia. HeHalutz bertujuan membangun dan memperkuat komunitas Yahudi di Palestina guna terbentuknya Negara Israel. Lihat: Roth, *loc. cit.*, hlm. 880.

¹⁵⁴ Finkelstein., *op. cit.*

¹⁵⁵ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 188-189.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 146.

¹⁵⁷ Roth, *loc. cit.*, hlm. 1126.

dilakukan secara kolektif. Hal itu dilakukan tanpa paksaan. Selain itu, ada pula imigran yang membangun *Moshav*, desa pertanian yang mengkombinasikan mata pencaharian pribadi dengan produksi kolektif¹⁵⁸. Para *Moshavim* (pemukim *Moshav*) memiliki rumah perseorangan dan ladang-ladang kecil. Namun, mereka bekerja sama dalam pembelian alat-alat pertanian dan penjualan produk. Pada masa *Aliyah* ini, sejumlah *Moshavim* yang tidak setuju dengan konsep *Kevutzah* mendirikan pemukiman *Moshav* besar yang dinamakan Nahalal dan Kephav Yehezkel¹⁵⁹. Pada masa ini pula, perkebunan citrus yang digagas pada masa *Aliyah* Pertama menyebar dengan pesat di daerah pesisir dan memfasilitasi pendirian pemukiman pesisir Sharon¹⁶⁰.

Selain bidang pertanian, didirikan pula Histadrut (Federasi Buruh Israel) yang merepresentasikan idealisme buruh. Organisasi ini didirikan pada 1920 dengan anggota awal mencapai 4.400 orang. Histadrut bukan hanya sekedar sebuah organisasi buruh. Oscar I. Janowsky menyatakan bahwa :

*“The Histadrut was one of the unique institution developed in Jewish National Home. It was a labor organization which included industrial and farm workers, the skilled and unskilled, wage-earners, co-operative farmers, “white collar” workers, and members of the liberal professions. The usual trade union efforts relating to organization, bargaining, and labor conflicts occupied its attention. And it won important concessions in collective bargaining, regulation of employment, insurance against industrial accident, paid vacation, separation allowances, and the like. However, its function went far beyond those normally associated with labor organizations. The Histadrut sought to alleviate the effects of illness, old age, and unemployment.”*¹⁶¹

“Histadrut adalah salah satu lembaga yang unik yang dikembangkan Tanah Air Yahudi (Palestina). Ini adalah organisasi buruh yang meliputi para pekerja industrial dan lapangan, yang terampil dan tidak terampil, para pekerja upahan, petani kooperatif, pekerja "kerah putih", dan anggota profesi-profesi liberal. Upaya serikat perdagangan yang berhubungan dengan pengaturan, tawar-menawar, dan konflik tenaga kerja menjadi perhatiannya. Ia juga memenangkan konsesi penting dalam tawar-menawar kolektif, peraturan kerja, asuransi terhadap kecelakaan industri, uang liburan, tunjangan, dan sejenisnya. Namun, fungsinya jauh melampaui yang biasanya dikaitkan dengan organisasi buruh. Histadrut

¹⁵⁸ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 696.

¹⁵⁹ Roth, *loc. cit.*, hlm. 1366.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁶¹ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 697.

juga berusaha mengurangi efek dari penyakit, usia tua, dan pengangguran.”

Pada 1919, didirikan Haganah, sebuah organisasi pertahanan yang menggantikan HaShomer. Anggota awal Haganah mayoritas terdiri dari Legiun Yahudi yang ikut berperang bersama sekutu pada PD I. Haganah berperan sebagai badan pertahanan yang dikerahkan saat keadaan darurat, khususnya masalah konflik dengan Arab¹⁶². Haganah dibentuk sehubungan dengan tidak cukupnya proteksi yang diberikan oleh Inggris kepada warga Yahudi di Palestina¹⁶³.

3.4 *Aliyah Keempat*

Aliyah keempat dimulai sejak tahun 1924. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu berakhirnya *Aliyah* Keempat, yang nantinya juga akan berimbas kepada masa *Aliyah* Kelima. Abba Eban dan situs Departemen Penyerapan Imigran Israel menyatakan bahwa *Aliyah* ini berlangsung pada 1924-1928 dan membawa sekitar 67.000 imigran Yahudi¹⁶⁴. Sedangkan Simon Kuznets dan Cecil Roth menyatakan bahwa *Aliyah* Keempat berlangsung sejak 1924 hingga 1931 dan membawa 82.000 imigran¹⁶⁵. Dari data tersebut, bisa disimpulkan bahwa pada selang perbedaan periode selama 3 tahun, yaitu tahun 1929, 1930, dan 1931 sekitar 15.000 Yahudi datang ke Palestina. Sedangkan sisanya, sebanyak 67.000, datang pada periode 1924-1928.

Pada 1924, imigrasi skala besar menuju Amerika Serikat (AS) dihentikan. Pada tahun itu AS mengeluarkan “*Johnson Immigration Act of 1924*” yang memperketat imigrasi memasuki AS. Kebijakan itu menetapkan suatu sistem kuota yang menyatakan bahwa kuota tahunan imigran yang diizinkan memasuki AS tidak boleh melebihi 2% dari jumlah imigran asing yang lahir di negara asalnya yang datang ke AS pada 1890¹⁶⁶. Kebijakan itu secara tidak langsung merupakan suatu sikap rasis, bahkan bisa dikatakan anti-Semit. Perlu kita ketahui bahwa pada 1890, mayoritas imigran yang datang ke AS berasal dari Eropa

¹⁶² Menachem Begin, *The Revolt: Story of the Irgun*, (New York: Henry Schuman Inc., 1951), hlm. 34.

¹⁶³ Roth, *loc. cit.*, hlm. 814.

¹⁶⁴ Lihat: Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 193.; http://www.moia.gov.il/Moia_en/AboutIsrael/aliya4.htm

¹⁶⁵ Lihat: Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 1642 dan Roth, *loc. cit.*, hlm. 75.

¹⁶⁶ Lears, *op. cit.*, hlm. 622.

Timur, tempat dimana sebagian besar Yahudi Dunia tinggal¹⁶⁷. Hal itu menyebabkan imigran Yahudi yang sebelumnya berbondong-bondong datang ke AS tidak dapat bermigrasi ke AS.

Setelah Perang Dunia I selesai, keadaan kaum Yahudi di negara-negara baru di Eropa Timur seperti Polandia dan Rumania tidak kunjung membaik. Situasi tersebut terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah Polandia mengambil alih industri-industri yang dikuasai oleh kaum Yahudi dan memecat para pekerja Yahudi. Selain itu hampir 2.800 toko sepatu yang dikelola kaum Yahudi ditutup oleh Pemerintah Polandia. Hal itu mengakibatkan kaum Yahudi putus asa dan ingin mencari kampung halaman baru¹⁶⁸. Mengetahui bahwa AS memberikan peraturan ketat bagi para imigran Eropa Timur, mereka bermigrasi menuju Palestina. Dengan datangnya pionir-pionir yang mendirikan pemukiman, komunitas, dan organisasi, umat Yahudi semakin mantap melihat daya tarik Palestina sebagai “*National Home*”.

Pada tahun 1925, saat jabatan Herbert Samuel¹⁶⁹ sebagai Komisaris Besar selesai, 34.000 Yahudi Polandia bermigrasi ke Palestina, guna melarikan diri dari perlakuan anti-Semitisme yang telah dijelaskan sebelumnya¹⁷⁰. Berbeda dengan *Aliyah-aliyah* sebelumnya, para imigran yang tergabung dalam *Aliyah Keempat* ini bukan pionir-pionir idealis yang semata-mata mengabdikan diri di Palestina, melainkan masyarakat kelas menengah dan beberapa kapitalis yang sebelumnya bergerak di bidang perdagangan¹⁷¹. Mereka lebih memilih tinggal di daerah perkotaan, khususnya Tel Aviv, dibanding daerah pedesaan. Mereka menginvestasikan sebagian modal kecilnya di pabrik-pabrik, hotel-hotel kecil, restoran, toko-toko, dan dalam bidang konstruksi. Mereka juga mengembangkan daerah Coastal Plain¹⁷². Universitas Ibrani (*Hebrew University*) di Jerusalem,

¹⁶⁷ Pada masa itu, AS tetap mengizinkan para imigran yang berasal dari Eropa Barat dan Utara untuk memasuki AS. Lihat: Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 162.

¹⁶⁸ Eban (1979), *op. cit.* hlm. 165.

¹⁶⁹ Herbert Samuel ialah Komisaris Besar Inggris pertama di Palestina yang merupakan seorang pemimpin politik dan Zionis. Namun ia juga menampung keluhan-keluhan warga Arab setempat. Ia mampu menempatkan dirinya diantara kaum Yahudi dan Muslim di Palestina dengan baik.

Lihat: Smith, *op. cit.* hlm. 71.

¹⁷⁰ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 189.

¹⁷¹ Roth, *loc. cit.* hlm. 75.

¹⁷² Nili Kadary, “New Aliyah - Modern Zionist Aliyot (1882 - 1948)”,

<http://www.jafi.org.il/education/100/concepts/Aliyah3.html>, diakses pada 14/05/2010 pukul 14.51 WIB

yang dicanangkan sejak tahun 1913 pada Kongres Zionis XI, resmi dibuka pada 1925¹⁷³. Selain itu, sebagian dari mereka juga mendirikan *Moshavim* baru sebagai usaha agrikultur dan berkonsentrasi pada penanaman jeruk. *Aliyah* Keempat sangat berkontribusi dalam memperkuat *Yishuv* selama krisis keuangan yang berlangsung sejak 1926, dimana banyak dari para imigran meninggalkan Palestina¹⁷⁴. Simon Kuznets menyebutkan jumlah imigran yang meninggalkan Palestina pada masa *Aliyah* ini mencapai seperempat jumlah imigran yang datang, atau sekitar 20.500 jiwa¹⁷⁵.

3.5 *Aliyah* Kelima

3.5.1 Kebangkitan Nazi Jerman

Umat Yahudi telah merasakan pahitnya kehidupan diaspora sejak berabad-abad. Mereka tidak diterima di wilayah yang mereka diami. Sejak akhir abad 19, serangkaian penindasan, yang pada akhirnya menciptakan suatu gelombang imigrasi terorganisir ke Palestina, telah mereka rasakan. *Pogrom-pogrom* di Rusia, Rumania, dan negara-negara Eropa Timur lainnya memaksa orang-orang Yahudi meninggalkan negaranya. Saat anti-Semitisme di Rusia sudah sedikit mereda, paham tersebut mulai menjangkit Polandia yang mengusir lebih dari 30.000 Yahudi di sana. Jika kita mengira bahwa serangkaian penindasan terhadap Yahudi saat itu akan segera berakhir, maka hal itu salah, karena suatu kekuatan besar di Eropa Barat akan segera mengambil alih penindasan itu. Penindasan tersebut bahkan jauh lebih buruk dari apa yang pernah dialami umat Yahudi di Rusia.

Pada tanggal 30 Januari 1933 Adolf Hitler –pemimpin partai Nazi– resmi menjadi Kanselir Jerman¹⁷⁶. Beberapa tahun sebelumnya, ia menulis sebuah buku berjudul *Mein Kampf* (Perjuanganku). Dalam bukunya ia menulis:

”The stronger must dominate and not blend with the weaker, thus sacrificing his own greatness. Only the born weakling can view this as cruel.”

¹⁷³ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 189.

¹⁷⁴ http://www.moia.gov.il/Moia_en/AboutIsrael/aliya4.htm diakses pada 26/08/2009 pukul 8.49

WIB

¹⁷⁵ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 1643.

¹⁷⁶ Keller, *op. cit.*, hlm. 437.

“Those who want to live, let them fight; those who do not want to fight, in this world of eternal struggle, do not deserve to live”¹⁷⁷

“Yang lebih kuat harus mendominasi dan tidak berbaaur dengan yang lemah, karena itu akan mengorbankan keagungannya. Hanya orang yang terlahir lemah yang dapat melihat ini sebagai kekejaman.”
 “Mereka yang ingin hidup, biarkan mereka bertarung; mereka yang tidak ingin bertarung, di dunia perjuangan abadi ini, tidak pantas untuk hidup.”

Dalam bukunya itu, ia ingin memimpin Jerman berjuang untuk menjadi bangsa yang paling besar. Ia ingin orang-orang Jerman, yang merupakan ras Aryan, mendominasi dunia. Orang-orang yang dia anggap tidak sederajat, seperti Yahudi dan Slavia tidak boleh bercampur dengan ras Aryan¹⁷⁸.

Segera setelah berhasil memimpin Jerman, ia mulai menjalankan cita-citanya tersebut. Ia dan para petinggi Nazi mengeluarkan sebuah program: menghilangkan seluruh pengaruh Yahudi dari kehidupan politik, budaya, dan ekonomi Jerman, serta pengusiran orang-orang Yahudi dari negara tersebut¹⁷⁹. Selama ini, kaum Yahudi cukup superior dalam kehidupan Jerman. Dari 38 pemenang Nobel yang berasal dari Jerman, 11 diantaranya (hampir 30%) merupakan orang Yahudi. Kaum Yahudi juga berpengaruh dalam bidang sains, sastra, musik, seni, dan drama. Yahudi Jerman juga banyak melahirkan filsuf-filsuf terkenal seperti Mendelssohn, Heine, Wasserman, Buber, dan lainnya¹⁸⁰. Mungkin saja hal-hal tersebut memicu rasa iri Hitler dan rasa takut bahwa suatu saat pengaruh Yahudi akan lebih dominan dari pengaruh orang-orang Jerman sendiri.

Hitler segera menetapkan serangkaian tindakan dan peraturan anti-Semit. Pada Maret 1933, segerombolan Nazi menyerang hakim dan pengacara Yahudi di gedung pengadilan Breslau. Beberapa minggu kemudian, 35 Yahudi dibunuh¹⁸¹. Kemudian pada 1 April tahun yang sama, tentara Jerman melancarkan boikot atas seluruh pengusaha dan pedagang Yahudi di seluruh Jerman. Pada 7 April, Jerman mengeluarkan *“Law for the Restoration of a Professional Civil Right”* yang mewajibkan pengunduran diri bagi seluruh abdi negara yang bukan keturunan ras

¹⁷⁷ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 167., megutip dari Adolf Hitler, *Mein Kampf*.

¹⁷⁸ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 157.

¹⁷⁹ Keller, *op. cit.*

¹⁸⁰ Learsy, *op. cit.*, hlm. 595-596.

¹⁸¹ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 168.

Aryan¹⁸². Nazi bahkan mempunyai Departemen Propaganda, yang pada September 1933 membakar karya-karya sastra terkenal yang ditulis oleh penulis terkenal Yahudi seperti Heinrich Heine, Emile Zola, dan lainnya di depan publik. Mereka juga membakar karya-karya ilmiah Einstein dan Sigmund Freud, yang merupakan ilmuwan Yahudi. Dua tahun kemudian, pada 15 September 1935 parlemen Jerman mensahkan *Nuremberg Laws* yang menetapkan bahwa orang-orang Yahudi bukan merupakan warga negara Jerman lagi¹⁸³. Pernikahan atau hubungan antara Aryan dan Yahudi dilarang. Kaum Yahudi tidak diizinkan memilih dalam hal politik dan juga dilarang bekerja di perkantoran sipil. Mereka juga kehilangan toko-tokonya karena warga Aryan dilarang masuk ke toko-toko yang dikelola Yahudi. Kesulitan ekonomi pun menyerang warga Yahudi. Di tengah-tengah penderitaan dan ketidakadilan yang menimpa warga Yahudi, warga Jerman lainnya tidak melakukan apa-apa. Nazi telah menyebarkan teori ras ke berbagai sekolah dan universitas di Jerman¹⁸⁴.

Sementara Yahudi merasakan berbagai tekanan di dalam Jerman, Nazi juga terus memperluas daerah kekuasaannya. Pada bulan Maret 1938, Nazi berhasil menguasai Austria dengan melancarkan teror-teror dan kecurangan¹⁸⁵. Tiba-tiba, penduduk Yahudi Austria yang berjumlah sekitar 200.000 menemukan diri mereka di bawah kekuasaan Nazi dan mereka mulai merasakan kebrutalannya¹⁸⁶. Sinagog-sinagog dirampok dan ditutup, institusi-institusi umum ditutup, usaha-usaha yang dikelola Yahudi disita, dan para Rabbi dipermalukan. Jumlah rata-rata kematian Yahudi mencapai 150 jiwa per hari. Di tengah-tengah penyiksaan itu, bunuh diri secara mengejutkan sering dijadikan jalan keluar dari masalah ini¹⁸⁷.

Pada tahun yang sama, tentara SS¹⁸⁸ mendeportasi 17.000 Yahudi yang berasal dari Polandia, yang memasuki wilayah Jerman antara 1918-1933. Mereka

¹⁸² Keller, *op. cit.*, hlm. 438.

¹⁸³ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 169. Lihat: Lampiran 3

¹⁸⁴ Keller, *op. cit.*, hlm. 437-438.

¹⁸⁵ Learsy, *op. cit.*, hlm. 597.

¹⁸⁶ Keller, *op. cit.*, hlm. 439.

¹⁸⁷ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 281.

¹⁸⁸ SS (Schutzstaffel) merupakan unit pertahanan yang awalnya merupakan pengawal pribadi Hitler. SS kemudian ditransformasi menjadi tentara Nazi Jerman bersamaan dengan SA (Sturmabteilung). SS turut andil dalam pembantaian Holocaust. Lihat: James Taylor, Warren Shaw, *A Dictionary of the Third Reich*. (London: Grafton Books, 1988), hlm. 330.

dibawa ke perbatasan Polandia, namun Warsawa menolak menerima kembali Yahudi tersebut. Sekitar 5.000 Yahudi terdampar di perbatasan tanpa tempat perlindungan. Diantara mereka adalah suami-istri Grünspan. Saat anak mereka yang tinggal di Paris, Herschel Grünspan, mendengar berita ini, ia menjadi sangat marah. Pada 7 November 1938, ia pergi menuju Kedutaan Besar Jerman dan menembak Atase Kedutaan Ernst von Rath yang menyebabkannya luka parah¹⁸⁹. Kejadian ini dimanfaatkan Hitler sebagai propaganda terhadap kaum Yahudi. Pada malam 9-10 November Hitler melancarkan aksi pengerusakan terhadap Yahudi yang terkenal dengan nama *Kristallnacht (Night of Broken Glass)*. Hampir seluruh sinagog di Jerman dihancurkan dan dibakar, rumah-rumah orang Yahudi dihancurkan, usaha dan toko Yahudi dirampas dan dibakar. Sekitar 30.000 Yahudi ditahan dan dibawa ke kamp konsentrasi. Bukan hanya itu saja, Nazi juga memaksa warga Yahudi membayar denda guna menutupi kerusakan aksi tersebut¹⁹⁰.

3.5.2 Imigrasi Skala Besar

Warga Yahudi Jerman yang hak-haknya dirampas sejak Hitler berkuasa, tidak mendapatkan dari mayoritas warga Jerman lainnya. Akhirnya, mereka menemukan sebuah solusi untuk lari dari kekejaman Nazi, yaitu dengan beremigrasi meninggalkan negaranya. Sebelumnya, kehidupan Yahudi di Jerman jarang mendapatkan masalah. Saat kaum Yahudi di Rusia merasakan kekejaman *Pogrom*, Yahudi Jerman masih bisa hidup dengan tentram. Saat kaum Yahudi ditindas di Polandia akibat undang-undang anti-Yahudi, Yahudi Jerman masih bisa merasakan persamaan hak diantara warga Jerman. Saat-saat itu merupakan saat dimana Yahudi Jerman dapat hidup normal dan tidak harus beremigrasi ke negara lain atau melakukan *Aliyah*.

Sayangnya, masa-masa itu sudah berakhir. Dengan berkuasanya Hitler dan partainya, *Nationalsozialistische*, warga Yahudi Jerman yang pada 1933 berjumlah 503.700¹⁹¹ jiwa dipaksa untuk memilih kehidupan kejam di Jerman atau meninggalkan Jerman guna mencari kehidupan lain yang lebih baik. Pilihan

¹⁸⁹ Keller, *op. cit.*, hlm. 440.

¹⁹⁰ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 170.

¹⁹¹ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 428.

kedua itu dimanfaatkan oleh banyak dari warga Yahudi tersebut. Pada akhir 1937, 118.000 Yahudi telah meninggalkan Jerman. Dari jumlah tersebut, sebanyak 47.000 berimigrasi ke Palestina¹⁹², 15.000 ke Amerika Serikat, 21.000 ke Amerika Selatan, 4.000 ke Afrika Selatan, dan sisanya tersebar di Prancis, Inggris, Belgia, Belanda, Cekoslovakia, Austria, Italia, dan negara-negara Skandinavia¹⁹³.

Aliyah Kelima awalnya dimulai oleh datangnya arus kecil imigran pada 1929 ke Palestina yang dipicu oleh rasa nasionalisme. Setelah itu barulah berbondong-bondong arus imigran Yahudi datang seiring dengan bangkitnya Nazi di Eropa¹⁹⁴. Jumlah Yahudi Jerman yang berimigrasi ke Palestina memberi ciri khas tersendiri pada *Aliyah Kelima* yang berlangsung sejak 1929¹⁹⁵ hingga 1939. Sebelumnya, tidak pernah ada arus imigrasi besar-besaran dari Jerman ke Palestina. Hingga 1931, jumlah imigran Yahudi Jerman dan Austria yang datang ke Palestina hanya berjumlah 1.800¹⁹⁶. Namun jumlah itu dibantah oleh Rufus Learsy. Dalam bukunya *Israel: A History of Jewish People* ia menyatakan bahwa hingga tahun 1938, dari 150.000 Yahudi yang meninggalkan Jerman, hanya 35.000 yang menuju ke Palestina¹⁹⁷. Tetapi jumlah itu pun masih tergolong besar jika dibandingkan dengan jumlah *Olim* Jerman sebelumnya. Setelah tiba di Palestina, 80 % para imigran Yahudi Jerman tinggal di daerah perkotaan seperti Tel Aviv. Sebagian besar bergerak di bidang kedokteran dan profesi akademis lainnya. Para imigran ini membawa kontribusi bagi kehidupan *Yishuv*. Keahlian dan pengalaman mereka mampu menaikkan standar bisnis dan memperbaiki fasilitas-fasilitas perkotaan¹⁹⁸.

Meski Jerman menyumbangkan sejumlah besar imigran Yahudi pada *Aliyah Kelima*, imigran yang berasal dari Polandia dan Rumania masih

¹⁹² Lihat: Lampiran 4

¹⁹³ Keller, *op. cit.*, hlm. 438.

¹⁹⁴ http://www.moia.gov.il/Moia_en/AboutIsrael/aliya5.htm diakses pada 26/08/2009 pukul 8.49 WIB

¹⁹⁵ Pada pembahasan *Aliyah Keempat*, telah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan tentang berakhirnya masa *Aliyah Keempat* di antara sumber-sumber yang digunakan. Sebagian menyebutkan tahun 1928, dan yang lainnya 1931. Hal itu tentu akan menimbulkan perbedaan pada tahun awal *Aliyah Kelima*. Namun dari sumber-sumber yang dikumpulkan sebagian besar menyebutkan bahwa *Aliyah Keempat* berakhir pada 1928.

¹⁹⁶ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 1644.

¹⁹⁷ Learsy, *op. cit.*, hlm. 598.

¹⁹⁸ Nili Kadary, *loc. cit.*

mendominasi¹⁹⁹. Penindasan terhadap kaum Yahudi di Eropa Timur tidak kunjung berakhir. Di Polandia, aturan-aturan yang merugikan Yahudi di berlakukan. Bahkan, kelompok Beck²⁰⁰ memberlakukan metode dan ideologi Nazi dalam kehidupan politik Polandia²⁰¹. Keadaan di Rumania tidak jauh berbeda. Pemerintah Rumania berpaling melawan kaum Yahudi. Banyak Yahudi dipenjara dan disiksa, sedangkan pemerintah menetapkan pelarangan bagi mahasiswa dan siswa Yahudi untuk memasuki tempat-tempat sosial²⁰².

Berbagai sumber menyatakan bahwa jumlah imigran yang datang pada *Aliyah Kelima* ini mencapai 250.000 jiwa²⁰³. Sejak 1932-1935, 44.000 Yahudi tiba di Palestina, 62.000 diantaranya datang pada 1935. Pada 1936-1938, 53.000 tiba, dan pada 1939-1940 sebanyak 36.000 datang termasuk 15.000 imigran ilegal²⁰⁴. Pada 1933, pelabuhan Haifa yang merupakan pelabuhan modern pertama di Palestina, selesai dibangun. Sedangkan daerah pemukiman Jerusalem terus diperluas. Para imigran-imigran seniman yang berasal dari Jerman dan Austria mendirikan Orkestra Filharmonik. Sedangkan sebagian kecil imigran berkontribusi dalam mendirikan pemukiman *Moshav* dan *Kibbutz* baru²⁰⁵.

Dalam periode *Aliyah Kelima*, sebuah organisasi bernama *Youth Aliyah* didirikan oleh Henrietta Szold, seorang Zionis wanita yang mendirikan Hadassah²⁰⁶. *Youth Aliyah*, yang didirikan pada 1933, mengorganisir penyelamatan anak-anak Yahudi dari Nazi dan Holocaust menuju Palestina. Saat Perang Dunia II berakhir pada 1945, *Youth Aliyah* berhasil menyelamatkan sekitar 17.000 anak-anak Yahudi²⁰⁷, walaupun sebagian besar orang tua mereka

¹⁹⁹ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 1643.

²⁰⁰ Kelompok Beck ialah sebuah kelompok yang dipimpin oleh Józef Beck, seorang anggota militer Polandia. Sejak Perang Dunia I berakhir, Beck menentang pakta yang menegaskan setiap Negara harus menjaga kaum minoritasnya. Beck memperdebatkan bahwa saat PBB meminta Polandia dan Cekoslovakia untuk menghormati warga minoritas Jerman yang ada di negaranya, warga Polandia yang ada di Jerman dan di Uni Soviet ditindas. Sejak itu Beck berusaha menjaga dan mengedepankan warga Polandia di negaranya dengan menjauhkan pengaruh-pengaruh asing seperti Yahudi. http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Beck diakses pada 20/05/2010 pukul 14.18 WIB

²⁰¹ Keller, *op. cit.*, hlm. 439.

²⁰² Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 165.

²⁰³ Jumlah ini dikemukakan oleh: Eban, *op. cit.*, hlm. 193; Rahiem, *loc. cit.*, hlm. 59; Kadari, *loc. cit.* dan situs Departemen Luar Negeri Israel

²⁰⁴ Roth, *loc. cit.*, hlm. 75-76.

²⁰⁵ Kadary, *loc. cit.*

²⁰⁶ Organisasi Zionis Wanita Amerika

²⁰⁷ Learsy, *op. cit.*, hlm. 651.

terpaksa tetap tinggal di daerah kekuasaan Nazi. Organisasi ini bukan hanya menangani pemindahan anak-anak tersebut menuju Palestina tetapi juga membantu membangun kehidupan baru bagi mereka. Szold juga berusaha memperbaiki sarana kesehatan di Palestina²⁰⁸ karena umumnya para imigran yang melarikan diri dari Nazi membutuhkan perawatan medis.

3.6 *Aliyah Bet*

3.6.1 Holocaust

Sejak kebangkitannya pada 1933, Nazi berhasil mencaplok wilayah negara-negara di sekitarnya. Sampai saat itu, Prancis dan Inggris tidak mencoba untuk menghentikan Hitler. Mereka takut sebuah perang besar lain akan terjadi. Hitler pun terus melancarkan serangannya terhadap wilayah yang ingin ia kuasai. Hingga pada 1 September 1939, atas perintah Hitler, Nazi menyerang Polandia. Hal itu dengan cepat membawa perubahan bagi kehidupan politik dan sosial di Eropa Timur. Prancis dan Inggris akhirnya menyatakan perang atas Jerman. Sejak saat itu pun Perang Dunia II (PD II) dimulai²⁰⁹. Lalu Soviet dan Jerman meyeepakati pembagian wilayah Polandia. Wilayah barat dimana terdapat 2.000.000 penduduk Yahudi diduduki oleh Jerman, sedangkan wilayah timur yang memiliki populasi Yahudi sebanyak 1.250.000 jiwa diduduki oleh Soviet. Warga Yahudi Polandia dalam sekejap berada di dalam kekuasaan Nazi. Sekitar 250.000 Yahudi wilayah barat melarikan diri dari menuju wilayah timur²¹⁰. Setelah itu, tidak ada Yahudi lagi yang bisa melarikan diri ke wilayah pendudukan Soviet karena Nazi telah menutup perbatasan. Nazi pun mulai menciptakan tekanan-tekanan bagi warga Yahudi di sana. Sebuah pemerintahan Nazi, *Generalgouvernement*, didirikan di Polandia. Pada November 1939, warga Yahudi diharuskan memakai pita (*badge*) kuning di lengannya. Itu merupakan diskriminasi sebagai pembeda antara Yahudi dan non-Yahudi. Eksekusi dan pengusiran warga Yahudi dari kota-kota kerap dilakukan. Ghetto-ghetto dibangun untuk warga Yahudi, dan yang terbesar terletak di Warsawa²¹¹.

²⁰⁸ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 182.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 159-160.

²¹⁰ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 366-367.

²¹¹ Keller, *op. cit.*, hlm. 441.

Pada pertengahan September 1939, Nazi mengadakan sebuah proyek pembangunan rel kereta api. Sekitar 1.400.000 Yahudi Polandia dan Jerman dijadikan buruh paksa proyek tersebut. Saat itu, mereka belum menyadari bahwa apa yang mereka bangun merupakan salah satu alat penting bagi pembinasan kaumnya. Segera setelah proyek rel tersebut selesai, warga Yahudi digiring ke kamp-kamp konsentrasi yang akan membawa mereka kepada kematian. Harapan hidup di kamp tersebut berkisar antara enam minggu sampai 3 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, mereka bisa mati ditembak, kelaparan dan bekerja paksa sampai mati atau mati karena gas beracun. Pembunuhan dengan gas beracun telah menelan sekitar 100.000 Yahudi dan pada Agustus 1941 sempat dihentikan karena protes dari Gereja. Namun, euthanasia yang diterapkan Nazi kepada Yahudi tidak begitu saja berhenti. Pada saat itu mereka mulai membunuh para Yahudi yang terlalu lemah untuk menjadi buruh paksa. Pada akhir tahun 1941, Nazi menginvasi sebagian wilayah Soviet. Di wilayah tersebut, terdapat 4.000.000 Yahudi dimana 2.500.000 berhasil melarikan diri sebelum Nazi datang. Nazi tidak menunggu lama untuk melancarkan pembasmian mereka terhadap Yahudi Soviet. Dalam kurun Oktober-Desember 1941, Nazi telah membunuh 300.000 Yahudi Soviet²¹².

Kebrutalan Nazi terus menjadi-jadi hingga pada 20 Januari 1942 SS mengumumkan sebuah program bernama “*Final Solution*” . Isi program itu singkat : Pembasmian seluruh Yahudi yang hidup di Eropa. Kamp-kamp konsentrasi, atau yang lebih sering disebut “*Death Camps*” dibangun di Auschwitz, Bergen-Belsen, Treblinka, Mauthausen, Majnanek, Sobibor, Dachau, dan Buchenwald²¹³. Pembunuhan di wilayah Uni Soviet juga terus berlangsung:

“Quite small groups of killers disposed of enormous numbers. In Riga, one officer and 21 men killed 10.600 Jews. In Kiev, two small detachments killed over 300.000. A second sweep began at the end of 1941 and lasted throughout 1942. This killed 900.000. Most Jews murdered by shooting, , outside towns, at ditches turned into graves.”²¹⁴

²¹² Paul Johnson, *A History of the Jews*, (New York: Harper & Row Inc., 1988), hlm. 490-493.

²¹³ Keller, *op. cit.*, hlm. 443.

²¹⁴ Johnson, *op. cit.*, hlm. 494.

“Sejumlah kelompok-kelompok kecil mampu membunuh dalam jumlah banyak. Di Riga, satu perwira dan 21 orang lainnya membunuh 10.600 Yahudi. Di Kiev, satu detasemen membunuh 300.000 orang. Pembantaian kedua dimulai pada akhir 1941 hingga 1942. Pada masa itu, 900.000 Yahudi dibunuh, sebagian besar dengan ditembak, dan parit-parit diubah menjadi kuburan masal.”

Final Solution terus berlangsung hingga pada musim gugur 1944. Himmler, orang paling berpengaruh di Nazi setelah Hitler, memerintahkan penghentian program tersebut. Saat itu, kekuatan Nazi sudah lemah. Soviet berhasil mengusir Nazi dari wilayahnya dan pada bulan-bulan terakhir PD II pihak Sekutu mengevakuasi Yahudi yang tersisa kamp-kamp konsentrasi. Sebagian dari mereka mati karena terlalu lemah²¹⁵. Saat PD II selesai, penghitungan jumlah korban Yahudi yang dibunuh oleh Nazi menghasilkan angka-angka yang mengejutkan. Höss, komandan kamp Auschwitz, pada pengadilan pasca-perangnya mengatakan bahwa 2.500.000 korban dieksekusi dengan gas beracun dan dibakar hidup-hidup. Sedangkan setengah juta lainnya mati akibat kelaparan dan penyakit²¹⁶. Korban-korban di kamp-kamp lain juga menunjukkan angka yang besar. Kamp Majdanek menelan 1.380.000, Treblinka 800.000, Bergen-Belsen 600.000, Chelmno 340.000, dan 250.000 di Sobibor²¹⁷. Jumlah keseluruhan korban Yahudi yang mati di tangan Nazi sekitar 6.000.000 jiwa. Pembantaian tersebut dikenal dengan istilah *Holocaust*. Berikut tabel jumlah korban *Holocaust*:

²¹⁸

Negara	Populasi Yahudi September 1939	Jumlah Korban Holocaust	Persentasi Jumlah Korban Holocaust
Polandia	3.300.000	2.800.000	85 %
Uni Soviet	2.100.000	1.500.000	71,4 %
Rumania	850.000	425.000	50 %

²¹⁵ Keller, *op. cit.*, hlm. 445.

²¹⁶ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 172.

²¹⁷ Johnson., *op. cit.*, hlm. 497-498.

²¹⁸ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 1534. Diambil dari *Balance Sheet of Extermination* oleh Jacob Lestschinsky, *Jewish Affairs*, Vol.I, No. 1, 1 Februari 1946. Dikeluarkan oleh *Office of Jewish Information, American Jewish Congress*.

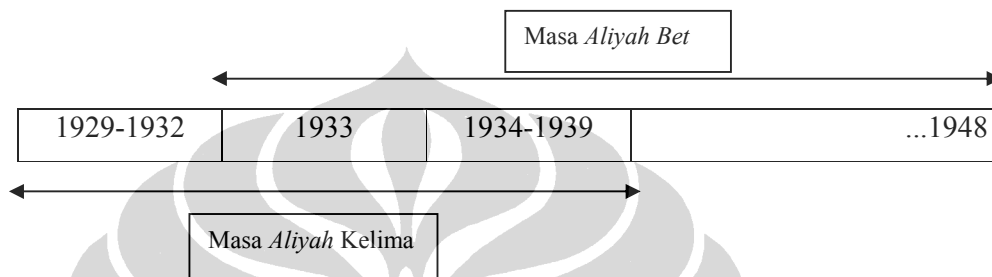
Hungaria	404.000	200.000	49,5 %
Cekoslovakia	315.000	260.000	82,5 %
Prancis	300.000	90.000	30 %
Jerman	210.000	170.000	81 %
Austria	60.000	40.000	66,6 %
Lithuania	150.000	135.000	90 %
Belanda	150.000	90.000	60 %
Latvia	95.000	85.000	89,5 %
Belgia	90.000	40.000	44,4 %
Yugoslavia	75.000	55.000	73,3 %
Yunani	75.000	60.000	80 %
Italia	57.000	15.000	26,3 %
Bulgaria	50.000	7.000	14 %
Lain-lain*	20.000	6.000	30 %
Total	8.301.000	5.978.000	72 %

* Mencakup Denmark, Estonia, Luxemburg, Norwegia, dan Danzig

3.6.2 Munculnya Gelombang Imigrasi Ilegal ke Palestina

Seiring dengan munculnya kekuatan Nazi yang dipimpin Hitler pada 1933, kehidupan Yahudi di Eropa mulai terancam. Hitler mulai melakukan penindasan terhadap kaum Yahudi Jerman. Melihat hal itu, kaum Yahudi di negara Eropa lain mulai waspada akan bahaya yang mengancam mereka. Sebagian dari mereka meninggalkan negaranya demi alasan keamanan, begitu pun dengan warga Yahudi Jerman. Mayoritas imigran tersebut memilih berimigrasi ke Palestina. Selama *Aliyah Kelima*, sekitar 250.000 imigran berhasil memasuki Palestina. Namun saat itu, Inggris memperketat imigrasi menuju Palestina. Akibatnya, kebutuhan Yahudi Eropa lain untuk melakukan *Aliyah* tidak dapat terpenuhi. Hal itu menimbulkan munculnya imigrasi ilegal menuju Palestina, yang dinamakan *Aliyah Bet*.

Imigrasi ini dinamakan *Aliyah Bet* karena pada waktu yang bersamaan berlangsung pula imigrasi legal (*Aliyah Alef*)²¹⁹. Alef “א” merupakan huruf pertama dalam alfabet Ibrani, sedangkan Bet “ב” ialah huruf kedua. *Aliyah* ini juga biasa disebut dengan *Ha'apalah* dan berlangsung pada 1933-1948²²⁰. Pada masa tersebut *Aliyah Kelima* juga sedang berlangsung, namun pada saat yang sama pula *Aliyah Bet* mulai muncul.



Pada awalnya, *Aliyah Bet* dilakukan sebagai tuntutan atas hak umat Yahudi untuk bermukim di Palestina²²¹. Pada tahun 1934, karena telah melihat kekerasan yang dilakukan Nazi terhadap Yahudi Jerman, gerakan Hehalutz dan Revisionis Polandia menyewa *Vellos*, sebuah kapal dari Yunani untuk mengangkut 350 imigran Yahudi menuju Palestina²²². *Aliyah Bet*, yang mayoritas dari Polandia, mulai terjadi dalam skala besar pada 1938, terutama atas bantuan dari gerakan *Kibbutz* dan *haganah*²²³.

Pada Mei 1939, Inggris mengeluarkan *White Paper*²²⁴ yang salah satu poinnya berisi :

“Ditetapkan untuk memberi izin kepada hanya 75.000 orang Yahudi untuk pindah ke Palestina dalam masa lima tahun, yaitu antara tahun 1939 sampai 1944. Sesudah tahun 1944 dilarang sama sekali pemindahan orang-orang Yahudi ke Palestina.”

Perang Dunia yang mulai berkecamuk pada saat itu mengancam keamanan warga Eropa khususnya kaum Yahudi. Dengan adanya *White Paper*, keinginan kaum

²¹⁹ Elihu Bergman, “History of Aliyah Bet: Facing the British Blockade with Rusty Ships”, http://Israelvets.com/facing_british_blockade.html, diakses pada 23/05/2010 pukul 17.42 WIB

²²⁰ Rahiem (2006), *loc. cit.*, hlm. 59.

²²¹ Bergman, *loc. cit.*

²²² Kadary, *loc. cit.*

²²³ Roth, *loc. cit.*, hlm. 1238.

²²⁴ Lihat: Lampiran 5

Yahudi Eropa untuk melarikan diri dari kekuatan Nazi yang berkuasa saat itu menemui kebuntuan. Pembatasan kuota tersebut mendorong banyaknya imigran Yahudi datang ke Palestina secara ilegal. Namun pada kenyataannya, situasi dan kondisi selama PD II tidak memungkinkan kaum Yahudi Eropa untuk melakukan imigrasi secara ilegal meskipun saat itu mereka terdesak oleh kebutuhan akan rasa aman yang tidak mereka dapatkan di negerinya.

Pada 1939-1940 hanya sekitar 15.000 imigran Yahudi ilegal yang datang ke Palestina²²⁵. Setelah PD II berakhir, barulah para imigran Yahudi Eropa datang ke Palestina dalam jumlah besar. Pada 1939, Haganah membentuk suatu organisasi tambahan yang bernama HaMossad LeAliyah Bet. Selama PD II, Mossad menfokuskan usaha penyelamatan orang-orang Yahudi dari Yunani, Bulgaria, dan Rumania baik secara legal maupun ilegal, melalui rute darat melewati negara-negara Arab²²⁶. Seperti yang tertera pada namanya, organisasi ini memang dikhususkan mendukung terlaksananya *Aliyah Bet*. HaMossad LeAliyah Bet memfasilitasi para Yahudi Eropa untuk berimigrasi ke Palestina secara ilegal, khususnya setelah PD II.

Pada Agustus 1945 setelah PD II berakhir, Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman meminta Pemerintah Inggris untuk mengizinkan 100.000 pengungsi Yahudi Eropa memasuki Palestina²²⁷. Pada saat itu, kondisi daerah-daerah di Eropa pasca-perang sangat mengenaskan. Setelah Perang Dunia II berakhir, Eropa Timur –tempat berkembangnya sebagian besar gerakan Yahudi– kehilangan tiga perempat penduduk Yahudinya. Dengan kepergian mereka, hilang pula sebagian besar kekayaan tradisi Yahudi, warisan budaya Yahudi, dan pemikiran inovatif yang berkembang pada abad 19²²⁸. Polandia merupakan negara yang paling menderita saat itu. Setelah kehilangan sekitar 3.000.000 populasinya selama Holocaust, kaum Yahudi Polandia terlantar dan tidak lagi memiliki kehidupan di sana. Bangunan-bangunan dan rumah-rumah mereka hancur. Keputusan menyelimuti para Yahudi yang selamat dari Holocaust. Mereka kehilangan tempat tinggal, anggota keluarga, harta benda, tanah air, serta

²²⁵ Roth, *loc. cit.*, hlm. 76.

²²⁶ <http://www.palyam.org/English/HaMossad/mainpage> diakses pada 24/05/2010 pukul 18.29

WIB

²²⁷ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 701.

²²⁸ *Ibid.*, hlm. 1575.

semangat untuk melanjutkan hidup setelah apa yang menimpa kehidupan Yahudi selama Holocaust. Yang mereka inginkan ialah suatu tempat di mana mereka bisa mendapatkan kehidupan baru untuk melanjutkan kehidupan tanpa rasa was-was. Tempat di mana mereka diterima sepenuhnya. Mereka menginginkan suatu “rumah” di mana dapat bergabung dengan kaumnya. *Ha’apalah* atau imigrasi ilegal merupakan jalan terakhir untuk mewujudkan impian tersebut

Para Yahudi yang selamat dari Holocaust tinggal di kamp-kamp pengungsi (*Displeced Person Camps*). Jumlah populasi di kamp-kamp tersebut terus bertambah. Pada Januari 1946, populasinya sebanyak 80.000 jiwa dan pada Januari 1947, populasinya bertambah menjadi 256.000 jiwa²²⁹. Para pengungsi Yahudi tersebut sudah tidak melihat harapan untuk membangun kehidupan di Eropa Timur. Hanya segelintir Yahudi Polandia dan Baltik yang ingin kembali ke negara asalnya. Palestina menjadi pilihan utama untuk membangun kembali kehidupan mereka yang telah hancur selama Holocaust²³⁰.

Sayangnya, Inggris menolak permintaan Amerika untuk mengizinkan para pengungsi Yahudi memasuki Palestina. Inggris tetap tegas dalam menjalankan peraturan-peraturannya, termasuk *White Paper 1939*. Hal ini membuat organisasi-organisasi Yahudi berang. Pada Juni 1946, Haganah yang sebelumnya tidak melakukan aksi kekerasan terhadap Inggris, meledakkan jembatan-jembatan strategis di perbatasan Palestina dan merusak rel-rel kereta api yang sedang dibangun. Inggris membalasnya dengan penahanan masal termasuk menahan para petinggi *Jewish Agency* dan *National Council*²³¹. Hal itu memicu tindakan anarki lainnya. Pada bulan Juli tahun yang sama, Irgun Zvai Leumi²³² meledakan Hotel King David di Jerusalem yang merupakan markas Administrasi Sipil Inggris. Insiden itu menewaskan sekitar 90 orang termasuk pegawai dan pejabat Inggris dan pelayan Arab dan Yahudi, dan sekitar 70 orang lainnya luka-luka²³³.

²²⁹ Learsy, *op. cit.*, hlm. 659.

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 658.

²³¹ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 702.

²³² Irgun Zvai Leumi (Organisasi Militer Nasional) didirikan pada tahun 1937 oleh para anggota *Betar* dan Gerakan Revisionis Zionis (GRZ). Irgun mengadopsi ajaran-ajaran Vladimir Jabotinski (pendiri GRZ). Irgun percaya bahwa umat Yahudi tidak akan pernah memperoleh kemerdekaan kecuali mereka siap untuk bertarung dan berjuang untuk itu. Tujuan awal *Irgun* ialah pembalasan terhadap serangan-serangan Arab. Namun, semenjak *White Paper* diterbitkan, penguasa-penguasa Inggris menjadi target serangannya. Lihat: Begin, *op. cit.*, hlm. 3 dan Roth., *loc. cit.*, hlm. 967.

²³³ Keller, *op. cit.*, hlm. 452-453.

Sementara itu, usaha untuk melancarkan *Aliyah Bet* tetap dilaksanakan. Sebuah organisasi bernama *Berihah* (pelarian) yang terdiri dari partisan dan para pejuang Ghetto Warsawa berusaha menyelundupkan orang-orang Yahudi dari Polandia dan Eropa Timur ke pelabuhan-pelabuhan Italia. Dari sana mereka pergi menuju Palestina²³⁴. Antara 1945-1946, 95.000 Yahudi berhasil dilarikan dari Eropa dan 23.000 diantaranya berhasil mencapai Palestina yang sebagian besar diangkut dari Italia

Sementara itu, Mossad mengorganisir 68 kapal untuk membawa lebih dari 73.000 imigran ilegal menuju Palestina. 10 dari kapal tersebut ialah kapal Amerika yang membawa 31.000 imigran Yahudi²³⁵. Sayangnya, sebagian kapal tersebut dihadang oleh pasukan Inggris dan dideportasi ke Siprus. Setelah Mandatori Inggris atas Palestina berakhir, barulah para imigran tersebut diizinkan memasuki Palestina²³⁶. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, selama 16 tahun masa *Aliyah Bet*, sebanyak 110.000 imigran Yahudi ilegal berhasil tiba di Palestina²³⁷.

3.6.3 Tragedi *Aliyah Bet*

Selama masa *Aliyah Bet*, banyak imigran Yahudi yang menggunakan jalur laut sebagai sarana menuju Palestina. Setelah Inggris memperketat imigrasi menuju Palestina melalui *White Paper 1939*, banyak kapal-kapal yang membawa imigran Yahudi ilegal dihadang dan dideportasi oleh Inggris. Diantara insiden-insiden tersebut, terdapat tiga tragedi yang paling terkenal. Masing-masing tragedi tersebut dikenang dengan nama kapalnya.

3.6.3.1 Patria

Pada September 1940, dua buah kapal yang mengangkut imigran Yahudi ilegal Eropa diberangkatkan dari Rumania menuju Palestina. Kapal tersebut ialah *Milos* dan *Pacific*. Saat berhasil mencapai perairan Mediterania, mereka ditahan

²³⁴ Rahiem (2006), *loc. cit.*

²³⁵ Bergman, *loc. cit.* Lihat: Lampiran 6

²³⁶ Keller, *op. cit.*, hlm. 453.

²³⁷ Rahiem (2006), *loc. cit.*

oleh Angkatan Laut Inggris dan digiring menuju Haifa, Palestina²³⁸. Sir Harold McMichael, Komisaris Besar Inggris, mengumumkan bahwa para imigran ilegal yang sudah berhasil mencapai Palestina tidak akan dikirim kembali ke Eropa, tapi akan dikirim ke Mauritius. Dia menambahkan bahwa mereka akan dikembalikan ke Eropa setelah perang berakhir²³⁹. Karena Milos dan Pasific terlalu terlalu kecil dan tidak layak untuk melakukan pelayaran jauh menuju Mauritius, Inggris menyiapkan Patria, sebuah kapal besar yang ditujukan untuk mendeportasi penumpang dari Milos dan Pasific menuju Mauritius. Pada 24 November 1940 –beberapa hari sebelum keberangkatan Patria menuju Mauritius– sebuah kapal yang membawa imigran Yahudi ilegal, bernama Atlantic, tiba di pelabuhan Haifa. Inggris juga bermaksud memindahkan para penumpang Atlantic menuju Patria²⁴⁰.

Sehari kemudian, sebuah ledakan bom terjadi di dalam Patria. Saat itu terdapat sekitar 1800 penumpang di dalamnya. Insiden itu menenggelamkan Patria beserta 202 imigran dan 50 kru kapal dan polisi. Ledakan itu diduga diorganisir oleh sebuah organisasi Yahudi sebagai perlawanan yang bertujuan untuk menunda pendeportasian para imigran ilegal tersebut²⁴¹. Pihak berwenang Inggris menegaskan bahwa pemboman itu bukan diorganisir oleh Irgun yang biasa melancarkan aksi teror, tetapi oleh Haganah²⁴². Setelah tragedi itu, Inggris bersikeras untuk tetap membawa penumpang yang selamat dari ledakan menuju Mauritius. Namun hal itu memancing opini negatif publik atas keputusan Inggris tersebut. Akhirnya pada 5 Desember 1940, Inggris mengumumkan bahwa para penumpang tersebut tidak akan dideportasi ke Mauritius sebagai dispensasi dan belas kasih atas tragedi Patria²⁴³.

3.6.3.2 Struma

Struma adalah sebuah kapal kecil yang membawa 769 imigran ilegal Yahudi dari Rumania menuju Palestina²⁴⁴. Peristiwa ini dimulai pada 1938 saat

²³⁸ Eva Feld, "The Story of the S/S Patria", <http://www.jewishmag.co.il/46mag/patria/patria.htm> diakses pada 23/05/2010 pukul 19.34

²³⁹ Begin, *op. cit.*, hlm. 35.

²⁴⁰ Feld, *loc. cit.*

²⁴¹ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 1483.

²⁴² Begin, *op. cit.*, hlm. 36.

²⁴³ Feld, *loc. cit.*

²⁴⁴ Learsy, *op. cit.*, hlm. 662.

Iron Guard, sebuah legiun Rumania menjadi pengikut Hitler dan menyebarkan anti- Semitisme ke seluruh pelosok Rumania. Mereka mengancam akan membunuh setiap Yahudi yang ada di Rumania. Untuk menghindari hal ini, Perdana Menteri Rumania, Armand Calinescu, memaksa 50.000 warga Yahudi untuk meninggalkan Rumania per tahun demi alasan keamanan. Pada 28 Januari 1940, Meir Ebner, direktur Organisasi Imigran Rumania meohon Winston Churchill untuk mengizinkan warga Yahudi Rumania datang ke Palestina. Beberapa hari kemudian Chaim Weizmann meminta Churchill untuk setidaknya mengizinkan 40.000 Yahudi Rumania memasuki Palestina. Namun Churchill menolak kedua permohonan tersebut. Antara tahun 1940 dan 1941, sekitar 150.000 Yahudi Rumania dibunuh. Rumania sudah tidak bias lagi dijadikan tempat tinggal bagi warga Yahudi²⁴⁵.

Setelah itu, agen-agen Yahudi mencoba membeli kapal apa saja yang bisa mereka dapatkan saat itu. Mereka membeli Makedonia, sebuah kapal kecil pengangkut ternak. Nama kapal itu diubah menjadi Struma yang dimaksudkan untuk membawa 350-400 penumpang. Namun pada kenyataannya, Struma membawa 778 orang termasuk awak kapal. Pada Desember 1941, Struma berangkat dari Rumania menuju Palestina²⁴⁶. Tak lama kemudian saat berada di dekat perairan Istanbul, mesin kapal mati. Tiga hari kemudian pasukan Turki menarik Struma menuju Istanbul. Selama 74 hari Struma terdampar di Pelabuhan Istanbul. Turki melarang para penumpang turun dari kapal. Warga Yahudi setempat memberi bantuan makanan kepada para penumpang yang terlantar tersebut²⁴⁷. Negosiasi diadakan antara awak kapal Struma dan pemerintah Turki. Namun, Inggris berhasil meyakinkan Turki untuk melarang Struma melanjutkan pelayarannya menuju Palestina. Inggris telah membuat keputusan untuk menolak para imigran Yahudi memasuki Palestina²⁴⁸. Pada 23 Februari 1942, Turki menarik Struma menuju Laut Hitam dan meninggalkannya begitu saja. Struma, dengan mesin yang masih mati terombang-ambing di Laut Hitam selama semalam. Pukul sembilan pagi keesokan harinya, kapal selam Soviet, SC 213,

²⁴⁵ Yocheved Miriam Russo, "With No Way Out", *The Jerusalem Post*, 22 Januari 2009

²⁴⁶ Roth, *loc. cit.*, hlm. 1764.

²⁴⁷ Russo, *loc. cit.*

²⁴⁸ Roth, *loc. cit.*

meluncurkan torpedo ke arah Struma yang menyebabkan kapal itu tenggelam dengan cepat²⁴⁹. Menurut *Shoah Resource Center : The International School for Holocaust Studies*, hal itu terjadi karena Soviet salah mengira bahwa Struma adalah kapal Jerman yang menjadi musuhnya saat itu²⁵⁰. Pada tragedi itu, hanya satu penumpang yang selamat. Sedangkan semua awak kapal dan penumpang lainnya tenggelam.

3.6.3.3 Exodus 1947

Pada 9 November 1946 Perusahaan Potomac Shipwrecking, yang diminta Haganah sebagai perantara, membeli sebuah kapal Amerika bernama President Warfield dari *War Shipping Administration (WSA)*. Kapal ini ditujukan untuk mengangkut besi tua, namun Haganah menyerahkan kapal tersebut kepada Mossad LeAliyah Bet dengan tujuan mengangkut para imigran gelap Yahudi dari Eropa menuju Palestina. Kapal ini kemudian berganti nama menjadi Exodus 1947²⁵¹. Pada 11 Juli 1947 di bawah perlindungan Haganah, Exodus berangkat dari pelabuhan Sète di Prancis Selatan menuju Palestina. Kapal tersebut memuat 4.554 pengungsi Yahudi yang selamat dari Holocaust²⁵².

Tujuh hari kemudian –saat berada di perairan Mediterania– Exodus dihadang oleh skuadron Inggris yang terdiri dari lima kapal penghancur (*destroyer*) dan sebuah kapal penjelajah (*cruiser*). Walaupun saat itu Exodus berada di luar kawasan perairan Palestina, kapal Inggris terus menyerang Exodus dengan membenturkan kapal-kapalnya ke sisi Exodus. Pertempuran pun terjadi, yang menyebabkan 1 awak kapal Amerika bernama William Bernstein tewas²⁵³ dan 2 orang penumpang –termasuk seorang anak berumur 15 tahun– tewas ditembak. Setidaknya 150 orang lainnya luka-luka akibat pertempuran ini. Setelah itu, pasukan Inggris menggiring Exodus menuju Haifa. Setelah sampai di sana,

²⁴⁹ Russo, *loc. cit.*

²⁵⁰ Lears, *op. cit.*, hlm. 662.

²⁵¹ Jerry Klinger, "In Search of Exodus", <http://www.jewishmag.com/140mag/exodus/exodus.htm>, diakses pada 23/05/2010 pukul 19.42 WIB

²⁵² Roth, *loc. cit.*, hlm. 655.

²⁵³ Lears, *op. cit.*, hlm. 670.

para penumpang Exodus dipaksa pindah menuju tiga kapal lain untuk dideportasi ke *Port de Bouc*, Prancis²⁵⁴.

Prancis mengizinkan para penumpang Exodus berlabuh, namun tidak satu pun dari mereka yang mau turun dari kapal. Mereka melakukan perlawanan dan aksi mogok makan dengan harapan mereka akan diizinkan kembali menuju Palestina. Namun, keputusan Inggris sudah bulat. Akhirnya, pasukan Inggris membawa Exodus ke pelabuhan Hamburg dan memaksa mereka untuk turun dari kapal. Bahkan mereka dibawa kembali ke camp-camp pengungsi (*Displaced Person Camps*) di Jerman. Setelah itu, mayoritas dari mereka berusaha mencapai Palestina dengan caranya masing-masing. Grup terakhir dari imigran ilegal ini berhasil tiba di Haifa pada 14 Mei 1948, tepat pada saat Israel mendeklarasikan kemerdekaannya²⁵⁵. Insiden Exodus mendapat perhatian penting dari dunia. Pers mempublikasikan tragedi ini sehingga memunculkan opini miring dunia terhadap kebijakan Inggris ini yang dinilai terlalu otoriter terhadap masalah Palestina, khususnya masalah imigrasi Yahudi setelah PD II²⁵⁶.

²⁵⁴ Klinger, *loc. cit.*

²⁵⁵ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 1580.

²⁵⁶ Roth, *loc. cit.*, hlm. 656.

BAB IV

PENGARUH IMIGRASI YAHUDI DI PALESTINA

Imigrasi Yahudi ke Palestina merupakan suatu proses awal pengambilalihan suatu wilayah dari pihak Arab Palestina ke tangan Yahudi. Melalui *Aliyah*, imigrasi ini senantiasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu di Palestina. Pengaruh awal yang terjadi ialah konflik-konflik kecil antara pihak Yahudi dan penduduk Arab yang telah mendiami Palestina sebelumnya. Seiring dengan berjalannya waktu, konflik-konflik tersebut berkembang menjadi konflik-konflik besar seperti konflik Tembok Ratapan. Selain konflik, *Aliyah* juga menimbulkan lahirnya komunitas-komunitas Yahudi baik dalam bidang pertanian dan pertahanan. Melalui komunitas-komunitas tersebut, kaum Yahudi berhasil mengkolonisasi wilayah Palestina secara bertahap. Hal tersebut sangat mendukung keberhasilan Yahudi dalam mendirikan Negara Israel, ditambah dengan jumlah penduduk Yahudi di Palestina –yang muncul dari proses *Aliyah*– yang terus bertambah. Dengan kata lain, *Aliyah* memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pendirian Negara Israel.

4.1 Konflik Penduduk Arab Palestina dengan Pendetang Yahudi

Wilayah Palestina merupakan wilayah penting bagi tiga agama Semit dunia: Yahudi, Nasrani, dan Islam. Masing-masing agama tersebut menginginkan bagian wilayah tersebut. Namun sejak agama Nasrani memiliki pusat keagamaan di Vatikan, wilayah Palestina, khususnya Jerusalem yang menjadi tempat kelahiran Yesus, tidak lagi menjadi wilayah utama yang ingin dikuasai kaum Nasrani. Selain itu, dalam Perang Salib, umat Islam berhasil mengalahkan ksatria Templar dan Jerusalem pun tetap berada di genggaman umat Islam. Saat ini, Jerusalem tetap dikunjungi oleh umat Nasrani dunia sebagai sebuah ziarah religius. Berkurangnya kepentingan kaum Nasrani atas wilayah Palestina menyisakan dua agama Semit lainnya, Yahudi dan Islam.

Yahudi dan Islam terkurung dalam konflik berkepanjangan dalam memperebutkan wilayah Palestina. Islam berhasil menguasai wilayah tersebut

sejak Khalifah Umar bin Khattab menaklukkannya dari Romawi. Sejak itu, mayoritas populasi Palestina terdiri dari Muslim Arab. Sedangkan, bangsa Yahudi yang diaspora pada 70 M, hidup di berbagai belahan dunia terutama Eropa. Sejak *Aliyah Pertama*, umat Yahudi mencoba mendiami kembali wilayah Palestina yang mereka klaim sebagai wilayahnya. Usaha itu diperkuat dengan *Aliyah-Aliyah* setelahnya. Politisasi terhadap *Aliyah* berkembang pesat sejak Organisasi Zionis Dunia resmi terbentuk pada 1897. Kaum Yahudi mulai melancarkan kolonisasi atas wilayah Palestina. Warga Arab Muslim dan sedikit warga Arab Nasrani yang telah mendiami wilayah tersebut merasa terancam dengan kedatangan umat Yahudi. Sejak *Aliyah Pertama*, sudah muncul konflik-konflik kecil antara imigran-imigran Yahudi dan warga Arab (yang mayoritas Muslim) setempat. Hal itu diperparah *Jewish National Fund* yang terus membeli tana-tanah di wilayah Palestina.

Konflik-konflik kecil yang terjadi antara Arab Muslim dengan Yahudi terus berkembang menjadi konflik besar yang berkepanjangan hingga saat ini. Kaum Arab muslim merasa bahwa Yahudi merampas wilayah mereka. Sedangkan kaum Yahudi menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan hak mereka. Dalam periode *Aliyah Pertama* hingga *Aliyah Bet*, banyak sekali konflik yang terjadi antara kaum Yahudi dan Arab Muslim. Dalam penelitian ini, hanya akan dipaparkan beberapa konflik-konflik penting yang terjadi dalam periode tersebut.

4.1.1 Konflik 1920-1921

Sejak kaum Yahudi mulai bermigrasi ke Palestina pada akhir abad 19, konflik-konflik antara pendatang Yahudi dengan penduduk Arab kerap kali terjadi. Namun, konflik-konflik tersebut masih dalam skala kecil. Beberapa sumber literatur menyatakan bahwa pada masa-masa awal kedatangan imigran Yahudi di Palestina, mereka seringkali mendapatkan serangan dengan penduduk Arab setempat. Perampokan terhadap pendatang Yahudi juga kerap kali terjadi²⁵⁷. Hingga pada 1909 para imigran Yahudi mendirikan organisasi pertahanan pertama yang bernama HaShomer.

²⁵⁷ Lihat: Roth, *loc. cit.*, hlm. 1615; St. John, *op. cit.*, hlm. 38; Begin, *op. cit.*, hlm. 34.

Pada 1919, setelah Perang Dunia I berakhir, Organisasi Zionis Dunia yang diwakili oleh Chaim Weizmann dan pihak Arab yang diwakili oleh Emir Faisal mengadakan Konferensi Perdamaian. Mereka menandatangani kesepakatan yang menyetujui adanya kebebasan beribadah di Palestina bagi seluruh kepercayaan dan menjanjikan tidak adanya diskriminasi di antara masyarakat dalam aspek kewarganegaraan, ras, dan agama²⁵⁸. Namun, banyak kalangan Arab menganggap dengan adanya Deklarasi Balfour dan Konferensi Perdamaian ini, sama saja mengizinkan kaum Yahudi untuk tetap melakukan kolonisasi di Palestina. Mereka juga menganggap Deklarasi Balfour merupakan pelanggaran terhadap hak bangsa Arab. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa minoritas Yahudi di masa depan harus hidup di bawah kedaulatan pemerintahan Arab. Selain itu, tokoh seperti Faisal yang berasal dari Hijaz sangat asing dengan situasi Palestina²⁵⁹. Sementara itu, *Aliyah* terus berlangsung. Konflik antara pihak Arab dan Yahudi pun tidak dapat dihindari.

Saat Faisal diangkat sebagai Raja di Kerajaan Arab Suriah (The Arab Kingdom of Syria) pada Maret 1920, demonstrasi terjadi di Palestina, dimana Musa Kazim Al-Husayni²⁶⁰ berperan di dalamnya. Ketegangan memuncak hingga pada 4 April bersamaan dengan festival Nabi Musa, Mereka menyerang markas Yahudi di Jerusalem di Tel Hai dan Kfar Giladi di daerah Galilea Utara. Diantara pemberontak tersebut ialah Amin Al-Husayni, adik dari Kamil Al-Husayni yang saat itu menjadi mufti di Palestina. Insiden ini menyebabkan lima pengawal Yahudi tewas termasuk pemimpinnya, Kapten Joseph Trumpledor²⁶¹, dan 211 lainnya luka-luka. Insiden ini juga menimbulkan korban dari pihak pemberontak Arab. Empat orang pemberontak tewas dan 32 lainnya terluka. Pihak Zionis menuduh Inggris telah mendukung penyerangan tersebut. Inggris menepis tuduhan tersebut dengan memberhentikan Musa Kazim Al-Husayni dari

²⁵⁸ Learsy, *op. cit.*, hlm. 638.

²⁵⁹ Katz, *op. cit.*, hlm. 79-80.

²⁶⁰ Sejak tahun 1918, jabatan penting di Jerusalem dipegang oleh Keluarga Al Husayni. Musa Kazim Al Husayni sebagai mayor dan Kamil Al Husayni sebagai mufti. Mereka berdua tentu menentang Zionisme namun pada masa-masa awal mereka bersedia kooperatif dengan pemerintah Inggris. Lihat: Smith, *op. cit.*, hlm. 71.

²⁶¹ Learsy, *op. cit.*, hlm. 638.

jabatannya dan digantikan oleh Raghīb Al-Nashashibi, rival keluarga Al-Husayni²⁶².

Pada 24 April, Mandat Inggris atas Palestina dikonfirmasi lewat Perjanjian San Remo. Dengan jatuhnya Palestina ke Mandat Inggris, ditambah dengan Deklarasi Balfour yang dicanangkan tiga tahun sebelumnya, cita-cita kaum Yahudi untuk mendirikan sebuah tanah air di Palestina semakin mendapatkan dukungan dari Inggris. Sementara itu, pemerintahan Faisal jatuh dan harapan bangsa Arab Palestina akan kemerdekaan memudar. Mandat Inggris dipimpin oleh Herbert Samuel, yang merupakan Komisaris Besar Inggris untuk Palestina yang pertama. Pada masa kepemimpinannya, ia mengampuni Amin Al-Husayni yang dipenjara karena pemberontakan April 1920²⁶³. Setelah bebas, Al-Husayni menjadi Mufti Palestina, menggantikan Kamil Al-Husayni yang wafat. Selain itu, ia juga mendirikan Dewan Tinggi Muslim (*Moslem Supreme Council*) yang mengatur dan menjaga segala lembaga dan komunitas Islam di Palestina²⁶⁴.

Sementara itu, *Aliyah* terus berlangsung sejak berakhirnya PD I. Situasi seperti ini sangat rentan untuk memicu konflik antara penduduk Arab setempat yang merasa terancam eksistensinya dan pendatang Yahudi. Nyatanya, dalam periode antara Perang Dunia I dan II, setiap kali muncul gelombang imigrasi Yahudi selalu diikuti dengan huru-hara²⁶⁵. Karena alasan tersebut, Herbert Samuel sempat menghentikan *Aliyah* untuk sementara waktu. Ia merupakan seorang Zionis. Namun ia juga menampung keluhan-keluhan warga Arab setempat. Ia mampu menempatkan dirinya diantara kaum Yahudi dan Muslim di Palestina dengan baik²⁶⁶.

Pada 1919-1920, lebih dari 10.000 Yahudi memasuki Palestina, yang tergabung dalam *Aliyah* Ketiga. Ternyata di antara mereka terjadi perselisihan. Pada Mei 1921 terjadi kerusuhan antara kaum Yahudi komunis dengan Yahudi sosialis di Tel Aviv. Kerusuhan itu terus berkembang dan menjalar hingga ke wilayah Arab Jaffa. Hal itu menyebabkan warga Arab setempat marah dan membalas Yahudi dengan menyerang Hotel Imigran Jaffa (*Jaffa Immigrants*

²⁶² Smith, *op. cit.*, hlm. 71.

²⁶³ Lears, *op. cit.*, hlm. 639-640.

²⁶⁴ Smith, *op. cit.*, hlm. 72.

²⁶⁵ Katz, *op. cit.*, hlm. 80.

²⁶⁶ Smith, *op. cit.*, hlm. 71.

Hotel) yang menewaskan 43 Yahudi dan 14 Arab, 143 Yahudi dan 49 Arab lainnya luka-luka. Kerusuhan terus berlangsung hingga akhirnya Inggris melancarkan serangan udara guna mengakhiri kerusuhan tersebut. Dalam serangan ini, 47 Yahudi dan 48 Arab tewas, sementara 146 Yahudi dan 73 Arab luka-luka²⁶⁷. Setelah peristiwa ini, Herbert Samuel mencoba mendamaikan pihak Arab dan Yahudi. Dan sekitar 8 tahun berikutnya, tidak terdapat konflik-konflik besar antara Arab dan Yahudi²⁶⁸.

4.1.2 Konflik Tembok Ratapan

Bagi umat Yahudi, Tembok Barat, atau yang saat ini lebih dikenal dengan Tembok Ratapan, merupakan satu-satunya bagian yang tersisa dari Haikal Sulaiman yang dihancurkan oleh Romawi pada 70 M. Bangunan tersebut merupakan peninggalan keramat Israel kuno yang sangat penting dan religius bagi umat Yahudi. Bagi umat Islam, tembok tersebut merupakan batas luar kawan Haram Al-Sharif. Kawasan tersebut merupakan kawasan suci tempat terdapatnya Masjid Umar (*The Dome of the Rock*), dan Masjid Al-Aqsa, masjid tersuci ketiga bagi umat Islam.

Tembok Barat dikelola melalui dana sebuah yayasan religius, *Maghribi Waqf*²⁶⁹. Tanah tempat tembok tersebut berdiri juga merupakan bagian dari *Maghribi Waqf*. Seiring dengan bertambahnya penduduk Yahudi di Jerusalem sejak adanya *Aliyah*, semakin banyak Yahudi yang berdoa di tembok tersebut. Mereka pun mulai melakukan usaha-usaha untuk mendominasi Tembok Barat. Mereka mulai membawa kursi-kursi ke sana untuk digunakan berdoa. Selanjutnya mereka mulai membuat sekat pembatas untuk membagi Yahudi wanita dan pria yang berdoa di sana²⁷⁰. Umat Muslim khususnya para pemimpin-pemimpinnya tentu merasa keberatan dengan kegiatan tersebut. Jika kaum Yahudi terus melakukan tindakan tersebut, waktu demi waktu Tembok Barat akan terlihat seperti properti milik Yahudi. Padahal, sudah sangat jelas bahwa bangunan tersebut ialah milik umat Islam yang dikelola oleh *Maghribi Waqf*.

²⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁶⁸ Learsy, *op. cit.*, hlm. 639-640.

²⁶⁹ Dinamakan *Maghribi Waqf* karena penduduk yang tinggal di kawasan tersebut mayoritas berasal dari Maroko (Maghrib). Smith, *op. cit.*, hlm. 71.

²⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 87-88.

Saat Palestina diambil alih oleh Mandat Inggris, Chaim Weizmann mencoba mempolitisasi masalah Tembok Barat tersebut. Pada 1919, Weizmann mencoba membeli Tembok Barat dari *Maghribi Waqf*. Hal itu tentu saja ditolak. Kemudian pada 1926, Kolonel Frederick Kisch dari Palestine Zionist Executive (PZE) mencoba hal yang sama dan berniat mengusir penduduk Maroko yang tinggal di kawasan tersebut, serta menghancurkan bangunan-bangunannya guna menciptakan wilayah yang lebih luas bagi kaum Yahudi untuk berdoa. Amin Al-Husayni menegaskan bahwa bangunan tersebut merupakan milik umat Islam dan tidak dapat diganggu gugat²⁷¹. Upaya membeli Tembok Barat merupakan salah satu contoh usaha Yahudi untuk menguasai Palestina.

Sementara itu, ketegangan antara umat Islam dan Yahudi semakin bertambah. Hingga pada 28 September 1928, bertepatan dengan hari Yom Kippur, kaum Yahudi membawa sebuah sekat pembatas ke Tembok barat guna memisahkan Yahudi wanita dan pria. Namun, sekat tersebut merintanginya sebuah jalan yang biasa dilewati oleh penduduk Arab setempat²⁷². Protes pun berdatangan dari pihak Arab. Mereka meminta pihak berwenang Inggris memindahkan sekat tersebut. Dewan Tinggi Muslim Palestina menyatakan bahwa kaum Yahudi telah melampaui haknya terhadap Tembok Barat²⁷³.

Pada 25 September 1928, pihak berwenang Inggris berhasil memindahkan sekat tersebut secara paksa dari Tembok Ratapan walaupun terjadi perlawanan dari warga Yahudi. Sejak itu, tensi terkait dengan peristiwa tersebut meningkat. Kaum Yahudi, baik dari dalam dan luar Palestina, mengecam tindakan Inggris tersebut. Klaim tentang kebrutalan polisi Inggris disebarluaskan, dan sebuah media Yahudi membandingkan kaum Muslim dengan orang-orang Rusia yang melakukan pogrom. Padahal, kaum Muslim sama sekali tidak turut serta dalam peristiwa tersebut²⁷⁴. Waktu demi waktu, ketegangan antara kaum Yahudi dengan Arab terkait dengan Tembok Ratapan semakin bertambah. Masing-masing pihak saling menunjukkan eksistensinya di wilayah tersebut.

²⁷¹ *Ibid.*, hlm. 88.

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ Learsy, *op. cit.*, hlm. 640.

²⁷⁴ Smith, *op. cit.*

Pada 23 Agustus 1929, huru-hara terjadi antara Yahudi dan Arab di Jerusalem dan dengan cepat menyebar ke wilayah lain. Kerusuhan ini berlangsung selama seminggu dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban baik dari pihak Yahudi maupun Arab²⁷⁵. Sekitar sebulan sebelum peristiwa itu, Anggota Betar dan kelompok Revisionis pada 15 Agustus berbaris menuju Tembok Ratapan sambil mengibarkan bendera Zionis dan menyanyikan himne Zionis. Lalu bertepatan dengan hari terjadinya kerusuhan, rumor beredar di pihak Arab bahwa kaum Yahudi berencana menyerang masjid di kawasan Haram Al-Sharif. Mufti Palestina mencoba meredam kemarahan warga Arab namun tidak berhasil. Pasukan Arab pun mulai membanjiri kawasan tersebut dan pertikaian dengan pihak Yahudi pun tidak dapat dihindari. Dalam kerusuhan tersebut, sebanyak 133 Yahudi dan 116 Arab tewas, dan yang lainnya luka-luka²⁷⁶.

Banyak yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok Betar dan Revisionis pada 15 Agustus merupakan pemicu utama konflik tersebut. Hal itu pun diperparah dengan rumor yang beredar di kalangan Arab. Setelah peristiwa tersebut, Komisi Penyelidikan Inggris mempublikasikan peraturan *Order-in-Council 1929* yang menetapkan bahwa umat Islam Palestina memiliki hak tunggal atas kepemilikan Tembok Barat dan area sekitarnya. Dan kaum Yahudi di larang membunyikan Shofar di Tembok tersebut²⁷⁷.

4.1.3 Tragedi Deir Yassin

Semenjak kaum Yahudi melancarkan *Havlagah* (perlawanan) pada 1936 terhadap Arab dan Inggris, pertikaian terus terjadi di antara ketiga pihak tersebut. Pihak Yahudi pun mulai menekan otoritas Inggris dengan melancarkan teror-teror. Beberapa teror penting, seperti pengeboman markas Inggris di Hotel King David menjadi suatu titik dimana kekuatan Inggris menjadi lemah dan rapuh. Karena itu, pihak Yahudi semakin kuat dalam melancarkan invasinya terhadap Palestina.

Setelah Resolusi PBB 29 November 1947 mengakhiri Mandat Inggris, Ambisi Yahudi semakin kuat untuk menguasai Palestina. Zionis menegaskan bahwa mereka tidak akan bergantung kepada PBB menentukan pembagian

²⁷⁵ Learsy, *op. cit*

²⁷⁶ Smith, *op. cit.*, hlm. 89.

²⁷⁷ Begin, *op. cit.*, hlm. 87-88.

wilayah Palestina. Mereka terus berusaha memperluas kekuasaan di luar wilayah yang telah ditentukan oleh PBB bagi kaum Yahudi²⁷⁸. Namun, kolonisasi yang diterapkan Yahudi terhadap Palestina berbeda dengan kolonisasi pada umumnya. Jika Belanda yang menjajah Indonesia membiarkan penduduk Indonesia tetap tinggal di wilayahnya, Yahudi yang menjajah Palestina ‘membersihkan’ wilayah tersebut dari penduduk asalnya dan menggantikannya dengan imigran Yahudi.

Pada 9 April 1948 terjadi sebuah pembantaian di sebuah desa Arab bernama Deir Yassin. Dengan meniru perbuatan Nazi, pasukan Irgun yang dipimpin oleh Menachem Begin dan FFI membantai 254 penduduk desa Deir Yassin termasuk wanita, anak-anak, dan manula²⁷⁹ dan membuang mayat-mayat tersebut ke dalam sumur²⁸⁰. Dalam situs memorial Deir Yassin, Matthew Hogan dalam artikelnya memaparkan apa yang terjadi saat itu berdasarkan wawancara dengan seorang korban yang selamat. Dalam wawancara itu, Fahimi Zeidan menyatakan bahwa saat ia dan keluarganya bersembunyi, pihak Yahudi menerobos masuk ke rumahnya. Mereka memanggil saudara lelakinya, Mahmoud, lalu menembaknya di depan keluarganya. Saat ibunya menjerit melihat peristiwa itu, pasukan Yahudi menembaknya juga²⁸¹.

Pada 13 April pihak Arab membalas dengan membunuh 70 dokter dan perawat Yahudi yang tergabung dalam konvoi medis di Jerusalem. Tragedi itu membawa dampak psikologis dan kepanikan bagi penduduk Arab. Pembunuhan dan pembuangan mayat-mayat korban Deir Yassin yang disiarkan di radio-radio menjadi propaganda utama bagi Irgun dan Haganah guna menyebarkan rasa takut kepada warga Arab. Selain itu, Irgun mengancam warga Arab dengan pembantaian seperti Deir Yassin jika mereka tidak mau meninggalkan Palestina²⁸². Jumlah korban dalam tragedi Deir Yassin yaitu sekitar 250 orang disiarkan di media-media sehingga menimbulkan kecaman internasional terhadap Yahudi.

²⁷⁸ Smith, *op. cit.*, hlm. 143.

²⁷⁹ Garaudy, *op. cit.*, hlm. 51.

²⁸⁰ Smith, *op. cit.*

²⁸¹ Matthew Hogan, “The 1948 Massacre at Deir Yassin Revisited”, <http://www.deiryassin.org/mh2001.html> diakses pada 15/06/2010 pukul 15.39 WIB

²⁸² Smith, *op. cit.*

Namun setelah diteliti lebih lanjut, korban tewas Deir Yassin berkisar antara 100-125 orang²⁸³.

Peristiwa ini merupakan contoh dari kebrutalan yang dilakukan pihak Yahudi terhadap warga Arab. Padahal, Deir Yassin merupakan wilayah yang menurut Resolusi PBB dinyatakan sebagai zona internasional terkait dengan letaknya di Jerusalem. Kaum Yahudi juga merebut wilayah-wilayah yang sebenarnya ditentukan menjadi milik Arab, seperti Jaffa, Haifa, Saris, Qastal, Tiberias, dan Acre pada bulan Mei 1948²⁸⁴. Tragedi Deir Yassin menimbulkan pengaruh yang besar bagi nasib populasi warga Arab Palestina. Sejak peristiwa Deir Yassin hingga 15 Mei 1948, sebanyak 300.000 penduduk Arab meninggalkan Palestina²⁸⁵.

4.2 Munculnya Komunitas Yahudi

Palestina telah menjadi tanah air bangsa Arab sejak lama. Sejak diaspora, hanya segelintir umat Yahudi yang mendiami Palestina. Hingga 1880, hanya sekitar 20.000 Yahudi yang mendiami Palestina²⁸⁶. Namun, sejak 1882, Yahudi mulai mengorganisir gelombang-gelombang imigrasi ke Palestina yang dikenal dengan sebutan Aliyah. Aliyah pun menimbulkan pengaruh bagi kehidupan masyarakat di Palestina. Kaum Yahudi awal yang berimigrasi ke Palestina menitikberatkan kolonisasinya melalui sektor pertanian. Sejak Aliyah Pertama, imigran Yahudi mulai mendirikan komunitas-komunitas pertanian. Mereka juga mulai membangun pemukiman pertanian seperti Rishon Le Zion, Ekron, dan sebagainya.

Selanjutnya, para imigran Yahudi juga mulai mendirikan organisasi pertahanan pertama, HaShomer, pada 1909 guna mengangkal serangan-serangan perampok terhadap pemukiman Yahudi. Pada Aliyah kedua mereka juga menciptakan sebuah komunitas pertanian baru yang dinamakan *Kevutzah*. Dalam

²⁸³ Lihat: Begin, *op. cit.*, hlm. 164; Situs Deir Yassin <http://www.deiryassin.org> ; Sandy Tolan, "The Fall of an Arab Town in 1948", <http://english.aljazeera.net/focus/60yearsofdivision/2008/07/20087116188515832.html> diakses pada 15 Juni 2010 pukul 15.31 WIB

²⁸⁴ Hermawati, *op. cit.*, hlm. 102, mengutip dari Faisal H. Basri dalam buku *Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru*.

²⁸⁵ Smith, *op. cit.*

²⁸⁶ Eban, *op. cit.*, hlm. 127.

Kevutzah, produksi dan pembelian bahan-bahan dan alat-alat pertanian dilakukan secara kolektif sedangkan pemakaiannya didasari oleh pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Komunitas pertanian Yahudi terus berkembang di Palestina, dan pada Aliyah Ketiga, para imigran mendirikan *Kibbutz*. Jika *Kevutzah* hanya menitikberatkan pada kegiatan pertanian, *Kibbutz* menjalankan kegiatan pertanian diiringi dengan industri. Selain itu, mereka juga mendirikan *Moshav*, desa pertanian yang mengkombinasikan mata pencaharian pribadi dengan produksi kolektif, dan produksi dan pembelian bahan-bahan dan alat-alat pertanian dilakukan secara kolektif sedangkan pemakaiannya didasari oleh pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kemampuan ekonominya. Pemukiman *Kibbutz* masih berdiri hingga saat ini²⁸⁷.

Selain bidang pertanian, didirikan pula Histadrut (Federasi Buruh Israel) yang merepresentasikan idealisme buruh. Organisasi ini didirikan pada 1920 dengan anggota awal mencapai 4.400 orang. Histadrut merupakan organisasi buruh yang meliputi para pekerja industrial dan lapangan, yang terampil dan tidak terampil, para pekerja upahan, petani kooperatif, pekerja "kerah putih", dan anggota profesi-profesi liberal. Selain itu mereka terus memperkuat pertahanannya dengan mendirikan berbagai organisasi seperti Haganah, Irgun Zvai Leumi, Revisionis, dan FFI. Organisasi-organisasi tersebut merupakan organisasi utama yang memperjuangkan kemerdekaan Negara Israel.

4.3 Pendirian Negara Israel

Ada tiga hal penting yang saling berkaitan dalam sejarah bangsa Israel: Zionisme, *Aliyah*, dan berdirinya Negara Israel. Zionisme merupakan mendorong utama terjadinya *Aliyah*. Selanjutnya, *Aliyah* berperan sebagai tonggak berdirinya sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina. Zionisme yang tujuan utamanya adalah mendirikan suatu negara Yahudi di Palestina, memicu para Yahudi dunia, khususnya Eropa untuk bermigrasi ke Palestina. Hal itu dimulai sejak *Aliyah* Pertama, suatu gelombang imigrasi pertama yang dilakukan secara terorganisir.

²⁸⁷ Lihat: Lampiran 7

Sejak Organisasi Zionis Dunia resmi berdiri pada tahun 1897, *Aliyah* menjadi salah satu program utama organisasi tersebut.

Organisasi Zionis Dunia membiayai dan mengorganisir gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina pada dekade sebelum Perang Dunia Pertama²⁸⁸. Mereka menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan hak milik Yahudi. Organisasi yang berideologi politik ini menggunakan klaim “*The Promised Land*” sebagai argumen kepemilikan wilayah tersebut. Jumlah imigran yang tergabung dalam tiap-tiap *Aliyah* pun semakin bertambah.

Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menerangkan bahwa terdapat empat unsur yang memungkinkan terbentuknya sebuah Negara, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Jika ditinjau kembali, *Aliyah* atau imigrasi kaum Yahudi ke Palestina sangat berperan dalam memunculkan suatu penduduk yang nantinya akan mampu mendirikan suatu negara. Kesamaan dalam sejarah perkembangannya, kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa, dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Dalam kenyataannya, dasar dari suatu Negara bersifat psikologis, yang dinamakan nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu perasaan subjektif pada sekelompok manusia bahwa mereka merupakan suatu bangsa dan bahwa cita-cita serta aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai jika mereka tergabung dalam suatu negara atau *nation*²⁸⁹.

Sejak *Aliyah* Pertama tahun 1882, fondasi negara Israel sudah diletakkan. Fase tersebut juga memungkinkan berdirinya pemukiman-pemukiman Yahudi. Lalu, *Aliyah-Aliyah* selanjutnya senantiasa memperkuat fondasi tersebut. Jumlah orang-orang Yahudi di Palestina semakin bertambah yang secara otomatis berimbas pada perluasan pemukiman Yahudi di sana. Sementara itu, organisasi Zionis Dunia terus melakukan usaha-usaha diplomatik dalam merealisasikan cita-cita mereka. Pada 1917, diterbitkan Deklarasi Balfour yang berisi dukungan Inggris terhadap pendirian negara Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour terbukti memicu para Yahudi dunia lebih mantap untuk melakukan *Aliyah*. *Aliyah* Ketiga

²⁸⁸ Andersen, *op. cit.* hlm. 77.

²⁸⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 1993), hlm. 41-44.

(1919-1923) yang terjadi setelah munculnya Deklarasi Balfour mampu membawa 35.000 Yahudi menuju Palestina, walaupun saat itu kondisi dunia masih rapuh selepas Perang Dunia I.

Usaha kolonisasi Yahudi di Palestina terus berlanjut dengan tanah-tanah yang dibeli melalui *Jewish National Fund*. Melalui tanah tersebut, imigran Yahudi di Palestina sukses mendirikan komunitas-komunitas pertanian seperti *Kevutzah*, *Kibbutz*, dan *Moshav*. Organisasi-organisasi pertahanan, baik resmi ataupun ilegal, didirikan guna melindungi kaum Yahudi di Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan bagi mereka. Salah satu organisasi tersebut ialah Haganah. Organisasi ini meneruskan usaha Organisasi Zionis Dunia dalam mengorganisir *Aliyah*, khususnya pada saat bangkitnya kekuatan Nazi di Eropa dan pasca Perang Dunia II. Sayangnya, usaha itu dihadang oleh Inggris yang pada 1939 menerbitkan *White Paper*, yang membatasi jumlah imigran Yahudi yang boleh memasuki Palestina dalam kurun waktu lima tahun serta menghentikan imigrasi tersebut setelah periode lima tahun tersebut.

Alasan Inggris menerbitkan *White Paper* ialah untuk menampung aspirasi pihak Arab setelah konflik 1936-1939 antara pihak Yahudi dan Arab di Palestina. Inggris percaya bahwa konflik tersebut terjadi karena imigran Yahudi terus berdatangan ke Palestina sementara warga Arab merasa terancam dengan hal tersebut. Setelah konflik tersebut, Inggris setuju berkubu dengan pihak Arab.

Menurut Robert St. John, alasan Inggris menerbitkan *White Paper* ialah karena Inggris mempunyai kepentingan terselubung dengan pihak Arab. Inggris bermaksud menguasai kekayaan minyak yang ada di Palestina serta basis militer yang ada di daerah Suez. Inggris tahu bahwa akan banyak imigran Yahudi yang datang ke Palestina seiring dengan Perang Dunia II dan anti-Semitisme yang merebak di Eropa. Oleh karena itu, Inggris memperketat imigrasi Yahudi ke Palestina guna mencegah kaum Yahudi menguasai wilayah tersebut yang merusak rencana Inggris untuk menguasai kekayaan alam di sana²⁹⁰.

Umat Yahudi telah mengalami berbagai cobaan karena anti-Semitisme yang berkembang mulai dari Eropa Timur hingga menjalar ke Eropa Barat. Mereka sudah cukup mengalami penindasan dengan bangkitnya Hitler bersana

²⁹⁰ St. John, *op. cit.*, hlm. 40.

Nazinya. Walaupun pada *Aliyah Kelima* (1929-1939) sekitar 250.000 Yahudi berhasil bermigrasi ke Palestina, kebutuhan akan hal itu masih sangat diperlukan seiring dengan “mesin pembunuh” Nazi yang mulai beroperasi. Umat Yahudi melihat *White Paper* sebagai pengkhianatan Inggris terhadap janjinya dalam Deklarasi Balfour untuk membantu pendirian sebuah negara Yahudi di Palestina. Sejak saat itu, mereka bukan saja berperang melawan Hitler, tetapi juga Inggris.

Tiga organisasi pertahanan Yahudi yaitu Haganah, Irgun Zvai Leumi, dan Fighters for the Freedom of Israel (FFI) melanjutkan aksi perlawanan terhadap Inggris. Haganah menjalankan suatu kebijakan perlawanan yang dinamakan *Havlagah*. Sedangkan Irgun dan FFI mendasarkan perlawanannya melalui aksi-aksi teror terhadap pemerintah Inggris. Awalnya, Haganah melakukan perlawanan terhadap kebijakan Inggris dengan mengorganisir imigrasi ilegal (*Aliyah Bet*)²⁹¹. Mereka juga mencoba melakukan perundingan diplomasi dengan Inggris. Namun, hingga Perang Dunia II berakhir, Inggris tetap kokoh dengan keputusannya untuk melarang imigrasi Yahudi ke Palestina.

Bangsa Yahudi telah kehilangan 6.000.000 umatnya dalam Holocaust. Mereka tidak ingin mengalami kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh Inggris. Sejak saat itu, aksi perlawanan terhadap Inggris menjadi lebih kuat. Haganah, yang sebelumnya melancarkan aksi non-anarkis, mulai melakukan aksi kekerasan terhadap Inggris. Haganah melancarkan operasi militer yang menghancurkan stasiun-stasiun radar dan instalasi penjagaan pantai guna menghindari pelacakan kapal-kapal yang membawa imigran-imigran ilegal menuju Palestina²⁹². Pada 17 Juni 1946, Haganah melancarkan serangan terhadap Inggris dengan menyerang sistem komunikasi dan menghancurkan 10 dari 11 jembatan utama yang menghubungkan Palestina dengan wilayah tetangga²⁹³.

Penghancuran jembatan-jembatan ini memberi dampak yang besar bagi hubungan politik pihak Yahudi dan Inggris. Aksi ini dilanjutkan oleh FFI dengan merusak pekerjaan pembangunan rel-rel kereta api di Haifa. Setelah insiden ini, pasukan militer Inggris melancarkan serangan balik terhadap pihak Yahudi. Pada

²⁹¹ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 700-701.

²⁹² Learsy, *op. cit.*, hlm. 668.

²⁹³ http://palestinefacts.org/pf_mandate_attacks_jewish.php diakses pada 11/11/2010 pukul 09.02 WIB

29 Juni 1946, berpuluh-puluh ribu pasukan Inggris mulai menyisir seluruh Palestina dan menahan beribu-ribu Yahudi yang terlibat dalam aksi perlawanan. Bahkan para petinggi *Jewish Agency*, organisasi yang awalnya didirikan untuk membantu Inggris dalam pendirian tanah air bagi Yahudi, juga dipenjara. Pihak intelijen Inggris juga berhasil menahan para anggota dan petinggi Haganah dari tempat persembunyiannya²⁹⁴.

Serangan balik yang dilakukan Inggris tidak serta merta menghentikan aksi perlawanan Yahudi. Pada 22 Juli 1946, Irgun Zvai Leumi megebom Hotel King David yang menjadi markas komando militer Inggris dan sekretariat Mandat Inggris. Aksi ini menewaskan sekitar 90 orang dari pihak Inggris, Arab, dan Yahudi, serta melukai 70 orang lainnya²⁹⁵. Sementara itu FFI juga terus melakukan aksinya dengan membakar tank-tank minyak di pelabuhan Haifa, dimana kapal-kapal deportasi Inggris siap untuk membawa para imigran ilegal menuju kamp-kamp tawanan di Siprus dan Mauritius²⁹⁶.

Situasi di Palestina semakin buruk seiring dengan terjadinya konflik-konflik yang terjadi di sana. Konflik-konflik yang terjadi bukan hanya antara pihak Yahudi dan Inggris, tetapi juga antara pihak Arab dan Yahudi. Selain itu, tekanan dari Amerika dan negara lain turut mempertegang posisi Inggris di Palestina. Hingga pada April 1947, Inggris menyadari bahwa mereka sudah tidak mampu mengendalikan Palestina lebih lama lagi. Inggris memutuskan untuk menyerahkan permasalahan ini kepada Majelis Umum PBB²⁹⁷. Atas permintaan Inggris, Panitia Khusus PBB mengadakan rapat pada 28 April 1947 yang melibatkan pihak Yahudi dan Arab. Dalam rapat tersebut sebuah Panitia Khusus PBB²⁹⁸ yang terdiri dari 11 orang dibentuk guna mempelajari situasi di Palestina dan melaporkan hasilnya kepada Panitia Khusus PBB.

Pada September 1947, Panitia Khusus PBB mengajukan laporannya pada Sidang Umum PBB. Usul mengenai Palestina terbagi dalam dua golongan.

²⁹⁴ Begin, *op. cit.*, hlm. 203-204.

²⁹⁵ Keller, *op. cit.*, hlm. 452-453.

²⁹⁶ Begin, *op. cit.*, hlm. 208.

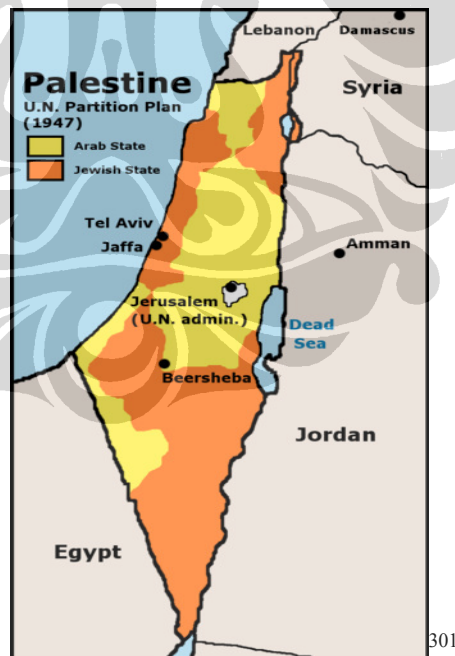
²⁹⁷ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 192.

²⁹⁸ Panitia ini terdiri dari 11 orang dari negara yang berbeda-beda. Guna menghindari keberpihakan dan kepentingan tertentu, negara-negara besar seperti Amerika, Uni Soviet, dan Prancis tidak dipilih. Negara-negara yang tergabung dalam panitia ini ialah Australia, Kanada, Cekoslovakia, Guatemala, India, Iran, Belanda, Peru, Swedia, Uruguay, dan Yugoslavia. Lihat: El Ibrahimy, *op. cit.*, hlm. 31-32.

Golongan pertama yang terdiri dari Swedia, Kanada, Peru, Belanda, Cekoslovakia, Guatemala, dan Uruguay mengusulkan untuk membagi Palestina dalam 3 wilayah :

1. Negara Arab, yang meliputi Galilea Barat, daerah pedalaman tengah, pelabuhan Jaffa, dengan suatu koridor dan daerah tepi pantai bagian Selatan, termasuk Gaza.
2. Negara Yahudi, yang meliputi Galilea Timur sebelah utara, daerah tepi pantai tengah dan gurun Negev bagian selatan.
3. Jerusalem diletakkan di bawah perwalian PBB.

Sedangkan golongan kedua yang terdiri dari Iran, India, dan Yugoslavia mengusulkan pembentukan suatu negara federal di Palestina yang terdiri dari negara Arab dan negara Yahudi²⁹⁹. Akhirnya, usulan golongan mayoritas diterima oleh PBB dan pada 29 November 1947, voting diadakan oleh Majelis Umum PBB³⁰⁰. Jika kuorum memilih “Ya” dan menyetujui usulan tersebut, maka pihak Yahudi akan menang. Hal itu sama saja memberikan pihak Yahudi suatu izin resmi untuk mendirikan negara Yahudi yang telah mereka impi-impikan.



²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 193.

³⁰¹ http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine diakses pada 22/06/2010 pukul 16.38 WIB

Akhirnya, hasil final menunjukkan bahwa 33 negara memilih “Ya”, 13 negara menentang, serta 10 negara abstain. Amerika Serikat, Uni Soviet, mayoritas negara-negara Eropa, banyak dari negara-negara Amerika Latin, dan anggota dari Persemakmuran Inggris (*British Commonwealth*) setuju dengan usulan ini. Sedangkan negara-negara Arab tentu saja menolak usulan tersebut dan Inggris abstain³⁰².

Hasil pemilihan tersebut sudah bulat. Hal itu tentu menimbulkan kekecewaan dan kemarahan pada pihak Arab. Sementara itu, pihak Yahudi menikmati kemenangannya. Akhirnya harapan Yahudi untuk ‘kembali’ ke *Tanah Yang Dijanjikan* selama 2000 tahun semenjak pengusiran bangsa Yahudi oleh Babylonia pada Abad 6 SM bisa terwujud. Semua itu bukan berasal dari kerja sesaat. Para Yahudi Eropa Timur yang pada akhir Abad 19 mulai berdatangan ke Palestina harus berjuang untuk mewujudkan cita-cita itu.

Zionisme, yang memperkuat usaha pemindahan kaum Yahudi menuju Palestina berperan sebagai penopang *Aliyah*. Segala pemukiman yang memungkinkan beralihnya wilayah Palestina menjadi milik Yahudi dibangun dengan jerih payah para imigran. Organisasi-organisasi pertahanan seperti HaShomer, Haganah, Irgun, dan FFI, berjuang dengan keras untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Israel. Semua organisasi itu berasal dari imigran-imigran yang tergabung dalam *Aliyah*. Betapa besarnya peran *Aliyah* dalam mewujudkan pendirian negara Israel.

Pada 14 Mei 1948, David Ben Gurion di hadapan 200 tokoh Yahudi penting lainnya mendeklarasikan kemerdekaan Negara Israel di Museum Kota Tel Aviv³⁰³. Pada saat itu, populasi Yahudi di Palestina mencapai 600.000 jiwa.

Negara Kelahiran	1931 (18 November)	1948 (8 November)
<i>A. Jumlah Absolut</i>		
Total	174.600	716.700
Lahir di luar Palestina	73.400	253.700
Lahir di Palestina	101.200	463.000
<i>Eropa, Amerika, dan Oceania</i>		
Total *	81.300	393.000
Uni Soviet	32.600	53.800

³⁰² Eban (1979), *op. cit.*, hlm. 193-194.

³⁰³ St. John, *op. cit.*, hlm. 42.

Polandia	35.900	161.700
Rumania	5.000	56.400
Jerman-Austria	1.800	54.400
Cekoslovakia	500	17.300
Hungaria	800	13.700
Bulgaria	1.300	12.600
Asia		
Total *	17.300	57.800
Irak	4.000	9.000
Yaman-Aden	5.100	16.300
Turki	2.200	10.700
Iran	2.800	3.900
Afrika		
Total *	2.600	12.200
Maroko, Al Jazair, Tunisia	1.400	5.400
Libya	0	1.300
<i>B. Persentase (%)</i>		
Lahir di Palestina	42	35,4
Lahir di luar Palestina	58	64,6

* Negara-negara yang dicantumkan hanyalah sebagian negara yang tergabung dalam jumlah total³⁰⁴.

Dalam Deklarasi Kemerdekaannya, Ben Gurion menyatakan bahwa Negara Israel akan terbuka untuk imigrasi seluruh Yahudi dunia. *The Law of Return* yang diresmikan pada 5 Juli 1950 oleh *Knesset* (parlemen Israel) menegaskan bahwa *Aliyah* adalah hak dari tiap-tiap Yahudi. *Aliyah* yang berlangsung sejak 1882-1948 berperan dalam pendirian Negara Israel. Begitu pula sebaliknya, pendirian negara Israel berperan dalam *Aliyah-Aliyah* selanjutnya. Dalam sebuah rapat *Knesset*, Ben Gurion berkata:

*“It was for this (mass migration-the Ingathering of the Exiles) that the State was established, and it is by virtue of this alone it will stand.”*³⁰⁵

“Untuk inilah (imigrasi masal-pemersatuan orang-orang yang diasingkan) Negara Yahudi didirikan, dan atas kebaikan itu pula, Negara ini akan bertahan.”

³⁰⁴ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 1644. Lihat: Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 732 menyatakan bahwa sejak 15 Mei- 31 Desember 1948, 101.825 Yahudi yang bermigrasi ke Palestina. Jadi, jumlah populasi Yahudi di Palestina saat Israel berdiri sekitar 614.875 jiwa.

³⁰⁵ Finkelstein, *op. cit.*, hlm. 730.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Aliyah adalah imigrasi Yahudi ke Palestina. Imigrasi Yahudi ke Palestina secara terorganisir dimulai pada tahun 1882 yang tergabung dalam *Aliyah* Pertama. *Aliyah* sangat berkaitan erat dengan Zionisme. Paham tersebut menjadi pendorong utama terjadinya *Aliyah*. Organisasi Zionis Dunia yang resmi didirikan pada tahun 1897 oleh Theodor Herzl memiliki tujuan utama mendirikan suatu negara Yahudi di Palestina. Organisasi itu pun menjadikan *Aliyah* sebagai salah satu agenda utamanya untuk mencapai cita-cita tersebut. Dengan *Aliyah*, kolonisasi Yahudi terhadap wilayah Palestina akan dapat diwujudkan.

Sejak *Aliyah* Pertama yang berlangsung tahun 1882-1903, para imigran Yahudi yang mayoritas berasal dari Rusia karena *Pogrom* sudah meletakkan fondasi Negara Israel dengan membangun pemukiman-pemukiman pertanian di Palestina seperti Rishon LeZion, Petah Tikvah, Rosh Pinnah, Zikhron Yaakov, dan lainnya. Aliyah-aliyah selanjutnya senantiasa memperkuat fondasi tersebut

Aliyah juga menimbulkan konflik-konflik dengan pihak Arab. Mereka menganggap *Aliyah* merupakan sarana perampasan wilayah-wilayah mereka oleh kaum Yahudi. Meskipun terjadi berbagai konflik dengan pihak Arab, pihak Yahudi tetap berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Organisasi pertahanan Yahudi yang didirikan oleh para imigran Aliyah seperti Haganah, Irgun Zvai Leumi, dan FFI (*Fighters for the Freedom of Israel*) melancarkan serangan-serangan perlawanan terhadap Inggris yang mengekang pihak Yahudi melalui *White Paper*.

Pada April 1947, Inggris memutuskan untuk menyerahkan permasalahan ini kepada Majelis Umum PBB. PBB pun membentuk sebuah Panitia Khusus yang terdiri dari 11 negara guna mempelajari situasi di Palestina. Mayoritas anggota panitia tersebut mengusulkan untuk membagi dua wilayah Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi, serta meletakkan Jerusalem sebagai Zona Internasional. Pada 29 November 1947, *voting* diadakan oleh Majelis Umum

PBB terkait dengan usulan tersebut. Mayoritas kuorum menyetujui usulan pembagian wilayah tersebut. Hasil itu memberikan pihak Yahudi suatu izin resmi untuk mendirikan negara Yahudi. Sedangkan, pihak Arab mengecam keputusan tersebut. Pada 14 Mei 1948, David Ben Gurion di hadapan 200 tokoh Yahudi penting lainnya mendeklarasikan kemerdekaan Negara Israel di Museum Kota Tel Aviv.

Keberhasilan yang diraih oleh kaum Yahudi tersebut merupakan suatu proses yang berawal dari Zionisme. Zionisme memicu berkembangnya *Aliyah*. Selanjutnya, *Aliyah* sukses menancapkan fondasi Negara Israel dengan komunitas, organisasi, dan pemukiman yang dibentuk darinya. Kolonisasi melalui *Aliyah* kian meluas dan didukung oleh usaha-usaha Zionis, suatu negara Yahudi di Palestina berhasil didirikan.

5.2 Saran

Aliyah yang dimotori oleh Organisasi Zionis Dunia berperan sebagai sarana pendirian Negara Israel. Dalam penelitian ini, penitikberatan masalah terletak pada pihak Yahudi karena permasalahan yang dibahas ialah imigrasi Yahudi ke Palestina. Sedangkan, aspek bangsa Arab tidak terlalu ditonjolkan. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini 95% merupakan sumber berbahasa Inggris karena peneliti hanya menemukan sedikit sumber berbahasa Indonesia yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Sumber-sumber berbahasa Inggris tersebut seringkali lebih menonjolkan aspek Yahudi karena masalah *Aliyah* dibahas dalam konten sejarah bangsa Yahudi dan bukan bangsa Arab. Oleh karena itu, penulis berharap sumber informasi mengenai aspek bangsa Arab dalam masalah ini dapat dikemukakan oleh peneliti yang ingin membahas masalah serupa. *Aliyah* merupakan masalah krusial yang mengawali konflik Arab-Israel. Namun, tidak banyak dibahas oleh peneliti Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2007
- Andersen, Roy R., dkk. *Politics & Change in the Middle East: Source of Conflict and Accomodation*. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1982
- Armanjani, Yahya. *Middle East: Past and Present*. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1970
- Begin, Menachem. *The Revolt: Story of the Irgun*. New York: Henry Schuman Inc., 1951
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Eban, Abba. *My People: History of the Jews Volume I*. New Jersey: Berman House Inc. Publishers, 1978
- , *My People:History of the Jews Volume II*. New Jersey: Berman House Inc. Publishers, 1979
- El Ibrahimy, M. Nur. *Tragedia Palestina*. Bandung: N. V. Al Ma'arif, 1954
- Finkelstein, Louis, ed. *The Jews:Their History, Culture, and Religion*. London: Peter Owen Limited, 1961
- Garaudy, R. *Kasus Israel: Studi Tentang Zionisme Politik*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Hermawati. *Sejarah Agama & Bangsa Yahudi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Johnson, Paul. *A History of the Jews*. New York: Harper & Row Inc., 1988
- Katz, Prof. Jacob, dkk. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Keller, Werner. *Diaspora: The Post Biblical History of the Jews*. New York: Harcourt, Brace & World Inc., 1969

Learsy, Rufus. *Israel: A History of the Jewish People*. Ohio: Meridian Books, 1966

Lembaga Demografi FEUI, *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1981

Nasution, M. Arif. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: Penerbit Alumni, 1999

Sihbudi, Riza, dkk. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995

Smith, Charles D. *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*. New York: St. Martin Press, 1992

St. John, Robert. *Israel*. Kanada: Time Inc., 1962

Walichnowski, Tadeusz. *Israel and the German Federal Republic*. Warsawa: Interpress Publishers, 1968

Ensiklopedi dan Kamus

Armando, Ade, dkk. *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*. Vol. 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

Ridwan, Kafrawi, dkk., ed. *Ensiklopedi Islam*. Vol. 2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

Roth, Cecil, ed. *The Standard Jewish Encyclopedia*. Jerusalem: Madassah Publishing Company Ltd, 1958

Taylor, James, Warren Shaw. *A Dictionary of the Third Reich*. London: Grafton Books, 1988

Naskah

Al-'Asi, Mohammad. "Freedom for Palestine". Makalah pada Konferensi Internasional bertajuk *Freedom and Right of Return*, Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, Mei 2008

Alkitab, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1996.

Rahiem, Minal Aidin A. *Teori Zionisme Dalam Masalah Palestina. Sebuah Tinjauan Historis*. Depok: Fakultas Sastra UI, 1996

II. SERIAL

Jurnal

Rahiem, Minal Aidin A, “Masuknya Orang-orang Yahudi ke Israel”, *Jurnal Arabia*, No. 9, hlm. 57, Oktober 2006-Maret 2007

III. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Artikel surat kabar online

Russo, Yocheved Miriam, “With No Way Out”, *The Jerusalem Post*, 22 Januari 2009

Publikasi lembaga

Departemen Penyerapan Imigran Israel. “The First Aliyah”,
http://www.moia.gov.il/Moia_en/AboutIsrael/aliya1.htm, diakses pada
 26/08/2009 pukul 8.49 WIB

----- “The Second Aliyah”,
http://www.moia.gov.il/Moia_en/AboutIsrael/aliya2.htm, diakses pada
 26/08/2009 pukul 8.49 WIB

----- “The Third Aliyah”,
http://www.moia.gov.il/Moia_en/AboutIsrael/aliya3.htm, diakses pada
 26/08/2009 pukul 8.49 WIB

----- “The Fourth Aliyah”,
http://www.moia.gov.il/Moia_en/AboutIsrael/aliya4.htm, diakses pada
 26/08/2009 pukul 8.49 WIB

----- “The Fifth Aliyah”
http://www.moia.gov.il/Moia_en/AboutIsrael/aliya5.htm diakses pada 26/08/2009
 pukul 8.49 WIB

Artikel/istilah dalam koleksi referensi online

“Hapoel Hatzair”, http://en.wikipedia.org/wiki/Hapoel_Hatzair, diakses pada
 14/05/2010 pukul 16.12 WIB

“Haskalah”, <http://en.wikipedia.org/wiki/Haskalah>, diakses pada 19/04/10,
 diakses pada 19/04/10 pukul 09.45 WIB

“Jozef Beck”, http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Beck diakses pada 20/05/2010 pukul 14.18 WIB

“United Nation Partition Plan for Palestine”,
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine
diakses pada 22/06/2010 pukul 16.38 WIB

Artikel di website

Bergman, Elihu. “History of Aliyah Bet: Facing the British Blockade with Rusty Ships”, http://Israelvets.com/facing_british_blockade.html, diakses pada 23/05/2010 pukul 17.42 WIB

Feld, Eva. “The Story of the S/S Patria”,
<http://www.jewishmag.co.il/46mag/patria/patria.htm> diakses pada 23/05/2010
pukul 19.34

“Ha'Mossad Le'Aliya Bet”, <http://www.palyam.org/English/HaMossad/mainpage>
diakses pada 24/05/2010 pukul 18.29 WIB

“Haskalah”, <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Haskalah.html>,
diakses pada 19/04/10, pukul 09.45 WIB

Hogan, Matthew. “The 1948 Massacre at Deir Yassin Revisited”,
<http://www.deiryassin.org/mh2001.html> diakses pada 15/06/2010 pukul 15.39
WIB

Nili Kadary, “New Aliyah - Modern Zionist Aliyot (1882 - 1948)”,
<http://www.jafi.org.il/education/100/concepts/Aliyah3.html>, diakses pada
14/05/2010 pukul 14.51 WIB

Klinger, Jerry. “In Search of Exodus”,
<http://www.jewishmag.com/140mag/exodus/exodus.htm>, diakses pada
23/05/2010 pukul 19.42 WIB

Tolan, Sandy. “The Fall of an Arab Town in 1948”,
<http://english.aljazeera.net/focus/60yearsofdivision/2008/07/20087116188515832.html>
diakses pada 15 Juni 2010 pukul 15.31 WIB

http://palestinefacts.org/pf_mandate_attacks_jewish.php diakses pada 11/11/2010
pukul 09.02 WIB

LAMPIRAN 1

Kongres Zionis

No.	Year	Site	Agenda
1	1897	Basle	Created the World Zionist Organization; formulated the Basle Program; elected Herzl as president.
2	1898	Basle	Founded the Jewish Colonial Trust.
3	1899	Basle	Dealt with problems of Hebrew culture.
4	1900	London	Discussed Zionist propaganda.
5	1901	Basle	Established the Jewish National Fund.
6	1903	Basle	Discussed El Arish and Uganda Scheme.
7	1905	Basle	Rejected Uganda scheme. Elected David Wolffsohn as president.
8	1907	Den Haag	Decided to commence practical work in Palestine.
9	1909	Hamburg	Discussed the consequences of the Turkish Revolution and the establishment of cooperative settlements in Palestine
10	1911	Basle	Elected Otto Warburg -who represented the Synthetic Zionism- as president.
11	1913	Vienna	Decided on principle of founding Hebrew University in Palestine
12	1921	Carlsbad	Thanked the Great Britain for the Balfour Declaration. Elected Chaim Weizmann as president.
13	1923	Carlsbad	Discussed the establishment of the Jewish Agency.
14	1925	Vienna	Introduced the unified (in place of party) shekel.
15	1927	Basle	Considered unemployment in Palestine and economic problems.
16	1929	Zurich	Resolve to establish expanded Jewish Agency
17	1931	Basle	Replaced Weizmann with Nahum Solokow as president.
18	1933	Prague	Discussed the murder of Arlosoroff and associated questions.
19	1935	Lucerne	Rejected the British proposal to establish legislative council in Palestine. Re-elected Weizmann as president.
20	1937	Zurich	Rejected patition proposal
21	1939	Geneva	Rejected MacDonald White Paper
22	1946	Basle	Discussed the European catastrophe. Rejected the new British proposal. Failed to re-elect Weizmann
23	1951	Jerusalem	Discussed relations between Zionist movement and state of Israel
24	1956	Jerusalem	Discussed immigration and absorption into Israel, and education in the Diaspora; elected Nahum Goldmann as president

Sumber: Cecil Roth, *The Standard Jewish Encyclopedia*. (Jerusalem: Madassah Publishing Company Ltd, 1958)

The Palestine Mandate

(July 24, 1922)

The Council of the League of Nations:

Whereas the Principal Allied Powers have agreed, for the purpose of giving effect to the provisions of Article 22 of the Covenant of the League of Nations, to entrust to a Mandatory selected by the said Powers the administration of the territory of Palestine, which formerly belonged to the Turkish Empire, within such boundaries as may be fixed by them; and

Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory should be responsible for putting into effect the declaration originally made on November 2nd, 1917, by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favor of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country; and

Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country; and

Whereas the Principal Allied Powers have selected His Britannic Majesty as the Mandatory for Palestine; and

Whereas the mandate in respect of Palestine has been formulated in the following terms and submitted to the Council of the League for approval; and

Whereas His Britannic Majesty has accepted the mandate in respect of Palestine and undertaken to exercise it on behalf of the League of Nations in conformity with the following provisions; and

Whereas by the aforementioned Article 22 (paragraph 8), it is provided that the degree of authority, control or administration to be exercised by the Mandatory, not having been previously agreed upon by the Members of the League, shall be explicitly defined by the Council of the League Of Nations; confirming the said Mandate, defines its terms as follows:

ARTICLE 1. The Mandatory shall have full powers of legislation and of administration, save as they may be limited by the terms of this mandate.

ARTICLE 2. The Mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home, as laid down in the preamble, and the development of selfgoverning institutions, and also for safeguarding the civil and religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion.

ARTICLE 3. The Mandatory shall, so far as circumstances permit, encourage local autonomy.

ARTICLE 4. An appropriate Jewish agency shall be recognised as a public body for the purpose of advising and cooperating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home and the interests of the Jewish population in Palestine, and, subject always to the control of the Administration to assist and take part in the development of the country.

The Zionist organization, so long as its organization and constitution are in the opinion of the Mandatory appropriate, shall be recognised as such agency. It shall take steps in consultation with His Britannic Majesty's Government to secure the cooperation of all Jews who are willing to assist in the establishment of the Jewish national home.

ARTICLE 5. The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be ceded or leased to, or in any way placed under the control of the Government of any foreign Power.

ARTICLE 6. The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and shall encourage, in cooperation with the Jewish agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land, including State lands and waste lands not required for public purposes.

ARTICLE 7. The Administration of Palestine shall be responsible for enacting a nationality law. There shall be included in this law provisions framed so as to facilitate the acquisition of Palestinian citizenship by Jews who take up their permanent residence in Palestine.

ARTICLE 8. The privileges and immunities of foreigners, including the benefits of consular jurisdiction and protection as formerly enjoyed by Capitulation or usage in the Ottoman Empire, shall not be applicable in Palestine.

Unless the Powers whose nationals enjoyed the aforementioned privileges and immunities on August 1st, 1914, shall have previously renounced the right to their reestablishment, or shall have agreed to their nonapplication for a specified period, these privileges and immunities shall, at the expiration of the mandate, be immediately reestablished in their entirety or with such modifications as may have been agreed upon between the Powers concerned.

ARTICLE 9. The Mandatory shall be responsible for seeing that the judicial system established in Palestine shall assure to foreigners, as well as to natives, a complete guarantee of their rights.

Respect for the personal status of the various peoples and communities and for their religious interests shall be fully guaranteed. In particular, the control and administration of Wakfs shall be exercised in accordance with religious law and the dispositions of the founders.

ARTICLE 10. Pending the making of special extradition agreements relating to Palestine, the extradition treaties in force between the Mandatory and other foreign Powers shall apply to Palestine.

ARTICLE 11. The Administration of Palestine shall take all necessary measures to safeguard the interests of the community in connection with the development of the country, and, subject to any international obligations accepted by the Mandatory, shall have full power to provide for public ownership or control of any of the natural resources of the country or of the public works, services and utilities established or to be established therein. It shall introduce a land system appropriate to the needs of the country, having regard, among other things, to the desirability of promoting the close settlement and intensive cultivation of the land.

The Administration may arrange with the Jewish agency mentioned in Article 4 to construct or operate, upon fair and equitable terms, any public works, services and utilities, and to develop any of the natural resources of the country, in so far as these matters are not directly undertaken by the Administration. Any such arrangements shall provide that no profits distributed by such agency, directly or indirectly, shall exceed a reasonable rate of interest on the capital, and any further profits shall be utilised by it for the benefit of the country in a manner approved by the Administration.

ARTICLE 12. The Mandatory shall be entrusted with the control of the foreign relations of Palestine and the right to issue exequaturs to consuls appointed by foreign Powers. He shall also be entitled to afford diplomatic and consular protection to citizens of Palestine when outside its territorial limits.

ARTICLE 13. All responsibility in connection with the Holy Places and religious buildings or sites in Palestine, including that of preserving existing rights and of securing free access to the Holy Places, religious buildings and sites and the free exercise of worship, while ensuring the requirements of public order and decorum, is assumed by the Mandatory, who shall be responsible solely to the League of Nations in all matters connected herewith, provided that nothing in this article shall prevent the Mandatory from entering into such arrangements as he may deem reasonable with the Administration for the purpose of carrying the provisions of this article into effect; and provided also that nothing in this mandate shall be construed as conferring upon the Mandatory authority to interfere with the fabric or the management of purely Moslem sacred shrines, the immunities of which are guaranteed.

ARTICLE 14. A special commission shall be appointed by the Mandatory to study, define and determine the rights and claims in connection with the Holy Places and the rights and claims relating to the different religious communities in Palestine. The method of nomination, the composition and the functions of this Commission shall be submitted to the Council of the League for its approval, and the Commission shall not be appointed or enter upon its functions without the approval of the Council.

ARTICLE 15. The Mandatory shall see that complete freedom of conscience and the free exercise of all forms of worship, subject only to the maintenance of public order and morals, are ensured to all. No discrimination of any kind shall be made between the inhabitants of Palestine on the ground of race, religion or language. No person shall be excluded from Palestine on the sole ground of his religious belief.

The right of each community to maintain its own schools for the education of its own members in its own language, while conforming to such educational requirements of a general nature as the Administration may impose, shall not be denied or impaired.

ARTICLE 16. The Mandatory shall be responsible for exercising such supervision over religious or eleemosynary bodies of all faiths in Palestine as may be required for the maintenance of public order and good government. Subject to such supervision, no measures shall be taken in Palestine to obstruct or interfere with the enterprise of such bodies or to discriminate against any representative or member of them on the ground of his religion or nationality.

ARTICLE 17. The Administration of Palestine may organize on a voluntary basis the forces necessary for the preservation of peace and order, and also for the defence of the country, subject, however, to the supervision of the Mandatory, but shall not use them for purposes other than those above specified save with the consent of the Mandatory. Except for such purposes, no military, naval or air forces shall be raised or maintained by the Administration of Palestine.

Nothing in this article shall preclude the Administration of Palestine from contributing to the cost of the maintenance of the forces of the Mandatory in Palestine.

The Mandatory shall be entitled at all times to use the roads, railways and ports of Palestine for the movement of armed forces and the carriage of fuel and supplies.

ARTICLE 18. The Mandatory shall see that there is no discrimination in Palestine against the nationals of any State Member of the League of Nations (including companies incorporated under its laws) as compared with those of the Mandatory or of any foreign State in matters concerning taxation, commerce or navigation, the exercise of industries or professions, or in the treatment of merchant vessels or civil aircraft. Similarly, there shall be no discrimination in Palestine against goods originating in or destined for any of the said States, and

there shall be freedom of transit under equitable conditions across the mandated area.

Subject as aforesaid and to the other provisions of this mandate, the Administration of Palestine may, on the advice of the Mandatory, impose such taxes and customs duties as it may consider necessary, and take such steps as it may think best to promote the development of the natural resources of the country and to safeguard the interests of the population. It may also, on the advice of the Mandatory, conclude a special customs agreement with any State the territory of which in 1914 was wholly included in Asiatic Turkey or Arabia.

ARTICLE 19. The Mandatory shall adhere on behalf of the Administration of Palestine to any general international conventions already existing, or which may be concluded hereafter with the approval of the League of Nations, respecting the slave traffic, the traffic in arms and ammunition, or the traffic in drugs, or relating to commercial equality, freedom of transit and navigation, aerial navigation and postal, telegraphic and wireless communication or literary, artistic or industrial property.

ARTICLE 20. The Mandatory shall cooperate on behalf of the Administration of Palestine, so far as religious, social and other conditions may permit, in the execution of any common policy adopted by the League of Nations for preventing and combating disease, including diseases of plants and animals.

ARTICLE 21. The Mandatory shall secure the enactment within twelve months from this date, and shall ensure the execution of a Law of Antiquities based on the following rules. This law shall ensure equality of treatment in the matter of excavations and archaeological research to the nationals of all States Members of the League of Nations.

(1) "Antiquity" means any construction or any product of human activity earlier than the year 1700 A. D.

(2) The law for the protection of antiquities shall proceed by encouragement rather than by threat.

Any person who, having discovered an antiquity without being furnished with the authorization referred to in paragraph 5, reports the same to an official of the competent Department, shall be rewarded according to the value of the discovery.

(3) No antiquity may be disposed of except to the competent Department, unless this Department renounces the acquisition of any such antiquity.

No antiquity may leave the country without an export licence from the said Department.

(4) Any person who maliciously or negligently destroys or damages an antiquity shall be liable to a penalty to be fixed.

(5) No clearing of ground or digging with the object of finding antiquities shall be permitted, under penalty of fine, except to persons authorised by the competent Department.

(6) Equitable terms shall be fixed for expropriation, temporary or permanent, of lands which might be of historical or archaeological interest.

(7) Authorization to excavate shall only be granted to persons who show sufficient guarantees of archaeological experience. The Administration of Palestine shall not, in granting these authorizations, act in such a way as to exclude scholars of any nation without good grounds.

(8) The proceeds of excavations may be divided between the excavator and the competent Department in a proportion fixed by that Department. If division seems impossible for scientific reasons, the excavator shall receive a fair indemnity in lieu of a part of the find.

ARTICLE 22. English, Arabic and Hebrew shall be the official languages of Palestine. Any statement or inscription in Arabic on stamps or money in Palestine shall be repeated in Hebrew and any statement or inscription in Hebrew shall be repeated in Arabic.

ARTICLE 23. The Administration of Palestine shall recognise the holy days of the respective communities in Palestine as legal days of rest for the members of such communities.

ARTICLE 24. The Mandatory shall make to the Council of the League of Nations an annual report to the satisfaction of the Council as to the measures taken during the year to carry out the provisions of the mandate. Copies of all laws and regulations promulgated or issued during the year shall be communicated with the report.

ARTICLE 25. In the territories lying between the Jordan and the eastern boundary of Palestine as ultimately determined, the Mandatory shall be entitled, with the consent of the Council of the League of Nations, to postpone or withhold application of such provisions of this mandate as he may consider inapplicable to the existing local conditions, and to make such provision for the administration of the territories as he may consider suitable to those conditions, provided that no action shall be taken which is inconsistent with the provisions of Articles 15, 16 and 18.

ARTICLE 26. The Mandatory agrees that, if any dispute whatever should arise between the Mandatory and another member of the League of Nations relating to the interpretation or the application of the provisions of the mandate, such dispute, if it cannot be settled by negotiation, shall be submitted to the Permanent Court of International Justice provided for by Article 14 of the Covenant of the League of Nations.

ARTICLE 27. The consent of the Council of the League of Nations is required for any modification of the terms of this mandate.

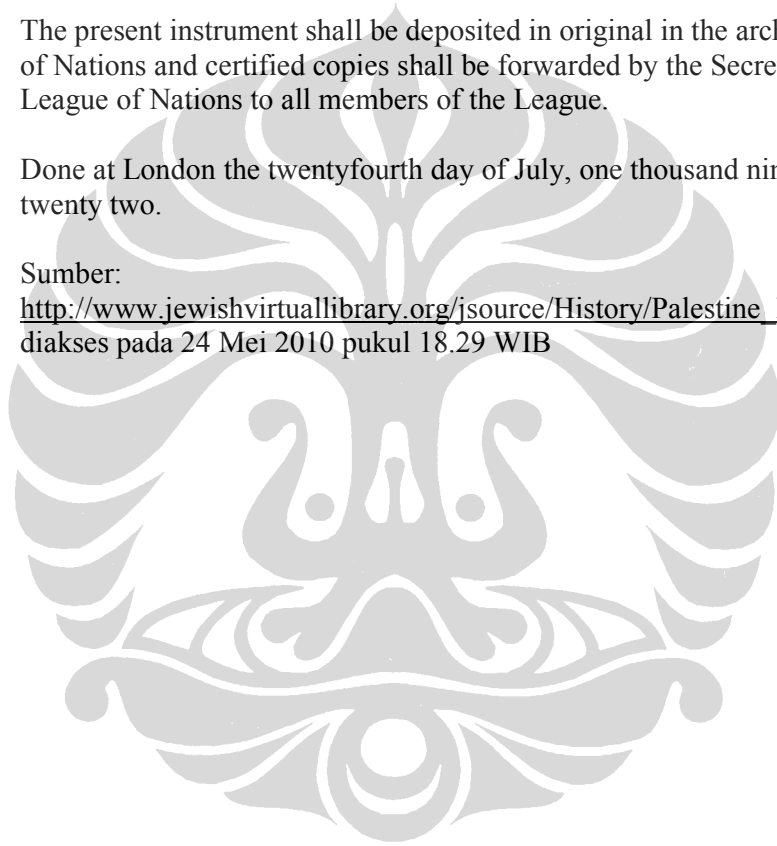
ARTICLE 28. In the event of the termination of the mandate hereby conferred upon the Mandatory, the Council of the League of Nations shall make such arrangements as may be deemed necessary for safeguarding in perpetuity, under guarantee of the League, the rights secured by Articles 13 and 14, and shall use its influence for securing, under the guarantee of the League, that the Government of Palestine will fully honour the financial obligations legitimately incurred by the Administration of Palestine during the period of the mandate, including the rights of public servants to pensions or gratuities.

The present instrument shall be deposited in original in the archives of the League of Nations and certified copies shall be forwarded by the SecretaryGeneral of the League of Nations to all members of the League.

Done at London the twentyfourth day of July, one thousand nine hundred and twenty two.

Sumber:

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/Palestine_Mandate.html#art6
diakses pada 24 Mei 2010 pukul 18.29 WIB



LAMPIRAN 3

The Nuremberg Laws

Law for the Protection of German Blood and German Honor

Firm in the knowledge that the purity of German blood is the basis for the survival of the German people and inspired by the unshakeable determination to safeguard the future of the German nation, the Reichstag has unanimously resolved upon the following law, which is promulgated herewith:

Section 1

Marriages between Jews and citizens of German or some related blood are forbidden.

Such marriages contracted despite the law are invalid, even if they take place abroad in order to avoid the law.

Section 2

Sexual relations outside marriage between Jews and citizens of German or related blood are forbidden.

Section 3

Jews will not be permitted to employ female citizens of German or related blood who are under 45 years as housekeepers.

Section 4

1. Jews are forbidden to raise the national flag or display the national colors.
2. However, they are allowed to display the Jewish colors. The exercise of this right is protected by the State.

Section 5

1. Anyone who disregards Section 1 is liable to penal servitude.
2. Anyone who disregards the prohibition of Section 2 will be punished with imprisonment or penal servitude.
3. Anyone who disregards the provisions of Sections 3 or 4 will be punished with imprisonment up to one year or with a fine, or with one of these penalties.

.....

The Reich Citizenship Law, 1935

Article 1

Section 1

A German subject is one who is a member of the protective union of the German Reich and is bound to it by special obligations. . . .

Section 2

1. A Reich citizen is that subject who is of German or related blood only and who through his behavior demonstrates that he is ready and able to serve faithfully the German people and Reich.

2. The right to citizenship of the Reich is acquired by the grant of citizenship papers.
3. A citizen of the Reich is the sole bearer of full political rights as provided by the law.

In the subsequent clarifying regulation of Nov. 14, 1935, a Jew was defined as anyone who was descended from: (a) at least three racially full Jewish grandparents or (b) two full Jewish parents if he or she belonged to the Jewish religious community (i.e., an observing Jew); was married to a Jewish person; was the offspring of a full Jew (as defined in a.) or the offspring of an extramarital relationship with a full Jew. Neither could a Jew be a citizen of the Reich, vote or hold public office.

Incidentally, persons of mixed Jewish blood (i.e., half-Jews--with one or two Jewish grandparents) were absolved from these restrictions, though, again, Jewish observance tightened the restrictions.

Sumber: <http://web.jjay.cuny.edu/~jobrien/reference/ob14.html> diakses pada 24 Mei 2010 pukul 19.59 WIB



LAMPIRAN 4

Immigration (Legal) to Palestine of Jews from Germany and Austria				
Year	From Germany	From Austria	Total	% of total (legal) immigration
1933	6,803	328	7,131	22.3
1934	8,497	928	9,425	21.4
1935	7,447	1,376	8,823	14.5
1936	7,896	581	8,477	26.8
1937	3,280	214	3,494	28.1
1938	4,223	2,964	7,187	40.5
Total	38,146	6,391	44,537	22.3

(End note 62: Sources: 15-2, Max Birnbaum; Rosenstock, op. cit, pp. 15-32, HOG report on immigration to Palestine. The figures included "tourists" who stayed on in Palestine and were later legalized by the government.

Sumber: http://www.geschichteinchronologie.ch/judentum-aktenlage/hol/joint/Bauer_joint04-11-Legal-gj-immigration-to-Palestine-1933-1938-44537-ENGL.html diakses pada 24 Mei 2010 pukul 18. 37

British White Paper of 1939

In the statement on Palestine, issued on 9 November, 1938, His Majesty's Government announced their intention to invite representatives of the Arabs of Palestine, of certain neighboring countries and of the Jewish Agency to confer with them in London regarding future policy. It was their sincere hope that, as a result of full, free and frank discussions, some understanding might be reached. Conferences recently took place with Arab and Jewish delegations, lasting for a period of several weeks, and served the purpose of a complete exchange of views between British Ministers and the Arab and Jewish representatives. In the light of the discussions as well as of the situation in Palestine and of the Reports of the Royal Commission and the Partition Commission, certain proposals were formulated by His Majesty's Government and were laid before the Arab and Jewish Delegations as the basis of an agreed settlement. Neither the Arab nor the Jewish delegation felt able to accept these proposals, and the conferences therefore did not result in an agreement. Accordingly His Majesty's Government are free to formulate their own policy, and after careful consideration they have decided to adhere generally to the proposals which were finally submitted to and discussed with the Arab and Jewish delegations.

The Mandate for Palestine, the terms of which were confirmed by the Council of the League of Nations in 1922, has governed the policy of successive British Governments for nearly 20 years. It embodies the Balfour Declaration and imposes on the Mandatory four main obligations. These obligations are set out in Article 2, 6 and 13 of the Mandate. There is no dispute regarding the interpretation of one of these obligations, that touching the protection of and access to the Holy Places and religious building or sites. The other three main obligations are generally as follows:

To place the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment in Palestine of a national home for the Jewish People. To facilitate Jewish immigration under suitable conditions, and to encourage, in cooperation with the Jewish Agency, close settlement by Jews on the Land.

To safeguard the civil and religious rights of all inhabitants of Palestine irrespective of race and religion, and, whilst facilitating Jewish immigration and settlement, to ensure that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced.

To place the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the development of self governing institutions.

The Royal Commission and previous commissions of Enquiry have drawn attention to the ambiguity of certain expressions in the Mandate, such as the expression 'a national home for the Jewish people', and they have found in this ambiguity and the resulting uncertainty as to the objectives of policy a fundamental cause of unrest and hostility between Arabs and Jews. His Majesty's Government are convinced that in the interests of the peace and well being of the whole people of Palestine a clear definition of policy and objectives is

essential. The proposal of partition recommended by the Royal Commission would have afforded such clarity, but the establishment of self supporting independent Arab and Jewish States within Palestine has been found to be impracticable. It has therefore been necessary for His Majesty's Government to devise an alternative policy which will, consistent with their obligations to Arabs and Jews, meet the needs of the situation in Palestine. Their views and proposals are set forth below under three heads, Section I, "The Constitution", Section II. Immigration and Section III. Land.

Section I. "The Constitution"

It has been urged that the expression "a national home for the Jewish people" offered a prospect that Palestine might in due course become a Jewish State or Commonwealth. His Majesty's Government do not wish to contest the view, which was expressed by the Royal Commission, that the Zionist leaders at the time of the issue of the Balfour Declaration recognised that an ultimate Jewish State was not precluded by the terms of the Declaration. But, with the Royal Commission, His Majesty's Government believe that the framers of the Mandate in which the Balfour Declaration was embodied could not have intended that Palestine should be converted into a Jewish State against the will of the Arab population of the country. That Palestine was not to be converted into a Jewish State might be held to be implied in the passage from the Command Paper of 1922 which reads as follows

"Unauthorized statements have been made to the effect that the purpose in view is to create a wholly Jewish Palestine. Phrases have been used such as that 'Palestine is to become as Jewish as England is English.' His Majesty's Government regard any such expectation as impracticable and have no such aim in view. Nor have they at any time contemplated the disappearance or the subordination of the Arabic population, language or culture in Palestine. They would draw attention to the fact that the terms of the (Balfour) Declaration referred to do not contemplate that Palestine as a whole should be converted into a Jewish National Home, but that such a Home should be founded IN PALESTINE."

But this statement has not removed doubts, and His Majesty's Government therefore now declare unequivocally that it is not part of their policy that Palestine should become a Jewish State. They would indeed regard it as contrary to their obligations to the Arabs under the Mandate, as well as to the assurances which have been given to the Arab people in the past, that the Arab population of Palestine should be made the subjects of a Jewish State against their will.

The nature of the Jewish National Home in Palestine was further described in the Command Paper of 1922 as follows

"During the last two or three generations the Jews have recreated in Palestine a community now numbering 80,000, of whom about one fourth are farmers or workers upon the land. This community has its own political organs; an elected assembly for the direction of its domestic concerns; elected councils in the towns; and an organisation for the control of its schools. It has its elected Chief Rabbinate and Rabbinical Council for the direction of its religious affairs. Its business is conducted in Hebrew as a vernacular language, and a Hebrew press serves its needs. It has its distinctive intellectual life and displays considerable economic activity. This community, then, with its town and country population, its political, religious and social organisations, its own language, its own customs, its own life, has in fact 'national' characteristics. When it is asked what is meant

by the development of the Jewish National Home in Palestine, it may be answered that it is not the imposition of a Jewish nationality upon the inhabitants of Palestine as a whole, but the further development of the existing Jewish community, with the assistance of Jews in other parts of the world, in order that it may become a centre in which the Jewish people as a whole may take, on grounds of religion and race, an interest and pride. But in order that this community should have the best prospect of free development and provide a full opportunity for the Jewish people to display its capacities, it is essential that it should know that it is in Palestine as of right and not on sufferance. That is the reason why it is necessary that the existence of a Jewish National Home in Palestine should be internationally guaranteed, and that it should be formally recognised to rest upon ancient historic connection."

His Majesty's Government adhere to this interpretation of the (Balfour) Declaration of 1917 and regard it as an authoritative and comprehensive description of the character of the Jewish National Home in Palestine. It envisaged the further development of the existing Jewish community with the assistance of Jews in other parts of the world. Evidence that His Majesty's Government have been carrying out their obligation in this respect is to be found in the facts that, since the statement of 1922 was published, more than 300,000 Jews have immigrated to Palestine, and that the population of the National Home has risen to some 450,000, or approaching a third of the entire population of the country. Nor has the Jewish community failed to take full advantage of the opportunities given to it. The growth of the Jewish National Home and its achievements in many fields are a remarkable constructive effort which must command the admiration of the world and must be, in particular, a source of pride to the Jewish people.

In the recent discussions the Arab delegations have repeated the contention that Palestine was included within the area in which Sir Henry McMahon, on behalf of the British Government, in October, 1915, undertook to recognise and support Arab independence. The validity of this claim, based on the terms of the correspondence which passed between Sir Henry McMahon and the Sharif of Mecca, was thoroughly and carefully investigated by the British and Arab representatives during the recent conferences in London. Their report, which has been published, states that both the Arab and the British representatives endeavoured to understand the point of view of the other party but that they were unable to reach agreement upon an interpretation of the correspondence. There is no need to summarize here the arguments presented by each side. His Majesty's Government regret the misunderstandings which have arisen as regards some of the phrases used. For their part they can only adhere, for the reasons given by their representatives in the Report, to the view that the whole of Palestine west of Jordan was excluded from Sir Henry McMahon's pledge, and they therefore cannot agree that the McMahon correspondence forms a just basis for the claim that Palestine should be converted into an Arab State.

His Majesty's Government are charged as the Mandatory authority "to secure the development of self governing institutions" in Palestine. Apart from this specific obligation, they would regard it as contrary to the whole spirit of the Mandate system that the population of Palestine should remain forever under Mandatory tutelage. It is proper that the people of the country should as early as possible enjoy the rights of self-government which are exercised by the people of neighbouring countries. His Majesty's Government are unable at present to foresee the exact constitutional forms which government in Palestine will eventually take, but their objective is self government, and they desire to see established ultimately an independent Palestine State. It should be a

State in which the two peoples in Palestine, Arabs and Jews, share authority in government in such a way that the essential interests of each are shared.

The establishment of an independent State and the complete relinquishment of Mandatory control in Palestine would require such relations between the Arabs and the Jews as would make good government possible. Moreover, the growth of self governing institutions in Palestine, as in other countries, must be an evolutionary process. A transitional period will be required before independence is achieved, throughout which ultimate responsibility for the Government of the country will be retained by His Majesty's Government as the Mandatory authority, while the people of the country are taking an increasing share in the Government, and understanding and cooperation amongst them are growing. It will be the constant endeavour of His Majesty's Government to promote good relations between the Arabs and the Jews.

In the light of these considerations His Majesty's Government make the following declaration of their intentions regarding the future government of Palestine:

The objective of His Majesty's Government is the establishment within 10 years of an independent Palestine State in such treaty relations with the United Kingdom as will provide satisfactorily for the commercial and strategic requirements of both countries in the future. The proposal for the establishment of the independent State would involve consultation with the Council of the League of Nations with a view to the termination of the Mandate.

The independent State should be one in which Arabs and Jews share government in such a way as to ensure that the essential interests of each community are safeguarded.

The establishment of the independent State will be preceded by a transitional period throughout which His Majesty's Government will retain responsibility for the country. During the transitional period the people of Palestine will be given an increasing part in the government of their country. Both sections of the population will have an opportunity to participate in the machinery of government, and the process will be carried on whether or not they both avail themselves of it.

As soon as peace and order have been sufficiently restored in Palestine steps will be taken to carry out this policy of giving the people of Palestine an increasing part in the government of their country, the objective being to place Palestinians in charge of all the Departments of Government, with the assistance of British advisers and subject to the control of the High Commissioner. Arab and Jewish representatives will be invited to serve as heads of Departments approximately in proportion to their respective populations. The number of Palestinians in charge of Departments will be increased as circumstances permit until all heads of Departments are Palestinians, exercising the administrative and advisory functions which are presently performed by British officials. When that stage is reached consideration will be given to the question of converting the Executive Council into a Council of Ministers with a consequential change in the status and functions of the Palestinian heads of Departments.

His Majesty's Government make no proposals at this stage regarding the establishment of an elective legislature. Nevertheless they would regard this as an appropriate constitutional development, and, should public opinion in Palestine hereafter show itself in favour of such a development, they will be prepared, provided that local conditions permit, to establish the necessary machinery.

At the end of five years from the restoration of peace and order, an appropriate body representative of the people of Palestine and of His Majesty's Government will be set up to review the working of the constitutional arrangements during the transitional period and to consider and make recommendations regarding the constitution of the independent Palestine State.

His Majesty's Government will require to be satisfied that in the treaty contemplated by sub-paragraph (6) adequate provision has been made for:

the security of, and freedom of access to the Holy Places, and protection of the interests and property of the various religious bodies.

the protection of the different communities in Palestine in accordance with the obligations of His Majesty's Government to both Arabs and Jews and for the special position in Palestine of the Jewish National Home.

such requirements to meet the strategic situation as may be regarded as necessary by His Majesty's Government in the light of the circumstances then existing. His Majesty's Government will also require to be satisfied that the interests of certain foreign countries in Palestine, for the preservation of which they are at present responsible, are adequately safeguarded.

His Majesty's Government will do everything in their power to create conditions which will enable the independent Palestine State to come into being within 10 years. If, at the end of 10 years, it appears to His Majesty's Government that, contrary to their hope, circumstances require the postponement of the establishment of the independent State, they will consult with representatives of the people of Palestine, the Council of the League of Nations and the neighbouring Arab States before deciding on such a postponement. If His Majesty's Government come to the conclusion that postponement is unavoidable, they will invite the co-operation of these parties in framing plans for the future with a view to achieving the desired objective at the earliest possible date.

During the transitional period steps will be taken to increase the powers and responsibilities of municipal corporations and local councils.

Section II. Immigration

Under Article 6 of the Mandate, the Administration of Palestine, "while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced," is required to "facilitate Jewish immigration under suitable conditions." Beyond this, the extent to which Jewish immigration into Palestine is to be permitted is nowhere defined in the Mandate. But in the Command Paper of 1922 it was laid down that for the fulfilment of the policy of establishing a Jewish National Home:

"it is necessary that the Jewish community in Palestine should be able to increase its numbers by immigration. This immigration cannot be so great in volume as to exceed whatever may be the economic capacity of the country at the time to absorb new arrivals. It is essential to ensure that the immigrants should not be a burden upon the people of Palestine as a whole, and that they should not deprive any section of the present population of their employment."

In practice, from that date onwards until recent times, the economic absorptive capacity of the country has been treated as the sole limiting factor, and in the letter which Mr. Ramsay MacDonald, as Prime Minister, sent to Dr. Weizmann in February 1931 it was laid down as a matter of policy that economic absorptive capacity was the sole criterion. This interpretation has been supported by resolutions of the Permanent Mandates Commissioner. But His Majesty's Government do not read either the Statement of Policy of 1922 or the letter of 1931 as implying that the Mandate requires them, for all time and in all circumstances, to facilitate the immigration of Jews into Palestine subject only to consideration of the country's economic absorptive capacity. Nor do they find anything in the Mandate or in subsequent Statements of Policy to support the view that the establishment of a Jewish National Home in Palestine cannot be effected unless immigration is allowed to continue indefinitely. If immigration has an adverse effect on the economic position in the country, it should clearly be restricted; and equally, if it has a seriously damaging effect on the political position in the country, that is a factor that should not be ignored. Although it is not difficult to contend that the large number of Jewish immigrants who have been admitted so far have been absorbed economically, the fear of the Arabs that this influx will continue indefinitely until the Jewish population is in a position to dominate them has produced consequences which are extremely grave for Jews and Arabs alike and for the peace and prosperity of Palestine. The lamentable disturbances of the past three years are only the latest and most sustained manifestation of this intense Arab apprehension. The methods employed by Arab terrorists against fellow Arabs and Jews alike must receive unqualified condemnation. But it cannot be denied that fear of indefinite Jewish immigration is widespread amongst the Arab population and that this fear has made possible disturbances which have given a serious setback to economic progress, depleted the Palestine exchequer, rendered life and property insecure, and produced a bitterness between the Arab and Jewish populations which is deplorable between citizens of the same country. If in these circumstances immigration is continued up to the economic absorptive capacity of the country, regardless of all other considerations, a fatal enmity between the two peoples will be perpetuated, and the situation in Palestine may become a permanent source of friction amongst all peoples in the Near and Middle East. His Majesty's Government cannot take the view that either their obligations under the Mandate, or considerations of common sense and justice, require that they should ignore these circumstances in framing immigration policy.

In the view of the Royal Commission the association of the policy of the Balfour Declaration with the Mandate system implied the belief that Arab hostility to the former would sooner or later be overcome. It has been the hope of British Governments ever since the Balfour Declaration was issued that in time the Arab population, recognizing the advantages to be derived from Jewish settlement and development in Palestine, would become reconciled to the further growth of the Jewish National Home. This hope has not been fulfilled. The alternatives before His Majesty's Government are either (i) to seek to expand the Jewish National Home indefinitely by immigration, against the strongly expressed will of the Arab people of the country; or (ii) to permit further expansion of the Jewish National Home by immigration only if the Arabs are prepared to acquiesce in it. The former policy means rule by force. Apart from other considerations, such a policy seems to His Majesty's Government to be contrary to the whole spirit of Article 22 of the Covenant of the League of Nations, as well as to their specific obligations to the Arabs in the Palestine Mandate. Moreover, the relations between the Arabs and the Jews in Palestine must be based sooner or later on mutual tolerance and goodwill; the peace, security and progress of the Jewish National Home itself requires this. Therefore His Majesty's Government, after earnest consideration, and taking into account the extent to which the growth of the Jewish National Home has been facilitated over the last twenty

years, have decided that the time has come to adopt in principle the second of the alternatives referred to above.

It has been urged that all further Jewish immigration into Palestine should be stopped forthwith. His Majesty's Government cannot accept such a proposal. It would damage the whole of the financial and economic system of Palestine and thus effect adversely the interests of Arabs and Jews alike. Moreover, in the view of His Majesty's Government, abruptly to stop further immigration would be unjust to the Jewish National Home. But, above all, His Majesty's Government are conscious of the present unhappy plight of large numbers of Jews who seek refuge from certain European countries, and they believe that Palestine can and should make a further contribution to the solution of this pressing world problem. In all these circumstances, they believe that they will be acting consistently with their Mandatory obligations to both Arabs and Jews, and in the manner best calculated to serve the interests of the whole people of Palestine, by adopting the following proposals regarding immigration:

Jewish immigration during the next five years will be at a rate which, if economic absorptive capacity permits, will bring the Jewish population up to approximately one third of the total population of the country. Taking into account the expected natural increase of the Arab and Jewish populations, and the number of illegal Jewish immigrants now in the country, this would allow of the admission, as from the beginning of April this year, of some 75,000 immigrants over the next five years. These immigrants would, subject to the criterion of economic absorptive capacity, be admitted as follows:

For each of the next five years a quota of 10,000 Jewish immigrants will be allowed on the understanding that a shortage one year may be added to the quotas for subsequent years, within the five year period, if economic absorptive capacity permits.

In addition, as a contribution towards the solution of the Jewish refugee problem, 25,000 refugees will be admitted as soon as the High Commissioner is satisfied that adequate provision for their maintenance is ensured, special consideration being given to refugee children and dependents.

The existing machinery for ascertaining economic absorptive capacity will be retained, and the High Commissioner will have the ultimate responsibility for deciding the limits of economic capacity. Before each periodic decision is taken, Jewish and Arab representatives will be consulted.

After the period of five years, no further Jewish immigration will be permitted unless the Arabs of Palestine are prepared to acquiesce in it.

His Majesty's Government are determined to check illegal immigration, and further preventive measures are being adopted. The numbers of any Jewish illegal immigrants who, despite these measures, may succeed in coming into the country and cannot be deported will be deducted from the yearly quotas.

His Majesty's Government are satisfied that, when the immigration over five years which is now contemplated has taken place, they will not be justified in facilitating, nor will they be under any obligation to facilitate, the further development of the Jewish National Home by immigration regardless of the wishes of the Arab population.

Section III. Land

The Administration of Palestine is required, under Article 6 of the Mandate, "while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced," to encourage "close settlement by Jews on the land," and no restriction has been imposed hitherto on the transfer of land from Arabs to Jews. The Reports of several expert Commissions have indicated that, owing to the natural growth of the Arab population and the steady sale in recent years of Arab land to Jews, there is now in certain areas no room for further transfers of Arab land, whilst in some other areas such transfers of land must be restricted if Arab cultivators are to maintain their existing standard of life and a considerable landless Arab population is not soon to be created. In these circumstances, the High Commissioner will be given general powers to prohibit and regulate transfers of land. These powers will date from the publication of this statement of policy and the High Commissioner will retain them throughout the transitional period.

The policy of the Government will be directed towards the development of the land and the improvement, where possible, of methods of cultivation. In the light of such development it will be open to the High Commissioner, should he be satisfied that the "rights and position" of the Arab population will be duly preserved, to review and modify any orders passed relating to the prohibition or restriction of the transfer of land.

In framing these proposals His Majesty's Government have sincerely endeavoured to act in strict accordance with their obligations under the Mandate to both the Arabs and the Jews. The vagueness of the phrases employed in some instances to describe these obligations has led to controversy and has made the task of interpretation difficult. His Majesty's Government cannot hope to satisfy the partisans of one party or the other in such controversy as the Mandate has aroused. Their purpose is to be just as between the two people in Palestine whose destinies in that country have been affected by the great events of recent years, and who, since they live side by side, must learn to practice mutual tolerance, goodwill and cooperation. In looking to the future, His Majesty's Government are not blind to the fact that some events of the past make the task of creating these relations difficult; but they are encouraged by the knowledge that as many times and in many places in Palestine during recent years the Arab and Jewish inhabitants have lived in friendship together. Each community has much to contribute to the welfare of their common land, and each must earnestly desire peace in which to assist in increasing the well-being of the whole people of the country. The responsibility which falls on them, no less than upon His Majesty's Government, to cooperate together to ensure peace is all the more solemn because their country is revered by many millions of Moslems, Jews and Christians throughout the world who pray for peace in Palestine and for the happiness of her people.

Sumber: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/paper39.html> diakses pada 24 Mei 2010 pukul 18.29 WIB

LAMPIRAN 6

Kapal-Kapal *Aliyah Bet*

Name	Passengers	Arrival Date
Norsyd/Hagana	2,670	July 1946
Beauharnois/Wedgewood	1,250	July 1946
Ulua/Chaim Arlosoroff	1,398	February 1947
Abril/Ben Hecht	599	March 1947
Tradewinds/Hatikva (Hope)	1,422	May 1947
President Warfield/Exodus	4,493	July 1947
Paducah/Geula (Redemption)	1,385	October 1947
Northland/Jewish State	2,664	October 1947
Pan York/Ingathering of Exiles	7,557	December 1947
Pan Crescent/Independence	7,612	December 1947

*Original name, followed by new name as Aliyah Bet ship

Sumber: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Immigration/aliyahbet.html> diakses pada 24 Mei 2010 pukul 18.29 WIB

LAMPIRAN 7

Kibbutz Population

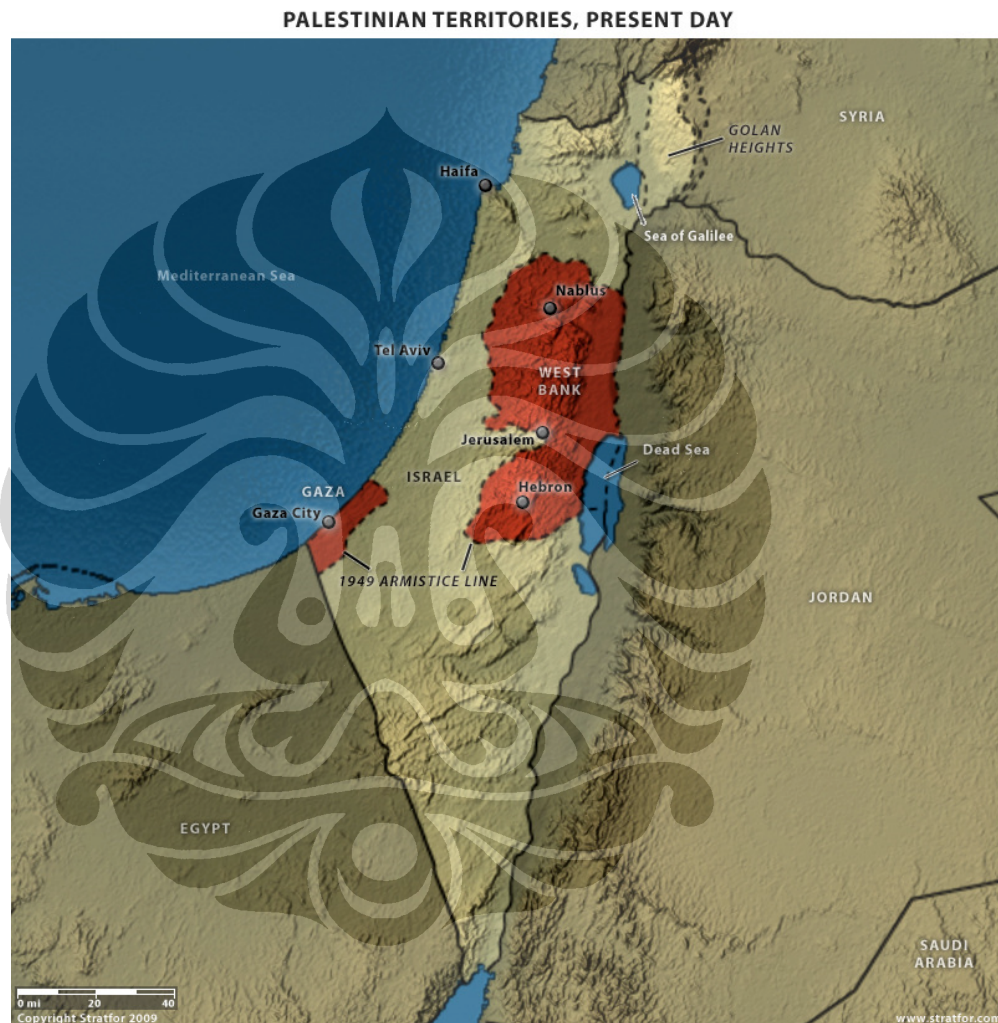
Year	No. of kibbutzim	Kibbutz Population
1910	1	
1920	12	805
1930	29	3,900
1940	82	26,550
1950	214	67,550
1960	229	77,950
1970	229	85,100
1980	255	111,200
1990	270	125,100
2000	268	117,300

Sumber:

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsourc/Society_&_Culture/kibbutz.html, diakses pada 15/06/2010 pukul 15:44

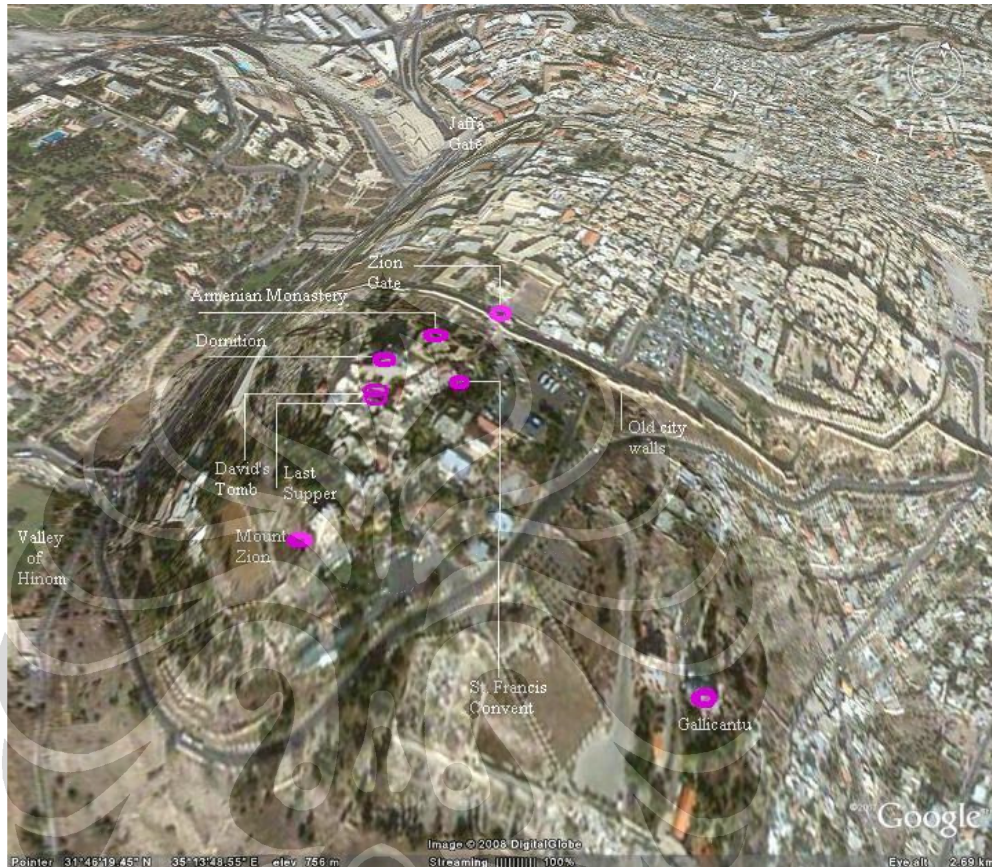
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Palestina dan Israel



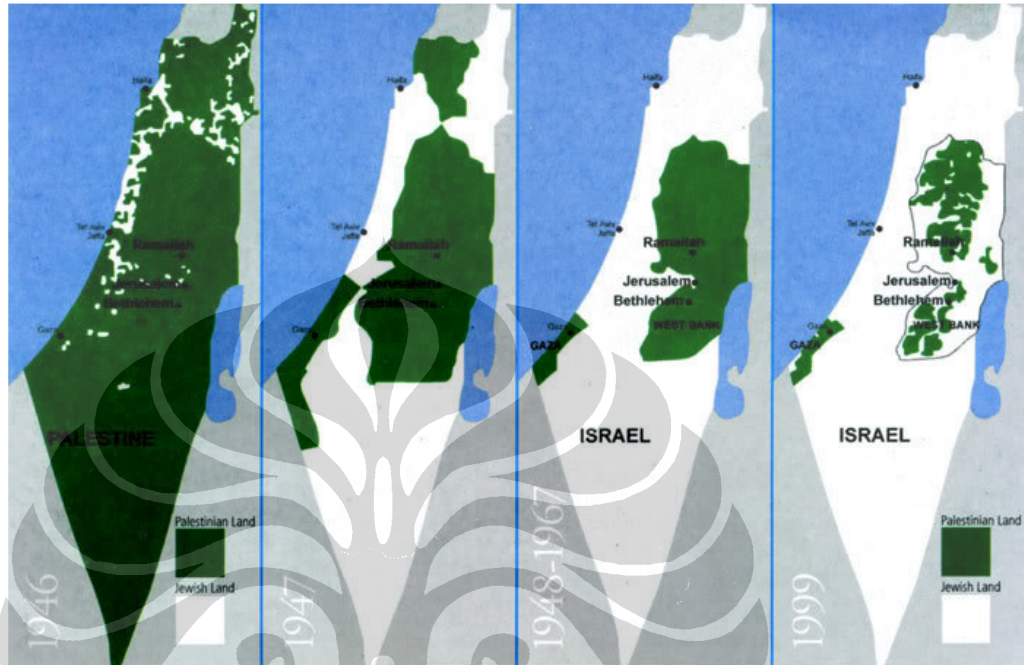
Sumber: <http://www.casaisrael.com/readingaboutIsrael.htm> diakses pada 16/07/2010 pukul 10.42 WIB

Gambar 2. Bukit Zion



Sumber: http://www.biblewalks.com/Photos19/MountZion_google.jpg diakses pada 01/07/2010 pukul 8.50 WIB

Gambar 3. Peta penyusutan wilayah Palestina



Sumber: http://i243.photobucket.com/albums/ff132/avenueboys/Israel-Palestine_maps.jpg
diakses pada 01/07/2010 pukul 9.06 WIB

Gambar 4. Theodor Herzl



Sumber: <http://ivarfeld.files.wordpress.com/2009/05/herzl-www-israelvets-com.jpg> diakses pada 01/07/2010 pukul 8.47 WIB

Gambar 5. Para Pemukim Rishon LeZion, Petah Tikvah, dan Ekron



First settlers in Rishon Le-Zion 1890



Sumber: <http://www.jafi.org.il/education/100/places/rishon.html> diakses pada 06/05/2010 pukul 15.37 WIB, <http://www.jafi.org.il/education/100/places/pt.html> diakses pada 06/05/2010 pukul 15.47 WIB, http://en.wikipedia.org/wiki/Mazkeret_Batya diakses pada 06/05/2010 pukul 16.00 WIB

Gambar 6. Chaim Weizmann dan Emir Faisal dalam Konferensi Perdamaian 1919



Sumber: http://tmq2.files.wordpress.com/2008/05/weizmann_and_feisal_1918.jpg
diakses pada 01/07/2010 pukul 8.49 WIB

Gambar 7. Korban Holocaust



Sumber: <http://bennauro.blogspot.com/2008/02/german-professors-weve-paid-for.html> diakses pada 01/07/2010 pukul 8.58 WIB

Gambar 8. Kapal Patria yang sedang tenggelam, Struma, dan Exodus 1947



Sumber:

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Patria1940.jpg/299px-Patria1940.jpg> diakses pada 01/07/2010 pukul 9.02 WIB, <http://www.narrow-gate.net/jeffking/images/struma.jpg> diakses pada 01/07/2010 pukul 9.00 WIB, <http://www.jewishmag.com/140mag/exodus/exodus.htm> diakses pada 23/05/2010 pukul 19.42 WIB

Gambar 9. David Ben Gurion mendeklarasikan kemerdekaan Israel



Sumber:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Declaration_of_State_of_Israel_1948.jpg diakses pada 30/06/2010 pukul 11.18 WIB